

BERKEJARAN DENGAN WAKTU

Kajian Kebijakan untuk
Mengatasi dan Mencegah
Dampak COVID-19 pada
Anak dan Individu Rentan





Pemerintah Indonesia menyadari bahwa cara menangani kedaruratan serta mempersiapkan pemulihan dan rehabilitasi pandemi COVID-19 sekarang menentukan seberapa Indonesia dapat mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan.

Selain bantuan segera, pemerintah pusat dan daerah juga harus menyiapkan tata kelola berbagai layanan untuk beroperasi dalam tatanan sosial ekonomi yang sama sekali baru setelah wabah ini dapat diatasi penyebarannya.

Bappenas bersama PUSKAPA, UNICEF, dan KOMPAK mengidentifikasi anak-anak dan kelompok-kelompok rentan dalam COVID-19 dan risiko yang mereka hadapi. Kajian kebijakan juga berisi masukan yang mengurai pertimbangan-pertimbangan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk digunakan berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah merencanakan kebijakan dan program yang inklusif dan responsif terhadap situasi setelah pandemi.

DAFTAR ISI

i DAFTAR ISI

iii DAFTAR TABEL

6 YANG RENTAN DAN MENJADI RENTAN DALAM PANDEMI COVID-19

7 01 - Anak-anak, lansia, dan difabel di rumah tangga sangat miskin dan miskin

12 02 - Anak-anak dalam rumah tangga yang dikepalai orang tua tunggal, perempuan, lansia, dan orang berusia anak

15 03 - Anak-anak, lansia, dan difabel tanpa identitas hukum

18 04 - Anak-anak, lansia, dan difabel dalam rumah tangga tanpa air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak

24 05 - Anak-anak, lansia, dan difabel yang belum memiliki asuransi kesehatan

27 06 - Anak-anak yang terputus dari kesempatan belajar

30 07 - Anak yang terdampak COVID-19 secara langsung

31 KELOMPOK-KELOMPOK KHUSUS YANG TERSEMBUNYI DALAM PANDEMI COVID-19

32 01 - Anak-anak yang berada di luar lingkungan keluarga

36 02 - Orang di dalam lingkungan yang berisiko

41 03 - Anak dan orang dewasa yang mengalami penyisihan sosial lainnya

43 MENDISKUSIKAN DEFINISI DAN SUMBER KERENTANAN DALAM PANDEMI COVID-19

51 REKOMENDASI UNTUK MENGATASI KERENTANAN DALAM PANDEMI COVID-19

52 A - Langkah kebijakan

58 B - Langkah jangka pendek dan menengah

65 C - Langkah jangka panjang

70 REFERENSI

78 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

-
- 8** **Tabel 1.**
Estimasi Rumah Tangga Sangat Miskin dan Miskin (Kuintil 1 dan 2) yang Mengasuh Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)
-
- 10** **Tabel 2.**
Estimasi Rumah Tangga yang di Dalamnya Terdapat Anak Bekerja (Susenas 2018)
-
- 13** **Tabel 3.**
Estimasi Rumah Tangga yang Mengasuh Anak di bawah-5 tahun dengan Kepala Keluarga Hanya Ayah/Ibu, Perempuan, Lansia, dan Berusia Anak (Susenas 2018)
-
- 16** **Tabel 4.**
Estimasi Rumah Tangga dengan Anak, Lansia, dan Difabel Tanpa Identitas Hukum (Susenas 2018)
-
- 19** **Tabel 5.**
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Air Bersih yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)
-
- 20** **Tabel 6.**
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Listrik yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)
-
- 22** **Tabel 7.**
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)
-
- 25** **Tabel 8.**
Estimasi Rumah Tangga yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel Tanpa Asuransi Kesehatan (Susenas 2018)
-
- 28** **Tabel 9.**
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Internet yang di Dalamnya Terdapat Anak Usia Sekolah (Susenas 2018)
-
- 33** **Tabel 10.**
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)
-
- 35** **Tabel 11.**
Jumlah dan Sebaran Anak Jalanan (Kompas 2018)
-
- 38** **Tabel 12.**
Jumlah dan Sebaran Anak yang Didampingi Peksos di Luar Panti (Kemosos 2020)
-
- 39** **Tabel 13.**
Jumlah Kasus Kekerasan yang Dilaporkan dan Tercatat (KPPPA 2020)
-
- 48** **Tabel 14.**
Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga di 15 Wilayah Terdampak COVID-19 (KPPPA 2020)
-
- 66** **Tabel 15.**
Estimasi Rasio Ketersediaan Layanan Dasar Perlindungan Warga (per 1 juta penduduk)

Menanggapi situasi penyebaran COVID-19, Pemerintah telah menerbitkan serangkaian paket kebijakan, di antaranya:

1

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

3

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

4

Keputusan Presiden 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah lalu menanggapi lewat berbagai kebijakan dan program masing-masing.

208

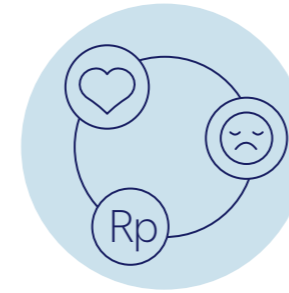
Kebijakan Lembaga Pusat

288

Kebijakan Pemerintah Daerah yang terpantau

Sampai dengan masukan kebijakan ini disusun, berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat pusat telah menerbitkan sekitar 208 kebijakan, dan terdapat 288 kebijakan Pemerintah Daerah yang terpantau (per 11/5/2020). Jumlah sesungguhnya pasti lebih banyak lagi. Sekilas tidak jauh berbeda dari proses tata kelola secara umum, di mana kebijakan pusat lalu diterjemahkan ke berbagai kebijakan sektor dan daerah, hanya saja semua jadi serba cepat.

Selain menuntut kecepatan, situasi ini menjadi luar biasa karena beberapa aspek.



Pertama, situasi ini akan berdampak panjang pada kesentosaan penduduk, termasuk pada keadaan kesehatan, mental, ekonomi, dan sosial mereka (United Nations, 2020; Suryahadi, Izzati & Suryadarma, 2020).



Kedua, meski dituntut serba cepat, paket kebijakan COVID-19 tidak akan efektif dalam meringankan penderitaan dan menangani kebutuhan orang-orang yang terkena dampak, terutama anak-anak dan kelompok rentan, tanpa pengaturan implementasi yang memadai.



Ketiga, sekalipun telah sering menangani situasi bencana, Indonesia hampir tidak memiliki pengalaman dalam menangani situasi pandemi pada skala ini. Bantuan dari pihak lain pun sangat minim tersedia, karena berbagai negara lain tengah menghadapi situasi yang sama. Meski demikian, berbagai bukti bisa dipelajari dari berbagai negara yang telah dipublikasikan. Sampai dengan masukan ini disusun, telah terdapat lebih dari 5.000 artikel jurnal tentang COVID-19.

Dari berbagai kebijakan yang diterbitkan K/L dan daerah di Indonesia, komitmen pemerintah untuk membantu warganya jelas terlihat.

Namun, kapasitas respons COVID-19 masih terbatas pada yang miskin, hampir miskin, dan sakit. Misalnya saja, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemdesPDTT) yang mengatur program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), memfokuskan penerimanya pada keluarga miskin yang bukan penerima Program

Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, yang belum terdata (akibat *exclusion error* di data terpadu kesejahteraan sosial/DTKS), atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun/kronis.

Definisi kerentanan dalam program yang sudah dirancang banyak didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber daya dan informasi terkait kemiskinan. Tentunya ini awal yang baik. Namun, kerentanan dalam situasi COVID-19 bersifat dinamis sehingga berbagai bukti menunjukkan bahwa maknanya harus diperluas (The Lancet, 2020), karena:

1

Kelompok yang tidak dianggap rentan dapat menjadi rentan, tergantung pada kebijakan yang dihasilkan

2

Respons yang tidak tepat berpotensi memunculkan kerentanan baru

3

Respons yang tidak tepat juga akan memperburuk kerentanan yang sudah ada

Untuk itu, berbagai program sektor dan daerah, tidak hanya bantuan sosial (bansos), jaring pengaman sosial (JPS), atau bantuan langsung tunai (BLT), harus meluaskan makna kerentanan dalam situasi COVID-19 ini.

Termasuk untuk program yang sudah berjalan, karena dalam tanggap darurat, tindakan yang cepat harus diiringi dengan perbaikan terus-menerus sepanjang program berlangsung termasuk sampai nanti ketika beralih ke masa pemulihan dan rehabilitasi. Serangkaian analisis telah mengingatkan bahwa pandemi ini juga akan berdampak secara ekonomi pada kelas menengah-bawah (Hanna, R., 2020). Di samping itu, anak-anak dan individu rentan yang sebelum pandemi telah mengalami berbagai hambatan akses, ketimpangan kesempatan, dan penyisihan harus menjadi pertimbangan.

Kebutuhan agar sistem dan layanan lebih responsif dan terpadu untuk anak-anak dan kelompok rentan atau berisiko sudah dirasakan bahkan sebelum pandemi COVID-19 dan sekarang lebih mendesak lagi (Wong, Ming, Maslow, & Gifford, 2020).

Sekarang adalah saat yang tepat untuk mewujudkan perubahan tersebut.

Kajian kebijakan ini mendiskusikan anak-anak dan kelompok-kelompok rentan dalam COVID-19 dan risiko yang mereka hadapi, serta merekomendasikan langkah-langkah bagi pertimbangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program.

Kajian menggunakan analisis sekunder terhadap data-data nasional, data program atau sektor, dan tinjauan pustaka, yang sedapat mungkin memberikan gambaran di 15 provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak per 19/5/2020.¹ Berbagai kajian dan data lain tentang anak dan kelompok rentan yang tersebar dan belum digunakan dalam masukan kebijakan ini, juga dapat menjadi dasar pertimbangan yang lebih menyeluruh dengan menerapkannya di dalam kerangka pemikiran yang ditawarkan dalam kajian ini.

YANG RENTAN DAN MENJADI RENTAN DALAM PANDEMI COVID-19

Individu di dalam satu kelompok tertentu mungkin mengalami lebih dari satu kerentanan. Kerentanan yang dimiliki oleh satu individu juga mungkin dialami oleh individu dan kelompok lainnya. Hal ini dikarenakan faktor risiko dan pendukung yang bisa jadi serupa untuk individu dan kelompok rentan yang berbeda.

Angka-angka estimasi yang ditampilkan dalam bab ini memang belum merupakan data "by name by address," tetapi dapat menjadi titik tolak pertimbangan alokasi sumber-sumber daya dan perhatian kebijakan dan program ke depan.

¹ Situasi provinsi terdampak sangat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Meski pada saat Policy Paper ini final, daftar 15 provinsi terdampak ini sudah tidak lagi tepat, hitungan estimasi beberapa variabel utama untuk 34 provinsi tersedia di Lampiran.

I - 01

ANAK-ANAK, LANSIA, DAN DIFABEL DI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN DAN MISKIN



Bukti-bukti awal menunjukkan bahwa anak-anak sama berisikonya untuk terinfeksi SARS-CoV-2 (atau COVID-19) seperti orang dewasa, meski lebih kecil kemungkinannya untuk bergejala atau menjadi parah (Zimmermann & Curtis, 2020). Namun, data di Indonesia (per 11/6/2020) menunjukkan bahwa dari 2.615 kasus anak, 27 meninggal dunia (dengan perhitungan kasar kemungkinan kematian dari kasus yang tertangani sebesar 1%). Anak-anak, selain lansia dan difabel, juga merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih dalam respon COVID-19 (United Nations, 2020; Kelly & Llyod-Sherlock, 2020; Pineda & Corburn, 2020).

Membicarakan anak dalam konteks pandemi ini tidak terpisahkan dari lingkungan keluarganya, karena mayoritas anak-anak yang terinfeksi diketahui berkontak dengan virus di dalam lingkungan rumah tangga mereka (Zimmermann & Curtis, 2020). Dampak pada rumah tangga miskin diprediksi dapat memperburuk tingkat kemiskinan anak yang juga berdampak panjang pada kesehatan, kesejahteraan, dan luaran belajar mereka (Van Lancker & Parolin, 2020).

Dengan berbagai pertimbangan di atas, selain rumah tangga sangat miskin dan miskin yang bukan penerima PKH dan BPNT, respon COVID-19 harus mengalokasikan

sumber-sumber daya bagi rumah-rumah tangga miskin dan sangat miskin yang mengasuh anak-anak, lansia, dan difabel, yang estimasinya dapat dilihat di Tabel 1.²

Tabel 1.
Estimasi Rumah Tangga Sangat Miskin dan Miskin (Kuintil 1 dan 2) yang Mengasuh Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT dengan anggota anak di bawah 18 tahun	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT dengan anggota anak di bawah 5 tahun	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 3	Jumlah RT dengan anggota lansia	Jumlah lansia di RT kolom 5	Jumlah RT dengan anggota difabel	Jumlah difabel di RT kolom 7
DKI Jakarta	162.814	367.618 P: 185.836 L: 181.782	95.115	116.666 P: 58.443 L: 58.223	31.352	35.762 P: 17.404 L: 18.358	86.852	116.008 P: 61.729 L: 54.279
Jabar	3.655.589	6.913.250 P: 3.353.127 L: 3.560.123	1.794.053	1.975.231 P: 988.426 L: 986.805	1.463.310	1.957.094 P: 1.040.010 L: 917.085	1.954.747	2.456.020 P: 1.338.070 L: 1.117.949
Jatim	3.295.454	5.296.746 P: 2.593.859 L: 2.702.887	1.361.962	1.460.055 P: 720.167 L: 739.888	1.997.178	2.624.035 P: 1.434.893 L: 1.189.142	1.866.726	2.271.772 P: 1.268.227 L: 1.003.545
Jateng	3.130.367	5.413.597 P: 2.630.823 L: 2.782.774	1.425.650	1.571.889 P: 782.478 L: 789.411	1.812.128	2.437.736 P: 1.324.221 L: 1.113.515	1.808.241	2.206.546 P: 1.195.079 L: 1.011.467
Sulsel	691.077	1.539.178 P: 761.022 L: 778.156	365.580	441.466 P: 219.741 L: 221.726	290.961	387.103 P: 221.999 L: 165.104	451.944	588.899 P: 335.201 L: 253.697
Banten	629.925	1.369.344 P: 656.835 L: 712.508	345.528	407.835 P: 193.714 L: 214.121	177.002	215.846 P: 123.502 L: 92.344	290.488	384.305 P: 202.788 L: 181.515
Sumsel	691.077	1.506.897 P: 741.691 L: 765.206	373.110	419.028 P: 210.330 L: 208.698	210.567	273.982 P: 145.101 L: 128.881	333.431	434.828 P: 228.608 L: 206.222
Kalsel	225.495	450.460 P: 217.044 L: 233.416	112.859	128.402 P: 61.507 L: 66.895	73.589	90.726 P: 53.358 L: 37.368	107.524	129.924 P: 73.237 L: 56.688

² Semua tabel yang menampilkan angka laki-laki dan perempuan akan menunjukkan perbedaan atau selisih dengan nilai total bila dijumlah. Ini terjadi karena semua angka estimasi berdasarkan jenis kelamin dari Susenas diperoleh melalui pembulatan estimasi dari hasil pembobotan.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT dengan anggota anak di bawah 18 tahun	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT dengan anggota anak di bawah 5 tahun	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 3	Jumlah RT dengan anggota lansia	Jumlah lansia di RT kolom 5	Jumlah RT dengan anggota difabel	Jumlah difabel di RT kolom 7
Sumbar	225.495	694.940 P: 329.261 L: 365.679	165.469	207.076 P: 99.099 L: 107.977	52.535	90.726 P: 75.711 L: 53.070	107.524	129.924 P: 133.935 L: 92.537
Papua	231.729	567.232 P: 276.663 L: 290.569	115.281	157.126 P: 78.778 L: 78.348	9.533	34.272 P: 15.138 L: 19.133	59.711	86.965 P: 42.805 L: 44.160
NTB	544.780	1.000.996 P: 489.368 L: 511.629	271.867	296.513 P: 146.864 L: 149.649	186.931	237.865 P: 129.779 L: 108.085	266.736	323.219 P: 184.162 L: 139.058
Bali	207.237	403.363 P: 207.053 L: 207.053	102.717	117.823 P: 57.773 L: 60.050	111.765	160.881 P: 90.012 L: 70.869	116.074	143.752 P: 78.104 L: 65.649
Kaltim	88.360	192.250 P: 95.969 L: 96.281	44.469	54.935 P: 28.199 L: 26.736	24.679	31.514 P: 13.792 L: 17.722	51.301	67.650 P: 32.677 L: 34.973
Kalteng	146.334	296.213 P: 142.180 L: 154.033	79.503	91.484 P: 41.718 L: 49.765	34.064	42.865 P: 23.099 L: 19.766	63.852	83.923 P: 43.128 L: 40.797
Sumut	990.711	2.594.071 P: 1.275.914 L: 1.318.157	87.068	735.065 P: 355.043 L: 380.022	253.257	321.341 P: 179.075 L: 142.266	420.052	539.115 P: 294.898 L: 244.215
Total 15 Wilayah	15.031.678	28.606.155 P: 13.945.902 L: 14.660.255	9.611.178	8.180.594 P: 4.042.281 L: 4.138.314	6.797.920	8.979.804 P: 4.708.020 L: 4.092.706	8.055.598	10.059.398 P: 5.512.648 L: 4.546.751
Indonesia	19.524.432	38.448.982 P: 18.779.737 L: 19.669.247	7.208.412	11.091.466 P: 5.472.201 L: 5.619.267	8.253.431	10.888.607 P: 5.893.957 L: 4.994.648	10.356.329	13.067.915 P: 7.088.619 L: 5.979.29

Anak-anak, lansia, dan difabel di atas juga rentan terhadap situasi di mana pengasuh utama mereka kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Selibhnya, estimasi dalam Tabel 1 juga tersedia untuk anak-anak kelompok umur di bawah-1 tahun, lansia, difabel berdasarkan jenis kelamin untuk seluruh provinsi (lihat lampiran).

Meski tidak selalu berhubungan langsung, rumah tangga di mana terdapat anak-anak yang bekerja untuk mendapatkan upah kemungkinan akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Untuk itu, rumah tangga ini juga harus mendapat perhatian, yang estimasinya ada di Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Estimasi Rumah Tangga yang di Dalamnya Terdapat Anak Bekerja (Susenas 2018)³

	1	2
Provinsi	Jumlah RT dengan anak usia 10-17 tahun yang bekerja	Jumlah anak usia 10-17 tahun di RT kolom 1
DKI Jakarta	22.575	22.575 P: 11.473, L: 11.102
Jabar	213.591	215.687 P: 96.241, L: 119.445
Jatim	153.398	154.070 P: 53.300, L: 100.770
Jateng	163.998	165.286 P: 52.230, L: 113.057
Sulsel	110.683	111.211 P: 33.051, L: 78.160
Banten	38.495	38.495 P: 13.858, L: 24.637
Sumsel	55.747	55.758 P: 14.883, L: 40.876
Kalsel	34.940	35.594 P: 14.412, L: 21.182
Sumbar	33.581	33.581 P: 9.345, L: 24.237
Papua	78.511	78.692 P: 33.737, L: 44.955

³ Berdasarkan pertanyaan "Selama seminggu terakhir, apa saja kegiatan yang dilakukan (nama)?" pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018.

	1	2
Provinsi	Jumlah RT dengan anak usia 10-17 tahun yang bekerja	Jumlah anak usia 10-17 tahun di RT kolom 1
NTB	51.747	52.824 P: 21.034, L: 31.789
Bali	33.172	33.307 P: 15.649, L: 17.659
Kaltim	13.464	13.558 P: 4.975, L: 8.583
Kalteng	21.303	21.303 P: 7.384, L: 14.052
Sumut	200.691	204.007 P: 88.238, L: 115.771
Total 15 Wilayah	1.225.896	1.236.080 P: 469.809, L: 766.273
Indonesia	1.674.314	1.689.495 P: 604.068, L: 1.085.433

I - 02

ANAK-ANAK DALAM RUMAH TANGGA YANG DIKEPALAI ORANG TUA TUNGGAL, PEREMPUAN, LANSIA, DAN ORANG BERUSIA ANAK



Berbagai bukti yang ada menunjukkan bahwa individu lanjut usia (lansia) adalah salah satu kelompok paling rentan dalam terinfeksi COVID-19 dan mengembangkan gejala yang parah dibanding kelompok usia lainnya. Data di Indonesia yang diolah oleh inisiatif warga KawalCOVID per 18/6/2020 menunjukkan bahwa dari 5.706 total kasus lansia (60 tahun ke atas), 972 diantaranya diketahui meninggal dunia dengan tingkat kematian untuk kelompok usia lansia sebesar 17%. Sementara di Indonesia, terdapat sekitar 5.642.357 kepala keluarga lansia (60 tahun ke atas) yang rumah tangganya beranggotakan anak-anak usia di bawah-18 tahun, dengan total estimasi anak-anak yang diasuh kepala keluarga lansia sebanyak 9.055.503.

Selain anak-anak di bawah pengasuhan lansia, anak-anak yang diasuh oleh hanya ayah atau hanya ibu juga berisiko kehilangan pengasuhan jika orang tua tunggal mereka harus diisolasi atau harus dirawat lebih lanjut akibat COVID-19. Orang tua tunggal perempuan juga lebih rentan mengalami depresi akibat berubahnya situasi di rumah (Rosenthal, Ucci, Heys, Hayward, & Lakhnpaul, 2020). Di beberapa wilayah di Indonesia, ditemukan bahwa kepala keluarga perempuan lebih sedikit menerima beberapa bantuan atau program pemerintah dibanding kepala keluarga laki-laki (SMERU & SEKNAS PEKKA, 2014).

Terdapat juga anak-anak yang menjadi pekerja rumah tangga yang berdasarkan Sakernas tahun 2019 diperkirakan mencapai 15.108 di seluruh Indonesia, dengan 283.568 pekerja rumah tangga dewasa perempuan dan 15.408 dewasa laki-laki.⁴ Apabila rumah tangga tempat mereka bekerja melaksanakan penjarakkan aman dan kebersihan diri, rumah, dan lingkungan dengan baik, maka mereka mungkin lebih terlindungi.

Tetapi, risiko bagi mereka meningkat bila bekerja dalam rumah tangga dengan PDP, ODP, atau positif COVID-19, atau bila mereka kehilangan pekerjaan karena kendala ekonomi yang dialami pemberi kerjanya.

⁴ Berdasarkan pertanyaan "Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga" dengan kode 9. Pembantu rumah tangga.

Anak yang hidup dengan pengasuh difabel juga menjadi rentan karena keterbatasan informasi yang mungkin tersedia bagi kelompok difabel serta kondisi kesehatan berisiko dari orang dewasa difabel yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional anak (UNICEF, 2020).

Sementara itu, prevalensi kawin anak di Indonesia masih berada di angka 11,21 persen pada tahun 2018, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dengan jumlah anak yang dikawinkan terbesar (Badan Pusat Statistik, UNICEF, & PUSKAPA, 2020). Salah satu risiko langsung dari kawin anak adalah adanya anak-anak yang diasuh oleh orang-orang yang juga masih berusia anak dengan segala kerentanan yang melekat pada mereka.

Sementara di Indonesia, terdapat sekitar 77.813 kepala keluarga berusia anak yang rumah tangganya beranggotakan anak-anak (di bawah-18 tahun) di bawah pengasuhannya, dengan total estimasi anak-anak di bawah-18 tahun yang diasuh kepala keluarga berusia anak sebanyak 122.776.

Untuk itu, respons COVID-19 harus mengalokasikan sumber-sumber daya bagi setidaknya-tidaknya anak-anak balita yang pengasuh utamanya lansia, orang tua tunggal, perempuan, dan orang berusia anak, serta anak dengan orangtua yang difabel yang estimasinya dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3.
Estimasi Rumah Tangga yang Mengasuh Anak di bawah-5 tahun dengan Kepala Keluarga Hanya Ayah/Ibu, Perempuan, Lansia, dan Berusia Anak (Susenas 2018)

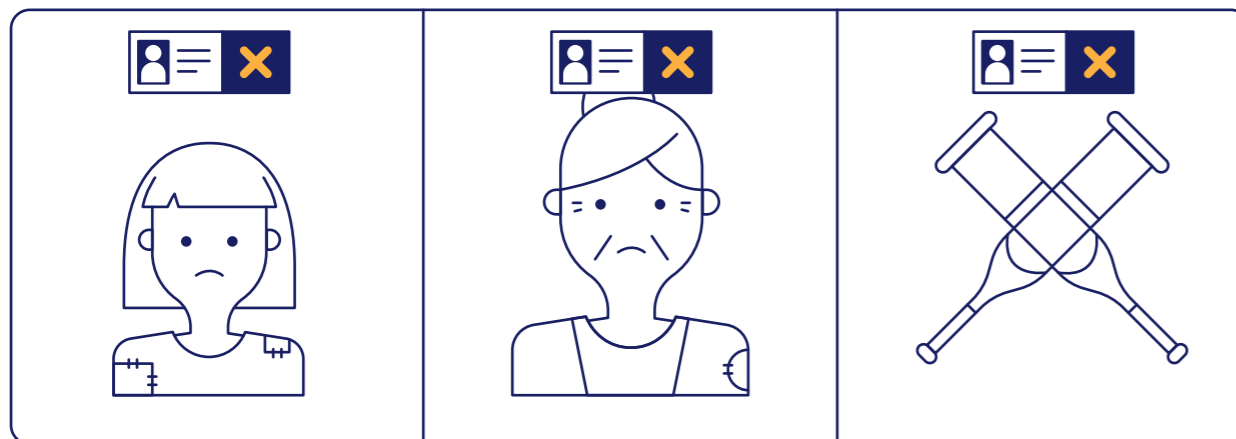
	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT dengan hanya ayah/ibu yang mengasuh anak di bawah 5 tahun	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT dengan kepala keluarga perempuan yang mengasuh anak di bawah 5 tahun	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 3	Jumlah RT dengan kepala keluarga lansia yang mengasuh anak di bawah 5 tahun	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 5	Jumlah RT dengan kepala keluarga anak yang mengasuh anak di bawah 5 tahun	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 7
DKI Jakarta	91.049	111.033 P: 59.265 L: 51.768	67.245	82.313 P: 43.863 L: 38.449	79.458	95.686 P: 52.021 L: 43.664	-	-
Jabar	312.353	344.470 P: 170.343 L: 174.127	225.729	247.643 P: 122.834 L: 124.808	307.583	331.709 P: 165.289 L: 166.420	350	350 P: 350

Jatim	361.485	396.370 P: 193.620 L: 202.750	274.174	301.429 P: 139.619 L: 161.810	424.653	469.575 P: 231.443 L: 238.132	804	804 P: 804
Jateng	324.445	357.475 P: 165.267 L: 192.208	244.201	271.176 P: 131.723 L: 139.453	434.457	485.227 P: 223.093 L: 262.134	-	-
Sulsel	106.305	129.419 P: 63.601 L: 65.818	82.185	101.398 P: 50.124 L: 51.274	107.160	130.868 P: 69.082 L: 61.786	-	-
Banten	106.395	126.321 P: 61.591 L: 64.729	79.614	95.392 P: 48.223 L: 47.169	92.937	108.915 P: 58.318 L: 50.597	-	-
Sumsel	62.102	74.287 P: 37.299 L: 36.988	46.881	56.047 P: 27.411 L: 28.636	61.771	74.410 P: 34.831 L: 39.579	353	353 P: 247 L: 105
Kalsel	29.179	34.668 P: 15.978 L: 18.690	20.607	24.720 P: 11.177 L: 13.543	21.697	25.771 P: 10.987 L: 14.784	-	-
Sumbar	41.983	50.990 P: 25.184 L: 25.806	35.243	42.857 P: 21.655 L: 21.202	59.755	76.098 P: 33.964 L: 42.134	151	151 P: 151
Papua	19.348	24.920 P: 14.081 L: 10.839	13.102	16.456 P: 9.303 L: 7.153	13.298	20.009 P: 9.134 L: 10.876	118	118 P: 110 L: 9
NTB	83.611	88.660 P: 44.912 L: 43.748	72.005	75.486 P: 38.698, L: 36.789	29.478	32.395 P: 16.950 L: 15.445	1.032	1.032 L: 1.032
Bali	14.746	18.128 P: 8.856 L: 9.272	10.104	12.139 P: 5.469 L: 6.670	27.887	34.017 P: 14.174 L: 19.844	-	-
Kaltim	20.831	25.058 P: 11.221 L: 13.837	14.631	16.539 P: 7.621 L: 8.917	24.338	30.604 P: 14.469 L: 16.136	-	-
Kalteng	12.693	14.133 P: 6.786 L: 7.347	9.203	10.425 P: 4.696 L: 5.729	14.277	16.319 P: 7.688 L: 8.631	-	-
Sumut	121.976	144.382 P: 75.392 L: 68.990	96.840	114.763 P: 59.268 L: 55.494	120.456	150.065 P: 73.748 L: 76.316	-	-
Total 15 Wilayah	1.586.525	1.940.313 P: 953.395 L: 986.917	1.194.924	1.468.783 P: 721.684 L: 747.098	1.819.205	2.081.668 P: 1.015.191 L: 1.066.479	2.808	2.808 P: 1.662 L: 1.146
Indonesia	2.197.597	2.515.608 P: 1.234.956 L: 1.280.652	1.657.188	1.898.647 P: 937.918 L: 960.727	2.350.620	2.723.906 P: 1.329.741 L: 1.394.165	2.960	3.068 P: 1.663 L: 1.403

Estimasi dalam Tabel 3 juga tersedia untuk anak-anak kelompok umur di bawah-18 tahun dan di bawah-1 tahun (lihat lampiran).

I - 03

ANAK-ANAK, LANSIA, DAN DIFABEL TANPA IDENTITAS HUKUM



Identitas hukum di Indonesia diwakili oleh dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berbagai akta pencatatan sipil berdasarkan peristiwa penting mulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa nomor unik yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan (adminduk) segera setelah seseorang dicatat keberadaannya sejak lahir.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan berkaitan dengan akses individu pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, serta layanan publik lainnya.

Kepemilikan dokumen juga mengindikasikan apakah seseorang tercatat di dalam data kependudukan yang secara tidak langsung lebih menjamin akses mereka pada berbagai program pemerintah (Duff, Kusumaningrum, & Stark, 2016; Jackson, Duff, Kusumaningrum, & Stark, 2014; Kusumaningrum, Bennouna, Siagian, & Agastya, 2016; Sumner & Kusumaningrum, 2014).

Oleh karenanya, ketiadaan NIK dan akta kelahiran dapat menjadi penanda kerentanan anak-anak, lansia, dan difabel, terutama berkaitan dengan kemungkinan mereka terjangkau oleh berbagai program bantuan yang sedang dirancang pemerintah. Estimasi mereka yang rentan tersebut dapat dilihat di Tabel 4.

Tabel 4.
Estimasi Rumah Tangga dengan Anak, Lansia, dan Difabel Tanpa Identitas Hukum (Susenas 2018)⁵

	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT dengan anak di bawah 1 tahun tanpa akta kelahiran	Jumlah anak di bawah 1 tahun di RT kolom 1 P: 17.426 L: 27.638	Jumlah RT dengan anak di bawah 5 tahun tanpa akta kelahiran	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 3 P: 38.233 L: 45.580	Jumlah RT dengan lansia tanpa NIK	Jumlah lansia di RT kolom 5 P: 9.335 L: 4.665	Jumlah RT dengan difabel tanpa NIK	Jumlah difabel di RT kolom 7 P: 16.170 L: 12.890
DKI Jakarta	45.065	45.065 P: 17.426 L: 27.638	78.409	83.814 P: 38.233 L: 45.580	13.708	13.999 P: 9.335 L: 4.665	26.638	29.060 P: 16.170 L: 12.890
Jabar	419.444	426.869 P: 205.326 L: 221.544	1.110.412	1.199.891 P: 578.907 L: 620.984	240.024	276.984 P: 186.006 L: 90.977	257.474	296.406 P: 179.993 L: 116.413
Jatim	255.029	255.186 P: 126.134 L: 129.052	628.872	660.975 P: 327.955 L: 333.020	183.750	191.113 P: 135.157 L: 55.957	167.975	179.323 P: 119.547 L: 59.776
Jateng	152.969	153.838 P: 78.723 L: 75.116	311.837	327.087 P: 162.569 L: 164.517	140.291	151.723 P: 107.612 L: 44.111	132.473	140.696 P: 94.578 L: 46.118
Sulsel	88.969	90.900 P: 45.499 L: 45.402	208.444	232.937 P: 118.927 L: 114.011	28.280	31.177 P: 22.931 L: 8.246	40.072	44.678 P: 27.664 L: 17.014
Banten	128.287	131.766 P: 68.205 L: 63.561	365.528	403.875 P: 197.454 L: 206.421	63.944	66.148 P: 46.805 L: 19.343	87.047	99.195 P: 59.785 L: 39.410
Sumsel	69.635	70.869 P: 34.265, L: 36.603	162.469	174.641 P: 76.820 L: 97.821	49.171	53.886 P: 32.775 L: 21.111	56.506	67.331 P: 39.673 L: 27.658
Kalsel	38.899	39.199 P: 20.345 L: 18.854	81.409	88.548 P: 44.664 L: 43.884	2.870	3.044 P: 2.520 L: 524	6.331	6.931 P: 4.801 L: 2.129
Sumbar	56.216	56.440 P: 26.949 L: 29.490	130.997	147.037 P: 70.237 L: 76.800	32.358	35.679 P: 21.910 L: 13.769	36.892	40.495 P: 24.031 L: 16.464
Papua	40.124	40.903 P: 20.587 L: 20.316	179.280	226.484 P: 111.786 L: 114.699	28.983	24.567 P: 10.954 L: 13.613	67.452	92.779 P: 45.406 L: 47.372
NTB	67.150	68.356 P: 30.455 L: 37.901	186.536	198.522 P: 96.125 L: 102.398	17.858	18.569 P: 11.363 L: 7.206	19.664	20.134 P: 11.891 L: 8.243

⁵ Berdasarkan pertanyaan "Apakah (nama) mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)?" atau "Apakah (nama) memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil?" pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT dengan anak di bawah 1 tahun tanpa akta kelahiran	Jumlah anak di bawah 1 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT dengan anak di bawah 5 tahun tanpa akta kelahiran	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 3	Jumlah RT dengan lansia tanpa NIK	Jumlah lansia di RT kolom 5	Jumlah RT dengan difabel tanpa NIK	Jumlah difabel di RT kolom 7
Bali	33.535	33.772 P: 19.404 L: 14.368	67.177	73.368 P: 38.730 L: 34.638	8.328	9.024 P: 6.039 L: 2.985	9.780	10.853 P: 6.008 L: 4.845
Kaltim	23.579	23.580 P: 10.679 L: 12.901	51.773	57.203 P: 29.003 L: 28.199	5.870	5.508 P: 1.638 L: 3.870	8.690	9.001 P: 3.074 L: 5.927
Kalteng	25.335	25.335 P: 11.992 L: 13.343	68.825	75.278 P: 35.432 L: 39.846	9.539	9.402 P: 5.751 L: 3.651	16.415	18.006 P: 8.473 L: 9.533
Sumut	202.328	206.300 P: 98.784 L: 107.517	551.590	678.086 P: 344.953 L: 333.133	90.658	95.152 P: 58.586 L: 36.565	110.528	127.231 P: 74.724 L: 52.507
Total 15 Wilayah	1.646.564	1.668.378 P: 814.772 L: 853.607	4.021.089	4.627.746 P: 2.271.796 L: 2.355.950	915.632	985.975 P: 659.381 L: 326.594	933.409	1.182.119 P: 715.818 L: 466.300
Indonesia	2.285.322	2.315.278 P: 1.135.657 L: 1.179.622	5.868.380	6.577.877 P: 3.215.913 L: 3.361.964	1.196.930	1.283.754 P: 856.141 L: 427.613	1.475.670	1.674.216 P: 996.443 L: 677.770

Selebihnya, estimasi dalam Tabel 4 juga tersedia untuk anak-anak kelompok umur di bawah-18 tahun, dan pemilahan difabel berdasarkan kelompok anak, dewasa, dan lansia (lihat lampiran).

I - 04

ANAK-ANAK, LANSIA, DAN DIFABEL DALAM RUMAH TANGGA TANPA AIR BERSIH, LISTRIK, DAN SANITASI YANG LAYAK



Kerentanan pada anak-anak yang tunawisma atau hidup di permukiman padat menjadi bertingkat akibat sulitnya akses pada sarana cuci tangan, sanitasi, termasuk sabun, air, serta disinfektan (Rosenthal, Ucci, Heys, Hayward, & Lakhanpaul, 2020). Di Indonesia, masih terdapat individu yang di atas kertas tinggal di sebuah hunian tetapi tidak memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang baik.

Mereka dapat menjadi rentan dalam pandemi COVID-19, terutama anak-anak, lansia, dan difabel. Ketiadaan akses pada listrik sebagai

infrastruktur dasar pun dapat menandakan kerentanan, karena di beberapa tempat dapat menunjukkan minimnya akses warga setempat pada fasilitas kesehatan yang berfungsi memadai (Chen, Chindarkar, & Xiao, 2019).

Tabel 5, 6, dan 7 di bawah ini menunjukkan estimasi anak-anak, lansia, dan difabel yang hidup di dalam rumah tangga tanpa air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak.

Tabel 5.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Air Bersih yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)⁶

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT tanpa air bersih dengan anak di bawah 18 tahun	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT tanpa air bersih dengan lansia	Jumlah lansia di RT kolom 3	Jumlah RT tanpa air bersih dengan difabel	Jumlah difabel di RT kolom 5
DKI Jakarta	1.423.076	2.466.622 P: 1.207.282 L: 1.259.339	462.179	592.455 P: 306.034 L: 286.422	819.336	1.080.083 P: 584.454 L: 495.629
Jabar	6.609.017	11.119.959 P: 5.436.961, L: 5.682.998	2.163.924	2.765.135 P: 1.413.490 L: 1.351.644	2.954.040	3.671.604 P: 1.982.546 L: 1.689.057
Jatim	3.970.852	6.131.893 P: 2.979.048 L: 3.152.845	1.957.762	2.497.482 P: 1.337.488 L: 1.159.994	1.991.698	2.405.978 P: 1.331.089 L: 1.074.889
Jateng	2.900.322	4.690.175 P: 2.229.296 L: 2.460.879	1.443.174	1.850.827 P: 995.818 L: 855.009	1.568.783	1.893.445 P: 1.038.789 L: 854.656
Sulsel	818.438	1.655.388 P: 803.175 L: 852.213	312.977	401.262 P: 223.080 L: 178.182	497.249	640.946 P: 358.607 L: 282.339
Banten	1.828.287	3.251.696 P: 1.595.078 L: 1.656.618	453.048	548.700 P: 275.415 L: 273.285	780.005	1.019.112 P: 526.848 L: 492.264
Sumsel	789.491	1.435.687 P: 707.477 L: 728.210	241.432	312.355 P: 159.130 L: 153.225	366.245	475.018 P: 251.296 L: 223.721
Kalsel	479.898	816.894 P: 401.995 L: 414.899	130.504	158.341 P: 82.839 L: 75.502	196.811	239.514 P: 123.914 L: 115.600
Sumbar	624.323	1.294.283 P: 642.191 L: 652.091	230.125	295.187 P: 158.608 L: 136.580	396.833	520.201 P: 290.753 L: 229.449
Papua	366.767	756.787 P: 362.620 L: 394.167	53.535	65.581 P: 26.828 L: 38.753	101.545	141.692 P: 68.549 L: 73.142
NTB	521.743	871.029 P: 427.108 L: 443.921	150.568	191.861 P: 103.418 L: 88.443	235.060	283.774 P: 155.714 L: 128.060

⁶ Berdasarkan pertanyaan "Apa sumber air utama yang digunakan RT untuk minum?" & "Berapa jarak sumber air utama ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat?" pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018.

Bali	356.055	609.822 P: 300.298 L: 309.524	125.054	172.457 P: 91.252 L: 81.206	141.159	174.253 P: 88.056 L: 86.196
Kaltim	502.057	900.405 P: 442.819 L: 457.585	117.357	143.625 P: 64.257 L: 79.368	222.581	284.009 P: 137.194 L: 146.814
Kalteng	354.314	618.526 P: 303.076 L: 315.450	75.421	93.501 P: 45.279 L: 48.222	164.743	217.376 P: 106.795 L: 110.581
Sumut	1.570.439	3.376.958 P: 1.649.597 L: 1.727.360	472.908	597.504 P: 319.176 L: 278.327	733.478	950.348 P: 517.026 L: 433.322
Total 15 Wilayah	23.115.079	39.996.124 P: 19.488.020 L: 20.508.101	8.389.968	10.686.273 P: 5.602.113 L: 5.084.160	11.169.566	13.997.353 P: 7.561.631 L: 6.435.721
Indonesia	29.403.183	51.944.161 P: 25.339.910 L: 26.604.248	10.162.235	12.927.315 P: 6.738.133 L: 6.189.182	14.195.300	17.928.001 P: 9.609.251 L: 8.318.749

Tabel 6.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Listrik yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)⁷

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT tanpa listrik dengan anak di bawah 18 tahun	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT tanpa listrik dengan lansia	Jumlah lansia di RT kolom 3	Jumlah RT tanpa listrik dengan difabel	Jumlah difabel di RT kolom 5
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jabar	2.694	3.164 P: 470 L: 2.694	3.176	3.435 P: 2.224 L: 1.211	5.753	6.746 P: 3.651 L: 3.095
Jatim	5.325	6.686 P: 2.263 L: 4.423	11.421	12.599 P: 6.258 L: 6.341	12.062	13.156 P: 6.698 L: 6.457
Jateng	1.280	3.664 P: 1.349 L: 2.315	4.748	5.631 P: 4.002 L: 1.629	4.496	4.496 P: 3.054 L: 1.443

⁷ Berdasarkan pertanyaan "Apa sumber utama penerangan rumah tangga ini?" pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018.

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT tanpa listrik dengan anak di bawah 18 tahun	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT tanpa listrik dengan lansia	Jumlah lansia di RT kolom 3	Jumlah RT tanpa listrik dengan difabel	Jumlah difabel di RT kolom 5
Sulsel	12.576	27.660 P: 12.622 L: 15.038	9.489	12.449 P: 6.703 L: 5.746	14.064	18.045 P: 8.982 L: 9.063
Banten	4.918	13.857 P: 6.056 L: 7.802	1.213	1.213 P: 1.213	5.034	7.895 P: 4.347 L: 3.548
Sumsel	15.718	30.401 P: 14.797 L: 15.604	7.556	8.937 P: 4.297 L: 4.640	11.867	14.524 P: 7.637 L: 6.887
Kalsel	2.799	5.839 P: 2.262 L: 3.577	1.616	1.881 P: 947 L: 933	2.853	3.354 P: 1.606 L: 1.749
Sumbar	11.681	24.984 P: 12.086 L: 12.898	8.237	9.558 P: 3.774 L: 5.785	11.306	13.250 P: 6.945 L: 6.305
Papua	200.649	422.208 P: 191.558 L: 230.650	18.900	22.727 P: 7.755 L: 14.972	43.867	61.268 P: 27.243 L: 34.025
NTB	2.700	4.988 P: 2.474 L: 2.514	1.556	1.716 P: 1.070 L: 645	2.332	2.332 P: 1.755 L: 578
Bali	296	296 L: 296	980	1.227 P: 860 L: 367	440	554 P: 202 L: 352
Kaltim	2.499	3.649 P: 1.553 L: 2.095	238	238 L: 238	932	989 P: 622 L: 367
Kalteng	14.297	27.129 P: 12.715 L: 14.414	4.072	4.835 P: 1.643 L: 3.191	10.042	12.893 P: 7.153 L: 5.740
Sumut	60.691	167.515 P: 84.503 L: 83.012	17.937	22.563 P: 11.789 L: 10.774	27.676	35.606 P: 19.410 L: 16.195
Total 15 Wilayah	338.123	767.024 P: 344.709 L: 397.333	91.139	109.007 P: 52.535 L: 56.473	152.724	195.108 P: 99.306 L: 95.803
Indonesia	714.043	1.575.402 P: 750.686 L: 824.71	215.033	261.807 P: 127.597 L: 134.210	384.669	497.578 P: 251.862 L: 245.715

Tabel 7.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel (Susenas 2018)^a

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT tanpa sanitasi layak dengan anak di bawah 18 tahun	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT tanpa sanitasi layak dengan lansia	Jumlah lansia di RT kolom 3	Jumlah RT tanpa sanitasi layak dengan difabel	Jumlah difabel di RT kolom 5
DKI Jakarta	156.289	273.926 P: 147.673 L: 126.253	35.581	39.334 P: 23.581 L: 15.752	105.881	137.767 P: 74.411 L: 63.356
Jabar	3.171.101	5.438.947 P: 2.644.361 L: 2.794.586	1.288.183	1.660.829 P: 871.888 L: 788.940	1.727.216	2.152.212 P: 1.184.865 L: 967.346
Jatim	2.106.698	3.174.489 P: 1.549.509 L: 1.624.980	1.239.121	1.572.270 P: 854.365 L: 717.904	1.197.682	1.431.308 P: 783.400 L: 647.907
Jateng	1.627.598	2.623.699 P: 1.273.418 L: 1.350.281	924.565	1.194.667 P: 631.191 L: 563.475	941.939	1.146.416 P: 619.369 L: 527.047
Sulsel	300.047	597.597 P: 289.156 L: 308.441	116.890	146.896 P: 82.320 L: 64.576	196.827	250.817 P: 139.269 L: 111.548
Banten	681.488	1.277.524 P: 609.900 L: 667.624	234.572	282.141 P: 147.702 L: 134.439	361.421	463.280 P: 245.839 L: 217.441
Sumsel	491.813	880.858 P: 430.192 L: 450.666	151.885	194.788 P: 98.854 L: 98.854	241.953	312.869 P: 158.806 L: 154.063
Kalsel	304.044	533.739 P: 262.074 L: 271.664	94.085	111.523 P: 58.220 L: 53.303	146.830	179.717 P: 96.436 L: 83.280
Sumbar	408.014	851.428 P: 408.075 L: 443.353	169.636	214.243 P: 114.970 L: 99.272	284.295	369.185 P: 204.366 L: 164.820
Papua	378.692	803.526 P: 375.941 L: 427.585	40.892	50.217 P: 20.788 L: 29.429	92.699	127.372 P: 61.587 L: 65.784
NTB	269.990	448.207 P: 222.600 L: 225.607	93.270	114.556 P: 67.092 L: 4.465	138.074	164.750 P: 97.113 L: 67.637

^a Berdasarkan pertanyaan "Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan siapa saja yang menggunakan?", "Apakah jenis kloset yang digunakan?", & "Dimanakah tempat pembuangan akhir tinja?" pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018.

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT tanpa sanitasi layak dengan anak di bawah 18 tahun	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT tanpa sanitasi layak dengan lansia	Jumlah lansia di RT kolom 3	Jumlah RT tanpa sanitasi layak dengan difabel	Jumlah difabel di RT kolom 5
Bali	57.306	102.454 P: 45.361 L: 57.093	31.468	44.171 P: 23.224 L: 20.947	32.873	41.865 P: 21.643 L: 20.222
Kaltim	132.851	240.497 P: 117.257 L: 123.240	39.623	50.194 P: 22.620 L: 27.573	77.616	102.247 P: 50.559 L: 51.689
Kalteng	236.825	409.077 P: 196.673 L: 212.403	61.840	76.947 P: 38.461 L: 38.486	120.029	158.378 P: 78.055 L: 80.323
Sumut	644.798	1.552.603 P: 755.986 L: 796.617	208.996	260.074 P: 141.020 L: 119.054	332.709	431.395 P: 230.361 L: 201.035
Total 15 Wilayah	10.967.554	19.208.571 P: 9.328.176 L: 9.880.395	4.730.607	6.012.8504 P: 3.196.297 L: 2.816.552	5.054.674	7.469.577 P: 4.046.080 L: 3.423.498
Indonesia	14.806.315	26.664.650 P: 12.949.748 L: 13.714.901	5.927.146	7.517.867 P: 3.958.282 L: 3.559.585	8.012.833	10.083.857 P: 5.398.099 L: 4.685.754

Selebihnya, estimasi dalam Tabel 5, 6, dan 7 juga tersedia untuk anak-anak kelompok umur di bawah-5 dan -1 tahun, lansia, dan difabel berdasarkan jenis kelamin untuk seluruh provinsi (lihat lampiran).

I - 05

ANAK-ANAK, LANSIA, DAN DIFABEL YANG BELUM MEMILIKI ASURANSI KESEHATAN



Kepemilikan asuransi kesehatan, termasuk asuransi sosial kesehatan pemerintah JKN, di beberapa tempat dapat berkaitan dengan pemanfaatan layanan kesehatan (Erlangga, Ali, & Bloor, 2019; Wang, Temsah, & Mallick, 2017). Meski tidak selalu berkaitan dengan perilaku mengakses layanan kesehatan, ketiadaan asuransi kesehatan bisa terkait dengan pengeluaran pribadi untuk menutup ongkos kesehatan (Aizawa, 2019).

Bagi kelompok rentan, mengeluarkan biaya untuk kesehatan dapat memberatkan dan membuat mereka urung mencari pengobatan. Dengan demikian, anak-anak, lansia, dan difabel tanpa asuransi kesehatan di Tabel 8 dapat menjadi penanda kerentanan, terutama dalam masa pandemi ini. Walaupun ada jaminan pemerintah menanggung biaya perawatan terkait COVID-19, Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah penyakit menular lainnya seperti DB, TBC, diare, malaria, dan difteri.

Tabel 8.
Estimasi Rumah Tangga yang di Dalamnya Terdapat Anak, Lansia, dan Difabel
Tanpa Asuransi Kesehatan (Susenas 2018)⁹

	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT dengan anak di bawah 18 tahun tanpa asuransi kesehatan	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT dengan anak di bawah 5 tahun tanpa asuransi kesehatan	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 3	Jumlah RT dengan lansia tanpa asuransi kesehatan	Jumlah lansia di RT kolom 5	Jumlah RT dengan difabel tanpa asuransi kesehatan	Jumlah difabel di RT kolom 7
DKI Jakarta	349.299	511.110 P: 239.566 L: 271.544	192.433	211.692 P: 102.279 L: 109.413	65.497	83.944 P: 45.245 L: 38.700	134.584	170.631 P: 91.350 L: 79.281
Jabar	4.670.040	7.026.519 P: 3.441.571 L: 3.584.949	2.387.264	2.582.740 P: 1.269.801 L: 1.312.939	1.183.533	1.463.302 P: 761.371 L: 701.931	1.626.826	1.951.538 P: 1.073.837 L: 877.701
Jatim	3.456.889	4.951.896 P: 2.456.500 L: 2.495.396	1.546.444	1.648.742 P: 811.062 L: 837.679	1.382.569	1.715.878 P: 927.367 L: 788.511	1.312.312	1.550.859 P: 864.184 L: 686.675
Jateng	2.882.274	4.138.572 P: 2.003.283 L: 2.135.289	1.448.806	1.552.485 P: 748.779 L: 803.706	1.027.106	1.313.507 P: 688.903 L: 624.603	1.057.283	1.234.034 P: 663.083 L: 570.951
Sulsel	678.537	1.068.729 P: 539.489 L: 529.240	402.295	466.353 P: 235.213 L: 231.140	167.384	206.409 P: 117.783 L: 88.625	266.897	321.013 P: 181.574 L: 139.439
Banten	1.199.208	1.938.632 P: 941.481 L: 997.151	654.709	722.873 P: 361.893 L: 360.980	247.012	285.404 P: 156.812 L: 128.592	415.001	507.194 P: 267.286 L: 239.908
Sumsel	287.534	473.889 P: 220.025 L: 253.864	158.080	173.603 P: 83.033 L: 90.570	72.060	87.903 P: 47.692 L: 40.211	102.867	124.710 P: 70.551 L: 54.159
Kalsel	336.579	521.886 P: 257.753 L: 264.134	156.741	171.075 P: 84.698 L: 86.377	73.624	88.184 P: 48.091 L: 40.092	123.309	149.433 P: 80.563 L: 68.870
Sumbar	418.796	725.392 P: 353.996 L: 371.396	248.803	288.516 P: 137.507 L: 151.009	113.644	143.311 P: 78.136 L: 65.176	180.646	228.855 P: 124.830 L: 104.025
Papua	141.538	244.608 P: 125.615 L: 118.993	83.825	101.622 P: 52.258 L: 49.364	10.589	12.628 P: 6.056 L: 6.572	31.415	43.739 P: 21.559 L: 22.180
NTB	651.399	916.432 P: 458.207 L: 458.226	356.283	378.756 P: 187.972 L: 190.785	130.243	162.631 P: 89.572 L: 73.059	212.903	253.955 P: 139.267 L: 114.688

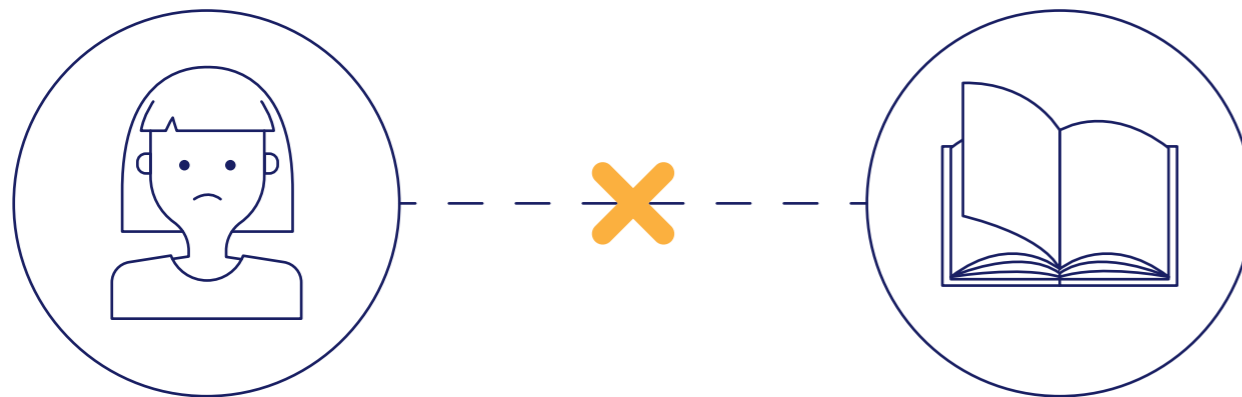
	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT dengan anak di bawah 18 tahun tanpa asuransi kesehatan	Jumlah anak di bawah 18 tahun di RT kolom 1	Jumlah RT dengan anak di bawah 5 tahun tanpa asuransi kesehatan	Jumlah anak di bawah 5 tahun di RT kolom 3	Jumlah RT dengan lansia tanpa asuransi kesehatan	Jumlah lansia di RT kolom 5	Jumlah RT dengan difabel tanpa asuransi kesehatan	Jumlah difabel di RT kolom 7
Bali	335.220	514.465 P: 254.753 L: 259.712	165.581	179.993 P: 93.259 L: 86.734	121.390	164.782 P: 90.939 L: 73.843	127.101	156.138 P: 78.400 L: 77.738
Kaltim	236.754	386.138 P: 193.009 L: 193.130	123.703	136.895 P: 69.355 L: 67.540	45.701	55.744 P: 26.743 L: 29.001	84.130	103.112 P: 50.163 L: 52.949
Kalteng	258.092	413.200 P: 199.239 L: 213.961	127.554	140.056 P: 65.286 L: 74.771	44.617	52.983 P: 25 L: 27.056	92.566	118.256 P: 58.156 L: 60.100
Sumut	1.492.060	2.864.664 P: 1.430.556 L: 1.434.108	852.121	1.052.889 P: 523.157 L: 529.732	358.797	446.102 P: 248.052 L: 198.050	521.847	652.523 P: 365.554 L: 286.969
Total 15 Wilayah	17.394.219	26.696.136 P: 13.115.041 L: 13.581.092	8.904.642	9.808.290 P: 4.825.552 L: 4.982.738	5.043.766	5.496.669 P: 3.358.690 L: 2.924.023	6.125.657	7.565.990 P: 4.130.357 L: 3.435.633
Indonesia	22.810.735	35.558.770 P: 17.477.811 L: 18.080.957	11.946.766	13.290.891 P: 6.536.892 L: 6.753.998	6.201.668	7.719.493 P: 4.100.626 L: 3.618.868	8.224.662	9.969.996 P: 5.366.331 L: 4.603.665

Selebihnya, estimasi dalam Tabel 8 juga tersedia untuk anak-anak kelompok umur di bawah-1 tahun, lansia, dan difabel berdasarkan jenis kelamin untuk seluruh provinsi (lihat lampiran).

⁹ Berdasarkan pertanyaan "Jaminan kesehatan apa saja yang dimiliki (nama)?" pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018. Status kepemilikan jaminan kesehatan berdasarkan kepemilikan BPJS/JKN/Jamkesda.

I - 06

ANAK-ANAK YANG TERPUTUS DARI KESEMPATAN BELAJAR



Ditutupnya sekolah secara tiba-tiba mengakibatkan kegiatan belajar berpindah ke rumah. Bagi anak-anak, guru, dan orang tua, situasi ini jauh dari ideal. Ketidaksiapan pengelolaan kelas dan kurikulum virtual menimbulkan banyak tekanan pada guru, murid, dan para pengasuh utama mereka di rumah. Sebelum masa pandemi, berhentinya kegiatan sekolah telah terbukti mengakibatkan beberapa dampak negatif pada anak seperti berkurangnya aktivitas fisik anak, waktu layar dengan gawai yang lebih lama, dan berubahnya pola tidur (Wang, Zhang, Zhao, Zhang, & Jiang, 2020).

Beberapa bukti awal juga menunjukkan bahwa isolasi, karantina, atau bentuk pembatasan gerak lainnya, berkurangnya ruang pribadi di rumah, dan berkurangnya interaksi dengan

teman-teman yang seusia menambah beban mental dan berdampak negatif pada anak-anak dan remaja (Jiao et al., 2020; Wang, Zhang, Zhao, Zhang, & Jiang, 2020). Beberapa studi mengenai dampak penutupan sekolah terhadap kesehatan mental anak di China menunjukkan bahwa anak-anak mengalami gejala depresi dan kegelisahan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Dampak negatif dari berubahnya rutinitas anak, termasuk penutupan sekolah, diperhatikan secara khusus pada anak dengan komplikasi kesehatan, anak dengan masalah kesehatan perilaku, dan anak yang berisiko terpapar kekerasan serta anak dalam pengasuhan pengganti (*foster care*) (Zimmermann & Curtis, 2020).

Anak-anak yang seharusnya belajar dari rumah menjadi lebih rentan bila tidak memiliki akses pada sarana dan prasarana yang layak (Van Lancker & Parolin, 2020). Di Indonesia, salah satu indikasinya adalah tidak adanya akses rumah tangga pada internet. Untuk itu, respons COVID-19 harus juga memerhatikan anak-anak usia sekolah yang tinggal di rumah

tangga-rumah tangga tanpa akses pada internet yang estimasinya dapat dilihat di Tabel 9. Di 15 wilayah terdampak saja, sudah terdapat sekitar 19,5 juta anak-anak berusia sekolah yang hidup dalam rumah tangga tanpa akses ke internet dari total 33 juta estimasi anak-anak berusia SD sampai SLTA yang berpotensi belajar dari rumah di sana.

Tabel 9.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Internet yang di Dalamnya Terdapat Anak Usia Sekolah (Susenas 2018)¹⁰

	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT tanpa internet dengan anak usia SD	Jumlah anak di RT kolom 1	Jumlah RT tanpa internet dengan anak usia SLTP	Jumlah anak di RT kolom 3	Jumlah RT tanpa internet dengan anak usia SLTA	Jumlah anak di RT kolom 5	Jumlah RT dengan anak usia sekolah yang berpotensi belajar dari rumah	Jumlah anak di RT kolom 7
DKI Jakarta	627.820	714.315 P: 348.242 L: 366.074	84.056	86.524 P: 30.487 L: 56.036	29.989	30.625 P: 14.828 L: 15.796	1.524.082	1.697.007 P: 821.705 L: 875.302
Jabar	3.706.856	4.155.615 P: 2.020.367 L: 2.135.248	750.767	785.426 P: 309.361 L: 476.066	275.661	286.026 P: 117.464 L: 168.562	8.059.399	8.795.010 P: 4.332.742 L: 4.462.268
Jatim	2.584.997	2.827.338 P: 1.374.312 L: 1.453.026	521.840	545.829 P: 228.303 L: 317.526	215.188	218.437 P: 102.139 L: 116.299	5.923.982	6.352.331 P: 3.119.181 L: 3.233.150
Jateng	2.431.378	2.686.403 P: 1.294.116 L: 1.392.287	467.120	486.225 P: 208.513 L: 277.712	160.762	163.333 P: 71.891 L: 91.443	5.698.209	5.896.153 P: 2.879.612 L: 3.016.541
Sulsel	678.255	843.748 P: 405.195 L: 438.553	197.775	210.143 P: 96.799 L: 113.344	68.285	70.935 P: 27.404 L: 43.530	1.471.613	1.713.843 P: 847.121 L: 866.722
Banten	977.873	1.118.018 P: 533.554 L: 584.464	213.425	218.144 P: 98.431 L: 119.713	73.206	73.241 P: 25.997 L: 47.243	2.132.480	2.330.124 P: 1.130.887 L: 1.199.237
Sumsel	690.031	811.048 P: 391.660 L: 419.388	205.905	215.067 P: 92.711 L: 122.356	71.674	74.302 P: 29.379 L: 44.923	1.456.066	1.631.656 P: 800.246 L: 831.410

¹⁰ Berdasarkan pertanyaan "Dalam 3 bulan terakhir apakah (nama) memiliki dan menggunakan telepon seluler (HP) nirkabel?" & "Dalam 3 bulan terakhir apakah (nama) memiliki dan menggunakan internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp)?" pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi	Jumlah RT tanpa internet dengan anak usia SD	Jumlah anak di RT kolom 1	Jumlah RT tanpa internet dengan anak usia SLTP	Jumlah anak di RT kolom 3	Jumlah RT tanpa internet dengan anak usia SLTA	Jumlah anak di RT kolom 5	Jumlah RT dengan anak usia sekolah yang berpotensi belajar dari rumah	Jumlah anak di RT kolom 7
Kalsel	318.980	356.755 P: 174.430 L: 182.324	74.752	78.831 P: 34.041 L: 44.790	28.003	28.467 P: 11.503 L: 16.964	713.051	775.552 P: 377.140 L: 398.412
Sumbar	439.259	556.551 P: 268.154 L: 288.397	131.288	142.370 P: 66.068 L: 76.302	44.559	45.853 P: 16.566 L: 29.287	937.615	1.109.497 P: 554.547 L: 554.950
Papua	302.608	413.831 P: 198.704 L: 215.127	141.269	151.943 P: 71.823 L: 80.120	74.506	76.739 P: 34.089 L: 42.650	491.198	591.138 P: 282.615 L: 308.523
NTB	482.134	542.759 P: 256.874 L: 285.885	153.503	162.281 P: 71.348 L: 90.933	59.574	61.459 P: 26.325 L: 35.133	933.302	1.108.105 P: 495.404 L: 522.701
Bali	266.299	1.608.406 P: 147.980 L: 147.980	58.953	60.667 P: 29.151 L: 31.516	16.465	16.789 P: 9.018 L: 7.772	653.392	752.739 P: 348.786 L: 376.953
Kaltim	271.936	310.129 P: 152.646 L: 157.484	61.245	63.803 P: 27.012 L: 36.791	19.815	20.332 P: 9.142 L: 11.190	612.167	678.386 P: 338.254 L: 340.132
Kalteng	215.219	238.545 P: 112.217 L: 126.328	63.815	67.632 P: 32.557 L: 35.07	21.446	21.804 P: 9.713 L: 12.091	453.304	493.357 P: 242.616 L: 250.741
Sumut	1.187.023	1.608.406 P: 788.678 L: 819.728	386.943	428.549 P: 195.494 L: 233.055	156.914	163.330 P: 75.010 L: 88.320	2.597.694	3.170.412 P: 1.566.447 L: 1.603.965
Total 15 Wilayah	15.180.668	17.494.111 P: 8.467.129 L: 9.026.982	3.587.408	3.703.434 P: 1.592.099 L: 2.111.335	1.316.047	1.251.672 P: 580.468 L: 771.204	33.407.518	36.978.310 P: 18.137.303 L: 18.841.007
Indonesia	20.130.660	23.496.260 P: 11.373.598 L: 12.122.664	5.133.129	5.459.994 P: 2.401.058 L: 3.058.936	1.955.344	2.015.065	43.674.923	50.417.475 P: 23.923.887 L: 24.817.429

I - 07

ANAK YANG TERDAMPAK COVID-19 SECARA LANGSUNG

Anak-anak, seperti halnya orang dewasa atau lansia, punya kemungkinan untuk tertular atau menularkan COVID-19. Dari data kasus yang terpilah berdasarkan definisi anak (di bawah 18 tahun), kita bisa mendapatkan banyak masukan berharga tentang rata-rata kesembuhan maupun kematian di kelompok anak.

Rekap yang dilakukan inisiatif warga bernama KawalCOVID19 per 11/6/2020 menunjukkan total kasus positif COVID-19 pada anak sejumlah 2.615, atau 7,8% dari keseluruhan yang positif. Sementara, persentase kesembuhan sebesar 29% dari seluruh pasien anak. Tentunya, data ini harus disikapi dengan hati-hati mengingat cakupan tes yang masih rendah dan lambat sampai sekarang. Beberapa informasi anekdotal dari kumpulan dokter-dokter anak pun masih menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan di antara pasien anak dan masih sangat terbatasnya pengetahuan kita tentang COVID-19 pada anak.

Keterbatasan data menyebabkan pengambil kebijakan sulit mendapat gambaran tentang anak yang terdampak COVID-19 secara langsung. Selain sakit atau diketahui positif (baik berstatus PDP maupun OPD), anak bisa juga terdampak bila mereka adalah: 1) kakak atau adik dari anak yang sakit atau meninggal, 2) anak yang ditinggalkan pengasuh yang meninggal akibat COVID-19, 3) anak yang ditinggalkan pengasuh yang diisolasi karena status PDP, atau 4) anak yang tinggal bersama individu atau diasuh oleh seseorang dengan status ODP. Apabila informasi ini dapat dikelola dengan baik dan terjaga keamanannya melalui kerja sama petugas kesehatan dengan pekerja sosial, maka pekerja sosial dapat menyusun rencana pendampingan dan bantuan yang tepat bagi anak-anak yang terdampak.

Tujuh kelompok di atas belum mencakup semua yang rentan. Dalam bab berikutnya, kajian ini akan membahas tentang kelompok-kelompok yang tersembunyi dalam pandemi COVID-19.

KELOMPOK- KELOMPOK KHUSUS YANG TERSEMBUNYI DALAM PANDEMI COVID-19

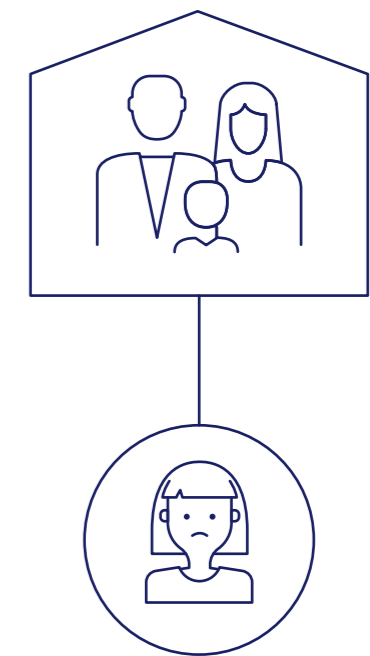
Selain kelompok yang rentan dan menjadi rentan akibat pandemi COVID-19 di bagian sebelumnya, terdapat sejumlah kelompok rentan lainnya yang sulit diperkirakan jumlah dan diketahui keberadaannya dalam peta statistik. Mereka adalah kelompok yang tersembunyi, bahkan sebelum pandemi, akibat minimnya sistem pencatatan dan pemantauan yang memadai bagi karakteristik mereka.

Secara keseluruhan, mereka menghadapi berbagai keterbatasan hidup dan pandemi COVID-19 bisa jadi melipatgandakan keterbatasan tersebut, baik mereka berada di dalam maupun di luar wilayah yang terdampak.

II - 01

ANAK-ANAK YANG BERADA DI LUAR LINGKUNGAN KELUARGA

Anak-anak di luar pengasuhan keluarga termasuk mereka yang diasuh atau tinggal di panti-panti, lembaga pengasuhan lainnya, tinggal di asrama, maupun anak-anak yang dipenjara atau ditahan karena berhadapan dengan hukum. Anak di luar pengasuhan keluarga diketahui menghadapi banyak keterbatasan pilihan kebersihan dan hidup sehat serta sumber-sumber daya lain yang bisa membantu mereka mengelola risiko fisik maupun mental selama masa pandemi (Goldman, van Ijzendoorn, Sonuga-Barke, & Lancet Institutional Care Reform Commission Group, 2020).



Anak di tempat penahanan dan penjara (LPAS, LPKA, rutan, dan lapas) dan yang dibebaskan sebagai bagian dari penanganan COVID-19

Terdapat total 1.660 anak yang ditahan atau ditempatkan di LPAS, LPKA, rutan dan lapas di seluruh Indonesia (Kumham, per 4/5/2020). Apabila dilihat di 15 wilayah terdampak COVID-19 terbanyak, terdapat sekitar 978 anak di lembaga-lembaga penahanan dan pemenjaraan yang ada di dalam wilayah administratif yang sama (per Mei 2020).

Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana dan tahanan, termasuk anak-anak. Apabila dilihat secara kasar dari pengurangan jumlah penghuni anak antara tanggal 30 Maret 2020 dan 4 Mei 2020, terdapat kira-kira 1.029 anak yang dibebaskan dalam rentang waktu tersebut di seluruh Indonesia.

Anak dalam institusi pengasuhan (panti) dan yang dikembalikan ke rumah sebagai bagian dari COVID-19

Berdasarkan data Kemsos, terdapat total 102.482 anak yang hidup di 3.575 panti-panti di seluruh Indonesia (Data Kementerian Sosial per 14/05/2020). Angka ini bisa jadi belum mencakup panti-panti yang tidak terdata di Kemsos. Apabila dilihat dari catatan Kemsos saja, di 15 wilayah terdampak COVID-19 terbanyak, terdapat sekitar 37.344 anak

di 2.580 lembaga kesejahteraan anak yang ada di dalam wilayah administratif yang sama. Sampai masukan kebijakan ini ditulis, belum terdapat data mengenai anak-anak yang masih memiliki keluarga yang dipulangkan atau kembali ke rumah dari panti akibat pandemi.

Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan anak terlantar	Jumlah anak di dalam panti	Jumlah anak laki-laki di dalam panti	Jumlah anak perempuan di dalam panti
Bali	62	1.685	803	882
Kaltim	53	1.684	952	952
Kalteng	29	857	528	329
Sumut	58	2.013	1.003	1.010
Total 15 Wilayah	2.580	72.997	35.873	37.334
Indonesia	3.575	102.482	50.509	51.973

Tabel 10.
Jumlah dan Sebaran Anak dalam Panti (Kemsos 2020)

Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan anak terlantar	Jumlah anak di dalam panti	Jumlah anak laki-laki di dalam panti	Jumlah anak perempuan di dalam panti
DKI Jakarta	69	1.246	570	676
Jabar	435	13.046	6.484	6.562
Jatim	709	18.835	8.930	9.905
Jateng	423	10.936	5.105	5.831
Sulsel	148	4.894	2.398	2.496
Banten	82	3.115	1.551	1.564
Sumsel	84	2.302	1.169	1.133
Kalsel	99	2.728	1.687	1.041
Sumbar	101	3.011	1.278	1.733
Papua	29	816	385	431
NTB	199	5.829	3.030	2.799

Anak di sekolah asrama dan pesantren dan yang dikembalikan ke rumah sebagai bagian dari penanganan COVID-19

Jumlah pesantren di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 26.967 dengan 1.091.591 santri mukim di 15 wilayah terdampak COVID-19, meski tidak terdapat keterangan mengenai usia mereka sampai dengan masukan kebijakan ini

dirampungkan (Statistik Data Pondok Pesantren, Kemenag 2019). Juga, tidak terdapat data mengenai anak-anak yang dipulangkan atau kembali ke rumah dari pesantren akibat pandemi.

Anak jalanan

Berdasarkan data di tahun 2018, diperkirakan 12.000 anak-anak hidup di jalanan di seluruh Indonesia (Kompas, 2019 mengolah data Kemsos). Apabila dilihat di 15 wilayah terdampak COVID-19 terbanyak, terdapat

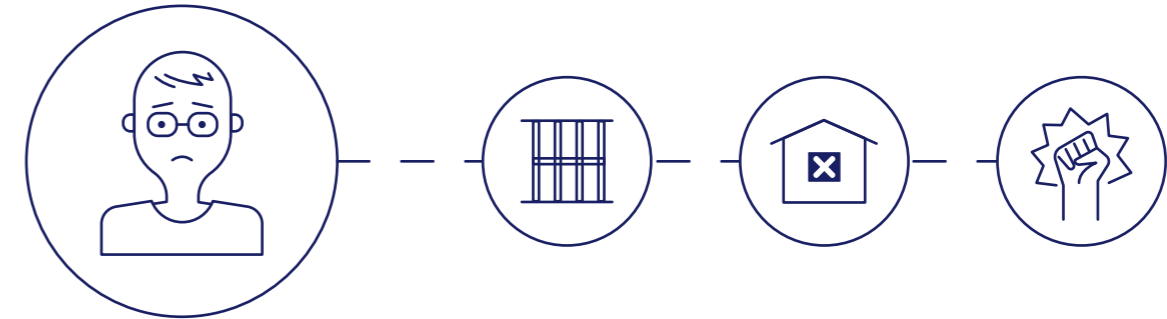
sekitar 14.307 anak jalanan di dalam wilayah administratif yang sama, kecuali Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua, di mana datanya tidak tersedia (dengan data 2017 dari sumber yang sama).

Tabel 11.
Jumlah dan Sebaran Anak Jalanan (Kompas 2018)¹¹

Provinsi	Jumlah anak jalanan
DKI Jakarta	2.750
Jabar	2.953
Jatim	2.701
Jateng	1.603
Sulsel	652
Banten	556
Sumsel	197
Kalsel	-
Sumbar	822
Papua	-
NTB	97
Bali	281
Kaltim	695
Kalteng	-
Sumut	1.000
Total 15 Wilayah	14.307
Indonesia <small>(terbatas 21 provinsi, karena untuk 13 provinsi tidak ada datanya)</small>	16.416

II - 02

ORANG DI DALAM LINGKUNGAN YANG BERISIKO



Anak yang tinggal dengan pengasuh yang sedang di tempat penahanan atau penjara (lapas/rutan)

Di Indonesia, anak diperbolehkan untuk diasuh dan tinggal di lembaga pemasyarakatan bersama ibunya yang berstatus narapidana (atau di fasilitas rumah tahanan). Ketentuan ini tertuang dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. PP juga menyebutkan bahwa anak bisa diasuh oleh ibunya di dalam tempat penahanan sampai usia dua tahun. Jika anak sudah berumur dua tahun, anak harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Per 16/4/2020, terdapat dua anak berusia di bawah-3 tahun di lapas perempuan Semarang, dan satu anak di lapas perempuan Tangerang. Keterangan ini didapatkan secara anekdotal dari relawan pengumpul bantuan secara manual dengan cara menghubungi masing-masing lembaga. Sampai dengan masukan kebijakan ini dibuat, kami belum berhasil mendapatkan data lengkap tentang anak-anak ini. Meski Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana dan tahanan, termasuk anak-anak, sampai saat ini tidak ada informasi tentang apakah anak-anak ini dengan ibunya dibebaskan sebagai bagian dari penanganan COVID-19.

¹¹ Data ini dikutip dari artikel KOMPAS edisi cetak, Anak Jalanan Masih Terabaikan (2019, 20 November). Terdapat perbedaan antara jumlah yang disebutkan di dalam narasi artikel dengan jumlah yang dipaparkan dalam grafik per wilayah.

Anak dan orang dewasa yang tidak memiliki hunian (tunawisma)

Anak-anak, terutama di bawah-5 tahun, yang hidup dalam ketunawismaan menghadapi risiko tinggi terjangkit wabah karena biasanya tinggal di lingkungan yang padat atau tidak higienis. Selain COVID-19, terdapat ancaman terhadap potensi tumbuh kembang mereka secara keseluruhan, mulai dari masalah kesehatan sampai perkembangan kognisinya

(Rosenthal, Ucci, Heys, Hayward, & Lakhanpaul, 2020). Pada Agustus 2019, Kemsos memperkirakan 77.500 gelandangan pengemis yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia (Kompas, 2019). Sementara data Rehsos (Kemsos, 2012) mencatat sekitar 194.000 gelandangan, pemulung, dan pengemis di seluruh Indonesia.

Anak yang selama ini mendapat pendampingan sosial

Dari data Kemsos, terdapat 54.393 anak yang didampingi pekerja sosial (peksos) yang hidup di luar panti di seluruh Indonesia, dan 72% nya, atau 39.259 anak, hidup di 15 wilayah terdampak COVID-19. Meski tidak dapat diidentifikasi sebab pendampingannya, tetapi didampingi dapat menandakan bahwa

anak-anak ini memiliki kerentanan. Situasi pandemi ini menyebabkan mereka berisiko kehilangan pendampingan rutin yang biasanya disediakan oleh peksos.

Tabel 12.
Jumlah dan Sebaran Anak yang Didampingi Peksos di Luar Panti (Kemsos 2020)

Provinsi	Jumlah anak di luar panti yang didampingi Peksos	Jumlah anak laki-laki di luar panti yang didampingi Peksos	Jumlah anak perempuan di luar panti yang didampingi Peksos
DKI Jakarta	2.324	1.198	1.126
Jabar	9.243	4.629	4.614
Jatim	10.318	5.257	5.061
Jateng	4.414	2.080	2.334
Sulsel	1.730	850	880
Banten	1.771	904	867
Sumsel	324	166	158
Kalsel	840	379	461
Sumbar	433	157	276
Papua	312	163	149
NTB	4.968	2.587	2.381
Bali	512	270	242
Kaltim	281	136	145
Kalteng	299	149	150
Sumut	1.490	720	770
Total 15 Wilayah	39.259	19.645	19.614
Indonesia	54.393	27.060	27.333

Anak dan orang dewasa yang tinggal di rumah tangga dengan pelaku kekerasan atau yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga

Sumber-sumber seperti Bradbury-Jones RN, C. (2020), Usher, et.al. (2020), Campbell, A.M. (2020) dan Plan International (2020) mencatat meningkatnya jumlah laporan kekerasan di masa pandemi. Sejak 2 Maret hingga 25 April 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat terjadinya 643 kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Indonesia (Media Indonesia, 2020). Di Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK menerima 97 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dari 16 Maret sampai 19 April 2020 (CNN Indonesia, 2020). Dua jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (33 kasus) dan kekerasan gender berbasis daring (30 kasus). Sebelum COVID-19, survei prevalensi kekerasan terhadap perempuan memperkirakan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh

pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka, dengan sekitar 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (BPS, 2016). Dalam masa pandemi ini, risiko bagi mereka kemungkinan meningkat karena pembatasan gerak dan isolasi.

Dari data pelaporan kasus tahun 2020 yang dimiliki KPPPA di 15 wilayah terdampak COVID-19, tercatat 362 kasus per April 2020. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2019, tercatat 10.866 kasus kekerasan di 15 wilayah terdampak COVID-19. Belum dapat ditarik kesimpulan dari data per April ini apakah akan terjadi peningkatan pelaporan kekerasan di 15 wilayah tersebut pada akhir 2020. Jika terjadi penurunan, hal ini bisa saja disebabkan oleh berkurangnya akses terhadap layanan dan bukan karena jumlah tindak kekerasan yang berkurang.

Tabel 13.

Jumlah Kasus Kekerasan yang Dilaporkan dan Tercatat (KPPPA 2020)

Provinsi	Jumlah kasus tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus fisik tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus psikis tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus seksual tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus fisik tercatat per April 2020	Jumlah kasus psikis tercatat per April 2020	Jumlah kasus seksual tercatat per April 2020
DKI Jakarta	911	493	490	264	8	5	2
Jabar	676	243	198	292	7	5	3

Provinsi	Jumlah kasus tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus fisik tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus psikis tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus seksual tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus fisik tercatat per April 2020	Jumlah kasus psikis tercatat per April 2020	Jumlah kasus seksual tercatat per April 2020
Jatim	1.944	780	574	724	20	14	11
Jateng	2.042	925	677	802	48	28	15
Sulsel	1.811	1.116	363	474	52	12	3
Banten	399	188	171	175	6	1	2
Sumsel	344	188	81	130	5	4	3
Kalsel	212	58	73	100	5	4	2
Sumbar	546	265	134	261	3	0	3
Papua	224	118	101	72	4	1	0
NTB	504	286	54	134	2	1	0
Bali	322	179	146	58	8	4	0
Kaltim	617	275	124	194	13	5	10
Kalteng	152	62	47	65	0	0	0
Sumut	849	337	172	410	25	11	4
Jumlah 15 Wilayah	10.866	5.093	3.335	3.920	206	95	58
Indonesia	17.606	8.095	5.061	6.501	336	161	78

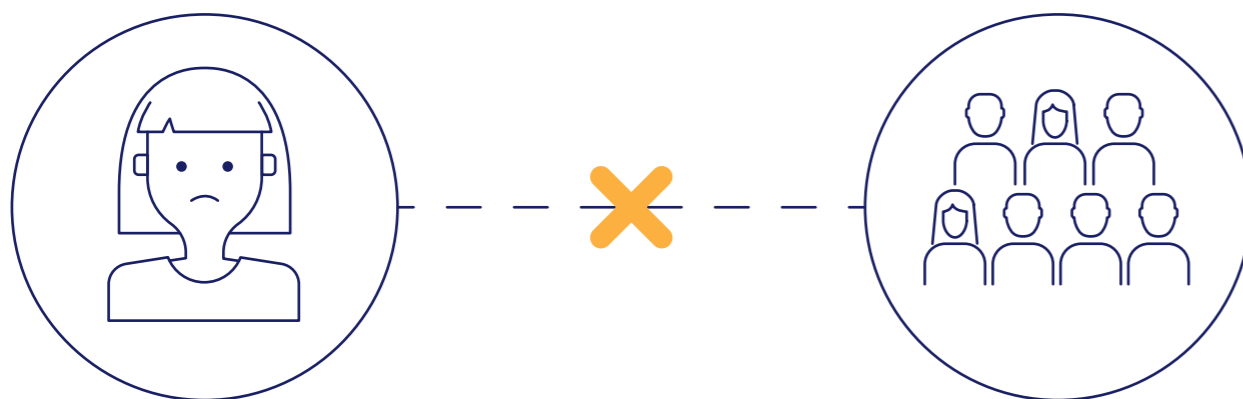
Pencari suaka dalam transit dan pengungsi

Diperkirakan 13.550 pencari suaka dan pengungsi hidup di seluruh Indonesia. Sumber data UNHCR menyebutkan bahwa populasi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sebagian besar (80%) tersebar di Jabodetabek (7.153 individu), Medan (1.897 individu), dan Makassar (1.743 individu). Di antara para pencari suaka dan pengungsi tersebut terdapat

anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, orang sakit, dan orang dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Sumber data yang sama menguraikan bahwa dari total pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, terdapat sekitar 3.761 berusia anak-anak dan 2% lansia (yang apabila dihitung sederhana berjumlah sekitar 271 lansia).

II - 03

ANAK DAN ORANG DEWASA YANG MENGALAMI PENYISIHAN SOSIAL LAINNYA



Warga dengan masalah domisili

Basis pendataan yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan bantuan adalah keluarga. Sementara kartu keluarga (KK) tidak dapat dikeluarkan tanpa domisili yang jelas. Kasus penduduk dengan masalah domisili masih ditemukan pada masyarakat yang tidak tinggal di wilayah administratif tertentu seperti di hutan, di tanah sengketa/pemerintah, di laut, atau mereka yang tinggal berpindah-pindah. Berdasarkan survei kehutanan pada tahun 2014, jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan saja sudah berjumlah 32.447.851 di seluruh Indonesia (BPS, 2014).

Masalah domisili juga bisa dialami oleh berpindah tempat atau pendatang yang meski memiliki dokumen kependudukan lengkap, tidak terdaftar sebagai warga setempat. Mereka berisiko terlewatkan dari program bantuan yang dirancang hanya bagi warga setempat. Dalam situasi pandemi, mereka menjadi rentan karena tidak bisa kembali ke tempat asal sesuai dokumen akibat pembatasan sosial, tetapi juga sulit bertahan hidup tanpa bantuan di tempat perantauan.

Warga yang status identitasnya belum diakui atau terabaikan negara

Anak hasil perkawinan campur antara WNI dengan pencari suaka masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan identitasnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan SUAKA pada 2016, masih menemukan kasus di mana perkawinan campur antara WNI dengan pencari suaka tidak dapat dicatatkan pernikahannya. Jika keluarga tersebut ingin memproses KK, maka status

perkawinannya harus dibuat "cerai". Anak dari hasil perkawinan campur juga tidak bisa mendapatkan akta kelahiran karena status kewarganegaraan orang tua sebagai pencari suaka (SUAKA, 2016). Mereka berisiko jika dalam situasi pandemi, pendataan sasaran bantuan mensyaratkan dokumen kependudukan.

Warga yang mendapatkan stigma di masyarakat

Selain karena domisili, ketiadaan dokumen atau kesulitan memperoleh dokumen juga bisa dialami warga karena stigma atau diskriminasi dari masyarakat. Diskriminasi ini juga dialami oleh mereka yang seringkali terpaksa memisahkan diri atau dipisahkan dari keluarga (Boellstorff, 2004). Kondisi tersebut menjadi hambatan untuk mengurus KK baru karena putusannya hubungan dengan keluarga lama mereka. Kondisi tersebut menyebabkan mereka

akan kesulitan terdata di dalam daftar calon penerima bantuan yang berbasis keluarga. Penyisihan seperti ini dapat dialami oleh kelompok orang dengan gangguan jiwa, kelompok agama minoritas, anak berkebutuhan khusus yang disembunyikan orang tuanya karena dianggap membuat malu keluarga, dan kelompok terstigma lainnya. Belum lagi kemungkinan perlakuan diskriminatif yang mungkin mereka terima dalam penyaluran bantuan.

MENDISKUSIKAN DEFINISI DAN SUMBER KERENTANAN DALAM PANDEMI COVID-19

Berdasarkan kerangka konseptual tentang kerentanan, menimbang data-data yang ada, serta melihat beberapa pemikiran teoritis tentang eksklusi atau penyisihan sosial dan

ketidakadilan (PUSKAPA, 2019; Kidd, 2017; Popay, 2010; Adger, 2006), masukan kebijakan ini merumuskan definisi kerentanan sebagai berikut:

“ Kerentanan adalah kondisi yang secara tidak proporsional dialami individu tertentu akibat ketiadaan akses karena kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, ketimpangan kualitas layanan publik, dan penyisihan berbasis usia, disabilitas, dan identitas sosial. ”

Dinamika kerentanan dapat terkait dengan pergeseran norma sosial atau tatanan masyarakat secara perlahan-lahan (*shifts*) dan guncangan tiba-tiba (*shocks*). Bencana pandemi termasuk dalam *shock* yang dapat ikut mempengaruhi kondisi kerentanan yang sudah ada sebelumnya karena COVID-19 berpotensi mengancam kesehatan semua individu. Kerentanan akibat guncangan tiba-tiba dari luar, seperti pandemi, dapat dijelaskan melalui tiga aspek yang saling terkait, yaitu paparan (*exposure*), kepekaan (*sensitivity*), dan tidak adanya kemampuan adaptasi (*lack adaptive capacity*), yang ketiganya melekat pada individu bahkan sejak sebelum pandemi dan bergantung pada akses mereka terhadap dukungan dan fasilitas struktural (Adger 2006; Smit & Wandel 2006).

- Paparan menyangkut tingkat kemungkinan individu berinteraksi dengan ancaman/bahaya dari luar.
- Kepekaan menyangkut seberapa parah dampak yang akan dialami individu setelah terpapar oleh ancaman/bahaya.
- Kemampuan adaptasi menyangkut kapasitas individu untuk merespons atau mengelola paparan terhadap ancaman/bahaya serta dampaknya tanpa mengurangi kesejahteraannya secara signifikan.



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, masukan kebijakan ini melihat bahwa pandemi COVID-19 telah dan dapat terus secara tidak proporsional menimbulkan atau menguatkan kerentanan pada kelompok anak, lansia, dan difabel, serta kelompok-kelompok dengan kesulitan akses, yang miskin, yang tersembunyi, yang mengalami stigma di masyarakat, dan yang akibat identitasnya mengalami kesulitan hidup dan diskriminasi. Semua kelompok ini sudah dibahas di bagian sebelumnya dengan estimasi besaran dan sebarannya.

Kerentanan bersifat dinamis sehingga menyebabkan individu atau sebuah kelompok menyempit kesempatannya dalam kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan, dan secara sosial maupun politik. Dalam konteks pandemi COVID-19, masukan kebijakan ini mengidentifikasi sejumlah sumber kerentanan sebagai berikut:

1. Masalah kesehatan individu

- a. **Kesehatan fisik yang terhambat** langsung akibat COVID-19 maupun akibat kondisi kesehatan sebelumnya, keterbatasan layanan kesehatan dan terapi rutin, dan keterbatasan pilihan dalam menjaga jarak aman dan kebersihan diri, rumah, dan lingkungan.
- b. **Kesehatan mental yang terhambat** langsung akibat situasi pandemi COVID-19 maupun akibat kondisi kesehatan sebelumnya, keterbatasan layanan kesehatan mental dan terapi rutin, dan menurunnya kualitas kebutuhan dasar serta terputusnya berbagai layanan publik yang menimbulkan tekanan baru. Risiko ini semakin besar terutama bagi anak-anak yang harus berada di rumah dengan ruangan yang terbatas dan tanpa akses ke ruang terbuka dalam jangka waktu yang lama.

2. Berubah atau hilangnya lingkungan pengasuhan dan dukungan sosial

Bagi anak-anak, lansia, maupun difabel, perubahan lingkungan interaksi dan pengasuhan akibat pandemi, baik yang disebabkan oleh sakitnya pengasuh maupun terbatasnya ruang gerak di rumah, dapat

meningkatkan kerentanan mereka seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Bagi para pengasuh atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas orang lain, situasi pandemi mengubah tatanan dukungan sosial yang biasanya tersedia, seperti dukungan keluarga besar maupun penyedia layanan di lini depan.

3. Terbatasnya pilihan dan ruang aman untuk anak-anak dan orang dewasa

Arus informasi yang deras dan cepat tentang situasi pandemi dapat membuat orang cemas, baik anak-anak maupun dewasa. Orang tua dan orang dewasa lainnya tidak selalu menjadi sumber informasi yang jelas dan baik untuk anak dan remaja. Obrolan orang dewasa tentang COVID-19 terkadang terlalu teknis dan mereka lupa atau gagap dalam menanggapi aspek perasaan, baik perasaan anak-anak maupun mereka sendiri (Dalton, Rapa, & Stein, 2020). Kecemasan yang tidak teratasi dengan baik dapat berkembang menjadi berbagai masalah kesehatan mental yang serius. Sementara di sisi lain, ruang aman semakin terbatas, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu, kerentanan akan meningkat karena terbatasnya pilihan untuk menjaga jarak aman, untuk diam di rumah, dan untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

4. Meningkatnya risiko kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga

Selain risiko kekerasan meningkat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, respon layanan terhadap aduan pun menjadi berkurang akibat situasi pandemi. Beberapa rumah aman mungkin sudah tidak beroperasi lagi, meskipun data persisnya, termasuk jumlah pendamping yang tersedia, tidak bisa didapatkan. Demikian juga dengan layanan dari 33 unit P2TP2A dan 34 Dinas PPA yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia, meskipun karena layanan pemerintah, dapat diasumsikan beroperasi.

5. Menurunnya kualitas atau terbatasnya layanan publik dan dasar

a. **Terbatasnya layanan kesehatan dan pemenuhan gizi.** Keterbatasan kapasitas sektor kesehatan menangani pandemi sudah banyak dibahas. Di luar masalah keterbatasan akses pada fasilitas yang layak sebelum pandemi, pandemi menyebabkan semakin terbatasnya layanan tatap muka dengan dokter atau petugas kesehatan. Kunjungan atau ketersediaan layanan berbasis masyarakat seperti posyandu pun menjadi tidak ada. Dengan demikian, kemampuan identifikasi awal kebutuhan dan risiko kesehatan ibu dan anak menjadi sangat terbatas, bahkan hilang.

Imunisasi dasar yang dapat mencegah berbagai penyakit lain berpotensi terlambat, sementara estimasi cakupan anak usia 36-59 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap¹² secara nasional pun baru sekitar 21% sebelum pandemi (Susenas 2019). Sementara estimasi cakupan di DKI Jakarta tahun 2017 adalah 32%, Jabar 18%, Jatim 31%, Jateng 35%, Sulsel 19%, Banten 12%, Sumsel 11%, Sumbar 13%, NTB 20%, Bali 26%, Kaltim 25%, Kalteng 15%, Kalsel 24%, Papua 4%, dan Sumut 9%. Demikian halnya dengan berbagai kegiatan promosi kesehatan seperti laktasi dan diet seimbang, serta layanan kesehatan reproduksi komprehensif.

- b. **Terbatasnya layanan pendidikan.** Terputusnya kegiatan sekolah, berpindahnya pembelajaran ke rumah dan media daring, dan bervariasi sarana prasarana di rumah juga telah dibahas sebelumnya.
- c. **Terbatasnya layanan kesejahteraan.** Sebelum pandemi, di Indonesia baru terdapat 735 pekerja sosial profesional (yang terdaftar di Kementerian Sosial, per Januari 2020). Meski jumlah pekerja sosial di 10 wilayah terdampak sendiri sebanyak 305 (41% dari total), mereka menghadapi wilayah jangkauan yang luas.

Padahal, peran pekerja sosial sangat penting dalam memberikan dukungan bagi keluarga rentan, mulai dari menghubungkan mereka dengan layanan dasar yang tepat, membantu mengelola konflik dalam rumah tangga, sampai merujuk warga pada layanan khusus seperti penanganan kekerasan. Selain itu, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial seperti panti-panti pun mengalami banyak hambatan akibat pandemi yang meningkatkan kerentanan penghuninya. Layanan-layanan sosial dan kesehatan rutin yang menasar anak-anak yang tinggal di luar keluarga seperti anak jalanan, anak di dalam panti, dan anak yang berada dalam penahanan/pemenjaraan juga akan terganggu.

Sebagai catatan juga, berdasarkan data dari KPPPA (2020), Indonesia baru memiliki 135 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai layanan pendamping lain yang tersebar di kota dan kabupaten di 25 provinsi. Terdapat total 338 psikolog atau konselor yang bertugas di PUSPAGA. Tetapi, jika dilihat dari 15 provinsi terdampak, Papua belum memiliki PUSPAGA sama sekali.

Tabel 14.
Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga di 15 Wilayah Terdampak COVID-19 (KPPPA 2020)¹¹

Provinsi	Jumlah PUSPAGA
DKI Jakarta	2
Jabar	9
Jatim	11
Jateng	12
Sulsel	18
Banten	7
Sumsel	2
Kalsel	9
Sumbar	5
Papua	0
NTB	2
Bali	3
Kaltim	6
Kalteng	1
Sumut	10
Total 15 Wilayah	97
Indonesia	135

¹² Imunisasi lengkap adalah termasuk BCG, Polio 1,2,3,4, DPT1,2,3, HB saat lahir, 1,2,3, campak, dan MMR.

d. **Terbatasnya layanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.** Peristiwa penting mulai dari kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian tetap terjadi meski dalam situasi pandemi. Juga, kebutuhan warga untuk memperoleh, mengganti, atau memutakhirkan dokumen kependudukan lainnya seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan KK. Terhambatnya layanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dapat berakibat langsung pada status kepemilikan dokumen kependudukan warga, dan pada sistem karena terlambatnya pemutakhiran data kependudukan.

e. **Terbatasnya sumber penghidupan, bantuan sosial, dan jaring pengaman sosial.** Semua program yang saat ini dirancang atau telah dilaksanakan sebagai bagian dari respons COVID-19, terbatas dan oleh karenanya hanya dapat menjangkau sebagian penduduk. Berbagai hal yang telah dipaparkan di dalam masukan kebijakan ini dapat menyebabkan individu rentan dan anak-anak tidak terjangkau oleh berbagai program tersebut. Sementara, kebijakan pembatasan sosial yang diperlukan untuk mencegah meningkatnya tingkat infeksi membawa risiko ekonomi yang besar.

f. **Terbatasnya akses pada infrastruktur dan pendukung teknologi daring.** Situasi pandemi mengharuskan warga menjaga jarak aman, diam di rumah, dan melakukan aktivitas belajar dan bekerja jarak jauh. Semua itu membutuhkan akses pada infrastruktur dan pendukung teknologi daring, termasuk untuk mengakses layanan dasar dan publik yang tersedia secara virtual. Sementara, selain akses pada internet, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan kecepatan internet terendah. Hal ini berakibat pada tidak optimalnya semua kegiatan yang harus dilakukan jarak jauh, pun ketika individu rentan punya akses pada internet.

6. Kendala data dasar yang berakibat pada individu dan pada layanan

a. **Individu tidak pernah tercatat keberadaannya.** Seperti halnya semua program bantuan dan perlindungan sosial di Indonesia, perancangan program bantuan COVID-19 juga mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang pada intinya adalah pusat data kemiskinan. Penggunaan DTKS sebagai dasar perencanaan berpotensi menyisihkan individu rentan karena beberapa alasan.

Pertama, DTKS adalah pangkalan data individu-individu yang dikategorikan miskin (bahkan sangat miskin) sebelum pandemi terjadi, sementara definisi kerentanan dalam pandemi bergeser dan meluas. Kedua, DTKS sendiri belum bersifat terkini menghimpun masukan data terbaru dari desa melalui berbagai mekanisme pemutakhiran data kemiskinan yang dijalankan selama ini.

b. **Individu tidak memiliki dokumen kependudukan yang tepat.** Kepemilikan dokumen kependudukan bagi kebutuhan respon kebijakan berperan di dua sisi. Dari sisi warga, ia memperkecil kemungkinan penolakan dari layanan yang mensyaratkan dokumen, misalnya pembuatan akun keuangan *digital* yang saat ini dipertimbangkan sebagai salah satu cara penyaluran bantuan yang paling efektif. Tetapi, lebih penting lagi, ia menggambarkan kelengkapan data adminduk. Dalam upaya menarik data dasar dari *website* Kemendagri pada 23/04/2020, hanya bisa didapatkan informasi jumlah penduduk berdasarkan kategori agama yang dianut, golongan darah, pekerjaan, dan usia. Struktur data yang tersedia tidak memungkinkan untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan rencana tanggap darurat.

Selain itu, data yang ada juga tidak menginformasikan karakteristik penduduk yang tinggal di suatu wilayah secara lengkap. Padahal, apabila setidaknya data tersebut terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan yang lengkap, ia dapat menjadi informasi awal bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memetakan potensi dampak dan risiko pandemi dan menyusun rencana respon secara lebih tepat dan cepat.

REKOMENDASI UNTUK MENGATASI KERENTANAN DALAM PANDEMI COVID-19

Kajian kebijakan ini melihat berbagai kebijakan tanggap darurat dan mitigasi sudah cepat diambil pemerintah, baik pusat maupun daerah. Beberapa panduan dan protokol terkait penanganan cepat COVID-19 untuk kelompok rentan sudah tersedia, termasuk soal mekanisme pendataan penerima bantuan, pengasuhan, pemulangan anak, dan penanganan kekerasan. Tetapi itu semua perlu dilengkapi.

Kajian ini mengusulkan beberapa langkah di bawah ini untuk menjadi pertimbangan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah terkait masa pemulihan dan penyiapan masa setelah-pandemi, yang harus mulai dibangun sejak sekarang.

Di tahap ini, usulan langkah-langkah belum dapat memberi prediksi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tetapi, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah bisa menjadikan langkah-langkah di bawah sebagai titik awal perencanaan yang lebih detil, berikut penyiapan sumber-sumber daya anggaran, manusia, dan sarana prasarannya.

Rekomendasi dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: langkah kebijakan, langkah jangka pendek-menengah, dan langkah jangka panjang. Beberapa langkah kebijakan dapat terkesan sulit dicapai dalam waktu dekat tetapi tetap perlu disiapkan dari sekarang.

A

LANGKAH KEBIJAKAN



Komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menguatkan sistem dan layanan agar lebih responsif dan terpadu untuk anak-anak dan kelompok rentan sudah menjadi bagian dari RPJMN dan RPJMD. Prosesnya sudah berjalan bahkan sebelum pandemi COVID-19. Tetapi, pandemi ini membuat semua yang dulu penting, sekarang menjadi lebih mendesak. Sekarang adalah saat yang tepat untuk berinvestasi mewujudkan perubahan tersebut sambil menunggu dan setelah pandemi ini dapat diatasi.

Di bawah ini adalah beberapa langkah kebijakan yang perlu mulai diambil untuk mendukung intervensi yang lebih spesifik, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Tanpa kebijakan-kebijakan ini, program serta kegiatan yang lebih rinci dan praktis akan sulit terlaksana dengan efisien dan mencapai hasil yang efektif.

1. Menata data agar layanan dan sistem inklusif dan akuntabel

Setidaknya ada dua jenis data yang diperlukan untuk intervensi spesifik yang lebih efektif di masa pandemi. Pertama ada data agregat yang fokus pada sebaran dan karakteristik wilayah terutama tingkat RT/RW/desa/Kelurahan hingga kecamatan. Data seperti ini diperlukan untuk intervensi yang bersifat kolektif dan struktural seperti sarana air bersih dan sanitasi, fasilitas dan kebutuhan petugas kesehatan, pekerja sosial, serta fasilitas dan petugas pusat krisis kekerasan, dan jangkauan koneksi internet dan komunikasi.

Kedua adalah data individu atau *by name, by address*. Data spesifik individu/rumah tangga diperlukan untuk intervensi langsung ke keluarga seperti bantuan sosial, layanan konseling, dan layanan kunjungan kesehatan. Kedua jenis data ini saling berkaitan. Tanpa data individu/rumah tangga, termasuk data adminduk, akan sulit untuk mendapatkan gambaran agregat demografi di satu wilayah, misalnya rasio antara petugas kesehatan dan jumlah anak dan lansia di satu kecamatan.

Pandemi semacam ini dapat terjadi lagi di masa depan. Dengan demikian, sekarang adalah momentum yang tepat bagi pemerintah bersama-sama merumuskan kembali kebijakan bagipakai data adminduk secara lebih sederhana, terdesentralisasi, dan tetap mengedepankan perlindungan data pribadi warganya.

Secara khusus:

- Pemerintah pusat dan daerah agar memulai mekanisme koordinasi lintas sektor untuk percepatan kelengkapan data adminduk dan pengembangan statistik hayati melalui pelaksanaan Perpres 69/2019 tentang Percepatan Adminduk dan Pengembangan Statistik Hayati. Melalui pelaksanaan Perpres ini, pemerintah pusat dan daerah dapat memfokuskan sumber daya dan anggaran yang memadai untuk perbaikan sistem data adminduk yang memungkinkan mekanisme bagipakai yang aman dan sewaktu.
- DTKS sebagai sumber rujukan data program dan bantuan masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diatasi bila pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kementerian Sosial dan dinasnyanya, mengoptimalkan data adminduk sebagai sumber rujukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja program.
- Pembenahan data adminduk sebagai data dasar yang saat ini telah memenuhi lebih dari 95% cakupan nomor induk kependudukan (NIK) harus diikuti dengan

pelengkapan berbagai komponen data sosial ekonomi dan pemutakhiran dinamis sesuai dengan peristiwa penting kehidupan tiap warga oleh Kementerian Dalam Negeri dan jajaran dukcapil di setiap daerah.

- Kementerian Kesehatan dan jajaran dinasnyanya memfasilitasi bagipakai data COVID-19 dengan merujuk pada Protokol Tata Kelola Data Anak yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 (Nomor B-1, 30 April 2020), antara petugas kesehatan dengan pekerja sosial yang dikelola dengan baik dan terjaga keamanannya, sehingga pekerja sosial dan pendamping lainnya dapat menyusun rencana pendampingan dan bantuan yang tepat bagi anak-anak yang terdampak. Agar bagipakai data ini efektif sebaiknya dilakukan hingga di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan.
- Data individu baru (*by name, by address*) yang diperoleh relawan COVID-19 atau petugas di desa harus dibagikan ke seluruh sektor layanan dan petugasnya. Pendataan informasi spesifik yang diperlukan sektor dan tidak tersedia di pangkalan data adminduk atau DTKS harus dikoordinasikan oleh aparat desa. Data-data ini sebaiknya juga dibagikan ke aparat desa atau kelurahan serta kecamatan sehingga bagipakai data yang praktis bisa mudah dilakukan di tiap wilayah.

● Bagi sektor atau pemerintah daerah yang sedang merancang atau akan mendata kebutuhan program, pertimbangkan karakteristik khusus rumah tangga menggunakan variabel-variabel seperti yang sudah disebutkan di kajian ini.

● Semua sektor dan pemerintah daerah agar memanfaatkan hasil pendataan sasaran respon COVID-19 untuk memperbaiki DTKS dan data adminduk. Libatkan Kementerian Dalam Negeri terutama dukcapil di dalam semua upaya respon COVID-19 sejak awal. Salah satu langkahnya adalah dengan mengupayakan penggunaan data konsolidasi bersih terkini dari dukcapil di setiap wilayah respon sebagai dasar pemadanan data awal. Ini tentunya harus seimbang dan realistis sesuai kebutuhan cepat respons.

2. Menata tata kelola layanan dasar dan layanan publik agar responsif

Selain menyiapkan layanan agar siap untuk kembali beroperasi, pemerintah harus mulai menyiapkan sistem dan prosedur, termasuk menyiapkan kapasitas penyedia layanannya, untuk melaksanakan layanan virtual yang tidak hanya bersifat sementara dan beroperasi di masa tanggap darurat, tetapi terus tersedia dengan kualitas yang semakin baik, di masa pemulihan, rehabilitasi, dan setelah-pandemi. Ini berlaku untuk semua layanan dasar dan layanan publik yang ada. Tanggung jawab untuk menyusun prosedur, pedoman, serta aturan layanan sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat dengan peran mengembangkan NSPK.

Khususnya:

- Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar memastikan bahwa layanan atau kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara virtual harus menyediakan alat pelindung diri bagi semua petugas penyedia layanan di garis depan, baik di kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan, bantuan hukum, maupun adminduk. Ini termasuk memprioritaskan *testing* berkala bagi petugas serta mengatur piket layanan serta protokol keamanannya.

- Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar meningkatkan jumlah dan jangkauan layanan bergerak berkala ke rumah atau institusi untuk memantau kondisi serta kebutuhan anak dan keluarga, termasuk menambah kapasitas pekerja sosial dan pendamping komunitas. Ini termasuk mengoptimalkan peran tenaga kesejahteraan sosial, kader KB, pendamping lain seperti di PUSPAGA, dan fasilitator bansos.
- Semua pemerintah daerah agar memobilisasi RW, RT, dan beragam organisasi dan pendamping komunitas (termasuk kader-kader program pemerintah) untuk lebih aktif mengamati kebutuhan-kebutuhan keluarga dan anak dalam masa pandemi dan setelah-pandemi. Kebutuhan-kebutuhan individu, rumah tangga, dan kolektif ini sebaiknya didokumentasikan oleh aparat desa dan datanya dibagikan/terbuka bagi semua titik layanan sektoral di tingkat terbawah.
- Semua pemerintah daerah agar mempermudah/memperjelas/memangkas jalur koordinasi dan komunikasi antara RW, RT, dan dengan penyedia layanan di tingkat terbawah seperti sekolah, puskesmas, peksos, dan berbagai ragam pendamping.

- Kementerian Sosial, KPPPA, Kemendesa PDTT, dan BKKBN memobilisasi peksos atau pendamping agar dapat melakukan kunjungan secara berkala untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi anak dan keluarga/orang tua/pengasuh utama dan merujuk mereka pada layanan kesehatan bila anak/keluarga/orang tua/pengasuh utama harus ditangani secara medis terkait COVID-19 dan kebutuhan kesehatan lainnya.

- Kunjungan berkala juga harus dapat merujuk mereka pada layanan penanganan kekerasan/bantuan hukum/ medis/psikososial bila anak/ keluarga/ orang tua/pengasuh utama mengalami kekerasan, memberikan konseling dan manajemen kasus jika diperlukan, memantau dan menghubungkan akses anak/keluarga/orang tua/pengasuh utama pada kebutuhan pokok sehari-hari, program subsidi/keringanan, perlindungan sosial, dan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang disediakan pemerintah.

3. Menata perlindungan khusus yang dapat mendeteksi, mencegah, dan menangani kekerasan yang dialami anak dan kelompok rentan dari beragam identitas sosial, baik usia, gender, maupun status disabilitas.

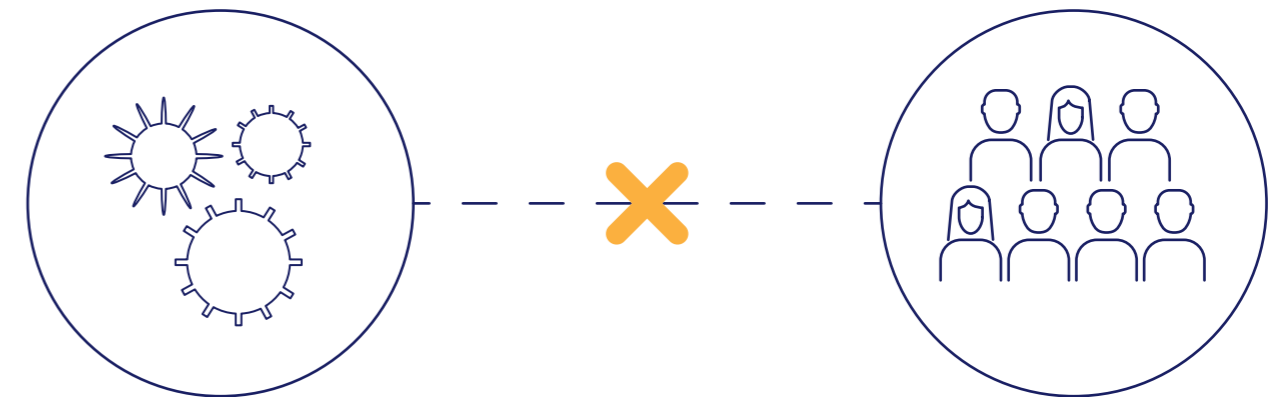
Pandemi ini meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan daring di antara perempuan dan anak-anak. Meningkatnya laporan kasus sudah dibahas di kajian ini. Komitmen dan upaya pemerintah mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah dicanangkan sejak sebelum pandemi. Sekarang adalah saatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menata ulang kebijakan di bidang ini.

Pemerintah pusat dapat menggunakan data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 untuk mendapatkan informasi lebih mengenai prevalensi dan karakteristik kekerasan serta penanganannya, sehingga berdasarkan itu bisa mulai membenahi sistem, jangkauan, dan kualitas layanan penanganan kekerasan di lapangan.

Secara umum, pemerintah pusat dan daerah juga harus mulai menyiapkan sistem dan prosedur, termasuk menyiapkan agar unit layanan kekerasan yang relevan dapat melaksanakan layanan virtual yang terus tersedia dengan kualitas yang semakin baik, di masa pemulihan, rehabilitasi, dan setelah pandemi. Khususnya:

- KPPPA dan Kementerian Sosial serta jajaran dinasny harus menyiapkan kapasitas peksos dan pendampingnya, psikolog, atau konselor di seluruh wilayah yang terdampak agar dapat menyediakan layanan virtual maupun tatap muka untuk mendeteksi adanya individu dalam risiko kekerasan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan rujukan penanganan yang aman bagi semua.
- Selain melaksanakan langkah yang disusun dalam Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Situasi Pandemi COVID-19, KPPPA dan Kementerian Sosial serta jajaran dinasny mengatur mekanisme pembatasan dan pengaturan piket peksos, pendamping, psikolog, atau konselor yang dilengkapi dengan protokol kesehatan dan perlengkapan yang memadai, termasuk untuk petugas layanan telekonseling.
- KPPPA dan Kementerian Sosial serta jajaran dinasny harus menyusun pengelolaan data kasus yang aman, etis, dan terpilah sampai dengan identifikasi kebutuhan khusus klien.
- KPPPA dan Kementerian Sosial serta jajaran dinasny secara berkala memastikan bahwa mekanisme pengelolaan stres tersedia bagi semua peksos, pendamping, psikolog, dan konselor petugas unit layanan dan mereka mendapatkan respon yang memadai.

B LANGKAH JANGKA PENDEK DAN MENENGAH



1. Mengurangi paparan terhadap COVID-19

Prioritas utama adalah mengurangi paparan populasi terhadap COVID-19. Secara garis besar, hal ini dicapai dengan meningkatkan perlindungan diri dan komunitas. Beberapa populasi yang secara tidak proporsional lebih rentan terpapar dan terinfeksi COVID-19 termasuk: anak dari keluarga dengan anggota yang positif COVID-19, PDP, ataupun ODP, anak dan keluarga yang tinggal di lingkungan padat dan/atau tanpa akses ke air bersih serta sarana sanitasi, serta anak yang tinggal di institusi non-keluarga seperti panti, asrama/pesantren, dan tahanan.

- Tetap menjalankan kebijakan PSBB hingga terjadi penurunan substansial jumlah infeksi baru selama setidaknya 2 minggu berturut-turut atau sesuai dengan indikator yang diberikan oleh epidemiolog, ekonom, dan ahli kesehatan masyarakat.
- Memprioritaskan *testing, tracing, tracking,* dan *treatment* bagi keluarga yang salah satu anggotanya terjangkit COVID-19 serta mendukung mereka untuk menjalankan isolasi mandiri.

- Mengurangi kontak fisik anak dengan orang dari luar institusi serta memperbanyak saluran dan kesempatan komunikasi virtual anak dengan orangtua, teman, dan keluarga.
 - Memastikan protokol kesehatan dan PHBS dimengerti oleh pengasuh dan pengawas panti, asrama/pesantren, serta tahanan serta menyediakan alat serta sarana pencegahan penularan di institusi tersebut.
 - Memastikan ketersediaan air bersih mengalir, sabun, dan prasarana sanitasi serta kebersihan individu terutama di daerah-daerah padat penduduk, panti, asrama/pesantren, serta tahanan.
- Dalam jangka pendek, fasilitas ini bisa disediakan secara *ad-hoc* namun persiapan untuk menyediakan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang permanen harus segera dimulai.
- Menggerakkan komunitas (tingkat desa, RT/RW) untuk mengidentifikasi warga yang perlu melakukan isolasi mandiri serta mempermudah isolasi mandiri bagi warganya yang menjadi PDP/ODP atau yang kembali dari luar daerah.
 - Mengalihkan beberapa layanan yang memungkinkan dari tatap muka/fisik menjadi layanan daring/virtual misalnya konseling serta belajar-mengajar.

- Memprioritaskan tes PCR bagi anak-anak dan pengasuh yang tinggal dalam lingkungan padat seperti panti, pesantren, asrama, penjara/tahanan, dan komunitas padat penduduk. Memperluas jangkauan tes PCR untuk menjangkau kelompok rentan lainnya juga. Secara prinsip, tes PCR harus juga didahulukan bagi warga rentan yang tidak punya pilihan leluasa untuk menjalani segala bentuk pembatasan sosial dalam skala apa pun dengan diam di rumah.
- Menanggung semua biaya testing dan perawatan termasuk bagi individu yang ternyata tidak positif COVID-19.
- Menyiapkan sistem mulai dari regulasi, anggaran, hingga tata laksana untuk pengadaan, distribusi, dan pemberian vaksin dan obat COVID-19 segera setelah tersedia.
- Berpartisipasi dalam bagi pakai data antarnegara untuk mendukung program-program riset klinis maupun non-klinis yang etis dan berstandar internasional yang bertujuan untuk mengetahui faktor/determinan, dampak/luaran, dan pendukung/penghambat individual maupun populasi terkait COVID-19.

2. Mengurangi dampak dari infeksi COVID-19

Selama penularan lokal masih terjadi, jumlah total individu yang terinfeksi akan tetap bertambah (meski tingkat infeksi dapat dikurangi). **Beberapa kelompok anak dan masyarakat memiliki kerentanan yang mengakibatkan infeksi COVID-19 akan membawa dampak yang secara proporsional lebih parah dibanding individu lainnya. Secara garis besar, menemukannya individu yang terinfeksi dan memberikan perawatan yang intensif dan spesifik adalah arah kebijakan yang diperlukan.** Kelompok ini termasuk: anak positif COVID-19, anak dengan disabilitas, anak dengan kondisi/penyakit bawaan.

- Meningkatkan kapasitas dan jangkauan tes PCR serta mempercepat proses testing sampai dengan mengkomunikasikan hasilnya pada yang bersangkutan agar tindak lanjut dapat segera diambil.
- Memprioritaskan tes PCR bagi anak dengan disabilitas dan morbiditas bawaan meskipun mereka menunjukkan gejala ringan.

3. Mengurangi konsekuensi negatif dari pembatasan sosial terhadap layanan dasar

Kebijakan pembatasan sosial yang terukur skalanya dan didukung jaring pengaman bisa jadi masih merupakan kebijakan yang perlu diambil untuk mengurangi penularan COVID-19 namun kebijakan ini membawa dampak negatif di berbagai aspek kehidupan. Untuk memastikan bahwa apabila nantinya tetap akan ada pembatasan sosial berkala, maka diperlukan langkah-langkah tambahan untuk mengurangi dampak negatifnya terutama bagi anak dan keluarga dari kelompok rentan.

Dalam jangka pendek, banyak layanan yang akan terganggu dan tertunda akibat kebijakan pembatasan sosial dalam skala apa pun. Namun layanan-layanan ini tetap harus berjalan. **Sebagai prinsip, pemerintah harus mengalihkan beberapa layanan dasar yang bisa dialihkan menjadi daring/jarak jauh, sementara layanan yang harus tetap dilakukan secara fisik/tatap muka harus dijalankan dengan berbagai modifikasi serta prinsip keamanan bagi petugas dan pengguna layanan.**

- Laksanakan Protokol Pengasuhan Bagi Anak dan Orangtua OTG, PDP, Terkonfirmasi dan Meninggal karena COVID-19 dan Protokol Pengeluaran dan Pembebasan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, Pembebasan Tahanan, Penangguhan Penahanan dan Bebas Murni yang sudah diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Mengubah layanan imunisasi menjadi penjangkauan aktif dengan mengunjungi rumah ke rumah untuk memberikan vaksinasi dasar bagi anak berusia wajib imunisasi. Penjangkauan aktif ini juga berfungsi untuk memantau risiko penyakit menular selain COVID-19 seperti demam berdarah, TB, difteri, dan sebagainya yang penanganannya harus sama siap dengan penanganan COVID-19. Petugas Puskesmas bisa bekerja sama dengan penanggung jawab posyandu bayi dan balita di desa atau RW setempat. Petugas harus dikonfirmasi bebas COVID-19 melalui tes PCR sebelum melakukan pelayanan aktif. Mode layanan serupa bisa diterapkan untuk kunjungan kehamilan wajib dan menyiapkan bilik khusus persalinan aman.
- Merekrut tenaga tambahan untuk mendukung kunjungan rumah baik bagi layanan kesehatan maupun layanan sosial keluarga.
- Mengaktifkan pencatatan statistik hayati secara daring/jarak jauh dengan menggunakan *interface* digital, memanfaatkan petugas registrasi desa atau aparat desa lainnya, serta meningkatkan komunikasi antara petugas kesehatan dan kantor Dukcapil.
- Layanan adminduk berupa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berjalan secara daring juga secara sewaktu terus-menerus memutakhirkan data kependudukan serta terhubung dengan program bantuan COVID-19 apabila terdapat warga yang membutuhkan dokumen kependudukan.
- Layanan kesejahteraan seperti pendampingan, pengelolaan kasus, pengelolaan konflik dalam rumah, dan pertolongan pertama psikologis dari pekerja sosial dan pendamping juga harus tetap diselenggarakan secara virtual, serta terhubung dengan program bantuan COVID-19 apabila terdapat warga yang membutuhkan dukungan.
- Layanan dan penjangkauan yang hanya bisa dilakukan secara tatap muka/fisik misalnya bagi penjangkauan bagi anak jalanan atau layanan pusat krisis bagi anak yang mengalami kekerasan domestik harus tetap dilakukan sesuai prosedur keamanan dan pencegahan penularan.
- Mengingat terbatasnya jumlah Peksos yang memiliki hubungan kepegawaian dengan Kementerian Sosial (Sakti Peksos), pemerintah dapat meluaskan juga definisi dan koordinasi dengan peksos yang berafiliasi dengan lembaga profesi (seperti IPSPI) dan dengan pendamping lain (seperti konselor PUSPAGA) yang telah menyusun protokol serta menyelenggarakan layanan kessos yang dapat diakses. Koordinasi juga dilaksanakan agar peksos profesional, pendamping, kader KB, dan Sakti Peksos dapat berperan simultan.
- Bagi layanan pendidikan, perlu dipertimbangkan kebijakan nasional untuk mengulang kembali semua pelajaran yang diberikan di awal masa belajar dari rumah dan daring mengingat tidak semua anak punya akses pada internet yang memadai meski semua dinyatakan lulus.
- Kemdikbud menyiapkan dan menyebarluaskan materi-materi interaktif, pantas sesuai usia, dan profesional tentang keterampilan hidup seperti PHBS, disiplin diri, dan kemahiran psikososial, termasuk apa itu dan bagaimana mengelola situasi pandemi seperti sekarang.
- Mempertimbangkan pemberian akses terbatas ke DAPODIK bagi pemberi layanan promosi kesehatan secara mudah dan aman, agar dengan strategis dapat menyasar anak-anak usia sekolah semasa berhenti sementara kegiatan belajar mengajar.

4. Mengurangi dampak Pandemi COVID-19 dan segala bentuk pembatasan sosial terhadap kemampuan ekonomi keluarga dan individu rentan

Salah satu dampak paling besar bagi keluarga adalah berkurangnya pendapatan/pemasukan yang mempengaruhi kapasitas keluarga untuk menanggung biaya kehidupan, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan anak. Banyak keluarga yang tadinya berada di atas garis kemiskinan akan tergelincir ke bawah

garis kemiskinan sementara keluarga miskin akan semakin mengalami kesulitan ekonomi. Karena kemiskinan berkaitan erat dengan disabilitas, gender, dan pendidikan, maka kelompok-kelompok ini seperti keluarga yang dikepalai oleh perempuan dan orang dengan

disabilitas, keluarga yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor informal, serta keluarga yang mengalami PHK atau dirumahkan tanpa bayaran memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami kesulitan ekonomi dengan dampak yang lebih parah. **Secara garis besar, pemerintah dapat meringankan dampak ekonomi bagi rumah tangga lewat dua jalur: subsidi/penghapusan biaya layanan dasar serta pemberian bantuan sosial langsung (in kind atau tunai) bagi keluarga.**

- Jalur pemberian bantuan sosial langsung tentunya membutuhkan data individu yang tepat sementara segala bentuk pembatasan sosial serta COVID-19 mengakibatkan fluktuasi penduduk miskin yang lebih drastis dan cepat berubah. Pemutakhiran data lewat sistem DTKS akan memakan waktu sehingga sebaiknya garis kemiskinan untuk bantuan sosial dinaikkan untuk sementara (misalnya merujuk ke 40-50 persen termiskin) sampai data DTKS diperbaharui.
- Untuk jangka pendek, data penerima bansos untuk sementara bisa mengandalkan pendataan cepat dari kelurahan, RW, dan RT dengan bantuan ormas serta kader-kader pemerintah di dalam komunitas. Indikator penerima bantuan kesejahteraan juga sebaiknya diperluas untuk mengakomodasi jenis kerentanan baru yang disebabkan oleh pandemi.

- Meningkatkan jangkauan dan jenis subsidi layanan dasar bagi keluarga miskin dan rentan seperti: listrik, air, sewa rumah, dan transportasi umum.
- Layanan kesehatan fisik dan mental daring, termasuk konsultasi dengan pekerja sosial, harus didukung dengan mekanisme asuransi kesehatan, termasuk JKN, yang menanggung biaya konsultasi virtual dan pengobatan jarak jauh, termasuk konseling psikososial daring.
- Memberikan subsidi atau bantuan finansial bagi panti, rumah singgah, asrama/pesantren untuk melanjutkan layanan dan program bagi anak di institusi tersebut. Hal ini terutama untuk mencegah anak dipulangkan tanpa proses dan kepastian pengasuhan yang jelas.
- Bantuan sosial tunai atau *in-kind* perlu diperluas untuk mencakup kebutuhan internet dan komunikasi yang akan meningkat selama masa PSBB dan hingga layanan publik kembali normal.

5. Mengurangi dampak Pandemi COVID-19 dan segala bentuk pembatasan sosial bagi kesehatan mental anak dan individu rentan lainnya

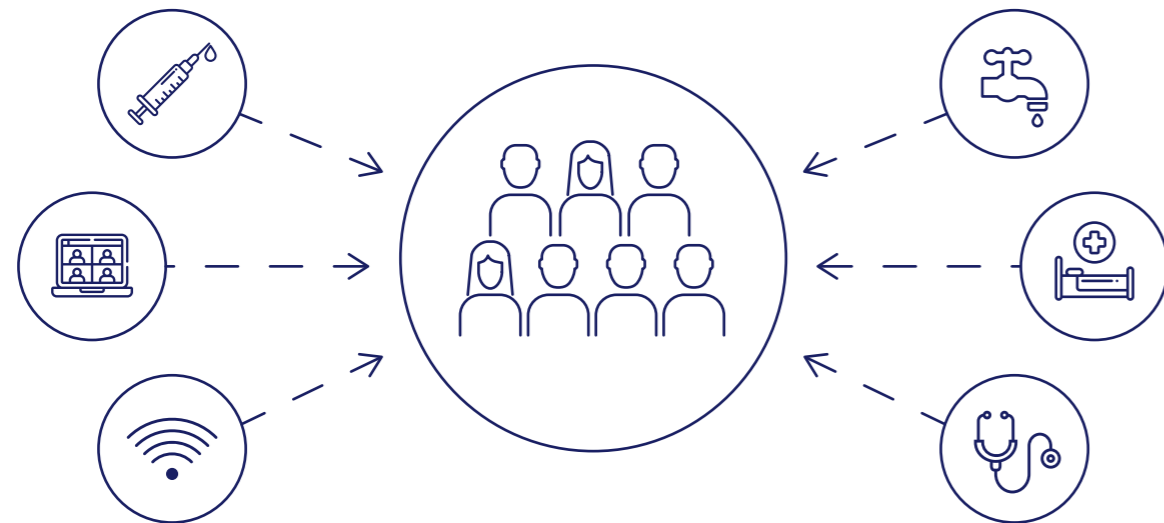
Pandemi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi penularan COVID-19 membawa perubahan sosial ekonomi yang drastis. Perubahan-perubahan ini juga datang dari kebijakan serta aturan yang kerap berganti dan harus diambil seiring bukti terbaru dan perubahan kondisi di masyarakat. Hal ini ditambah lagi dengan arus informasi yang deras, beragam, serta cepat berubah. Situasi ini bukanlah kondisi yang mudah diartungi oleh siapapun terutama anak dan individu rentan lainnya (misalnya anak dan individu yang memiliki riwayat gangguan kesehatan jiwa) dan dapat berujung pada kecemasan dan gangguan kesehatan mental lainnya. **Secara garis besar, langkah yang dapat dilakukan adalah menyediakan lebih banyak pilihan sosial dan ruang aman bagi anak-anak dan individu rentan.**

- Meluaskan mekanisme deteksi dan intervensi dini terhadap kesulitan hidup anak, termasuk membekali pekerja sosial dan pendamping serta penyedia layanan lini depan dengan alat ukur sederhana tervalidasi, misalnya *Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)* atau *Child Behavior Checklist (CBCL)*.

- Memperkuat jejaring rujukan pertolongan pertama psikologis (PFA) berbasis komunitas dan respon layanan kesehatan mental lanjut jika diperlukan, termasuk obat-obatan.
- Mendukung forum-forum anak dan remaja dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan virtual sebagai jejaring dan organisasi yang bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau komunikasi sejawat tentang mengelola berbagai hambatan dalam situasi pandemi, termasuk mengatasi kecemasan.
- Semua layanan ini harus ditanggung oleh pemerintah lewat JKN atau jalur pembiayaan lainnya.

C

LANGKAH JANGKA PANJANG



Pandemi dan kejadian wabah penyakit kali ini bukan yang pertama kali dan bukan pula yang terakhir kali. Pemerintah, terutama pemerintah pusat, perlu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk kemunculan pandemi atau wabah berikutnya. Pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan tata laksana pembatasan sosial secara berkala ke depan yang terukur dan diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator penyebaran wabah sesuai standar epidemiologi, yang juga didukung oleh jaring pengaman yang efektif.

Langkah-langkah jangka panjang juga diperlukan untuk pemerintah pusat dan daerah *menata ulang sistem dan infrastruktur fisik dan non-fisik (data, tata kelola*

dan tata laksana, prosedur, serta kuantitas dan kualitas petugas) untuk mengurangi/menghentikan penularan wabah penyakit dan melindungi kelompok rentan, mengurangi gangguan pandemi terhadap kegiatan sehari-hari, dan mendukung berjalannya layanan dasar di tengah pandemi.

Sebagai gambaran, saat ini kapasitas Indonesia dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar warga masih sangat terbatas (Tabel 15). Pemerintah pusat dan daerah harus meluaskan dan meningkatkan kualitas layanan dasar, perlindungan, dan kesejahteraan yang inklusif dan responsif sejak sekarang.

Tabel 15.

Estimasi Rasio Ketersediaan Layanan Dasar Perlindungan Warga (per 1 juta penduduk)

Provinsi	Jumlah Penduduk (Sumber: Dukcapil, per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan tempat tidur di rumah sakit per 1.000.000 penduduk (Sumber: PERSI per April 2018)	Rasio ketersediaan dokter per 1.000.000 penduduk (Sumber: Kemenkes per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan perawat per 1.000.000 penduduk (Sumber: Kemenkes per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan ventilator per 1.000.000 penduduk (Sumber: ASPAK per Maret 2020)	Rasio ketersediaan pekerja sosial per 1.000.000 penduduk (Sumber: PPK Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kemensos per Januari 2020)
DKI Jakarta	11.058.944	2.750	1.493	2.609	96	2
Jabar	23.066.739	1.120	489	1.640	52	3
Jatim	20.276.218	1.440	709	2.556	46	3
Jateng	18.245.389	1.510	711	2.601	63	3
Sulsel	4.351.784	2.240	785	3.214	66	5
Banten	5.505.029	1.200	782	1.864	60	2
Sumsel	4.177.160	1.450	608	3.257	67	9
Kalsel	2.082.154	1.700	760	3.558	55	7
Sumbar	2.743.037	1.810	947	3.132	75	10
Papua	2.106.453	1.910	383	2.627	21	11
NTB	2.620.826	1.220	556	2.905	46	6
Bali	2.279.011	2.070	1.534	3.845	103	5
Kaltim	1.747.308	2.120	957	3.712	65	4
Kalteng	1.354.180	1.350	654	4.356	39	7
Sumut	7.238.284	2.010	800	2.388	66,1	6
Total 15 Wilayah	108.852.516	2.600	769	2.493	61	4
Indonesia	266.584.473	1.410	402	1.413	31	3

Secara khusus:

1. Pemerintah pusat dan daerah (termasuk Gugus Tugas COVID-19) mempersiapkan sistem, sarana, serta prosedur untuk memastikan vaksinasi universal serta pengadaan obat segera setelah ditemukan.
2. Masing-masing kementerian sektor, dengan bantuan ahli menyiapkan tata laksana data yang transparan, lengkap, dan aman untuk mendukung perangkat perhitungan pembatasan sosial terukur, berkala, dan didukung jaring pengaman, agar pemerintah pusat dan semua pemerintah daerah bisa menggunakannya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Masing-masing kementerian sektor, dengan bantuan ahli serta masyarakat sipil, membangun dan memperbaiki protokol layanan dasar selama masa pandemi dan pembatasan sosial terukur, berkala, dan didukung jaring pengaman, terutama bagi layanan dan kegiatan yang tetap harus dilakukan secara tatap muka/fisik.
4. Masing-masing kementerian/lembaga, dengan bantuan ahli serta masyarakat sipil membangun prosedur, norma, tata laksana/protokol untuk mengalihkan layanan-layanan yang dimungkinkan ke mode daring/jarak jauh secara bertahap termasuk pencatatan sipil dan statistik hayati, konsultasi kesehatan, konseling, pendampingan sosial, dan proses belajar mengajar.
5. Pemerintah pusat dan daerah melatih petugas dan pemberi layanan untuk menyediakan layanan secara daring dan dalam kondisi pandemi atau pembatasan sosial terukur dan berkala.
6. Pemerintah pusat dan daerah menyiapkan sistem pendidikan virtual yang akan menjadi cara baru belajar di masa datang, merevitalisasi peran guru dan pendamping untuk memfasilitasi kegiatan virtual yang sifatnya bukan belajar mengajar akademis, tetapi tambahan keterampilan seperti diskusi tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah dengan metode yang menyenangkan dan memberi stimulus kognitif sesuai dengan usia anak. Kemendikbud juga perlu memberikan fleksibilitas (serta koridornya) bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan materi ajar virtual serta penilaian pencapaian pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing murid.
7. Pemerintah pusat dan daerah memperbaiki ketersediaan infrastruktur fisik yang menunjang layanan baik di masa non-pandemi termasuk melalui, tapi tidak terbatas pada, langkah-langkah yang berikut
 - Membangun fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak yang bisa diakses tiap individu dan rumah tangga terlepas dari status permukiman dan wilayah geografis, termasuk juga sarana tinggal non-rumah tangga seperti panti, asrama/pesantren, rumah singgah/rumah aman, dan tahanan.
 - Meluaskan jangkauan dan meningkatkan kualitas internet serta memperluas akses individu ke internet (internet murah, luas, dan cepat). Di samping itu pemerintah pusat perlu menguatkan keamanan dalam interaksi dan perlindungan data pribadi daring, serta mengalihkan fokus anggaran dan sumber daya dari mengontrol dan menyensor konten pada perbaikan jaringan, keamanan, dan ketersediaan konten positif.
8. Pemerintah pusat dan daerah meningkatkan derajat kesehatan individu termasuk dengan, tapi tidak terbatas pada, langkah-langkah berikut:
 - Meningkatkan anggaran kesehatan pusat menjadi 10 persen APBN dan memastikan pemerintah daerah mematuhi aturan anggaran kesehatan 10 persen.
 - Meningkatkan rasio dokter, psikolog/konselor, serta tenaga medis lainnya, rumah sakit, fasilitas/alat perawatan, dan pekerja atau pendamping sosial.
 - Meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar, pencegahan dan penanganan penyakit menular terpadu (DB, TB, COVID, dan sebagainya), dan imunisasi universal serta memperluas jenis imunisasi yang diberikan.
 - Memperluas jangkauan dan kualitas kesehatan reproduksi komprehensif.
 - Mencapai jangkauan semesta JKN.
 - Menjalankan kebijakan pengendalian tembakau yang menyeluruh.
 - Menggalakkan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat lewat berbagai saluran, termasuk bekerja sama dengan lembaga dan tokoh keagamaan, industri hiburan, serta layanan pendidikan, termasuk kebersihan pribadi dan gaya hidup sehat: anti-rokok, olahraga, dan asupan gizi yang seimbang.

- Anjuran pemberian ASI eksklusif harus seimbang dengan pemahaman terkait kondisi rumah tangga ibu menyusui dan tidak malah menimbulkan tekanan baru.
 - Menormalkan bekerja dari rumah atau jam kerja fleksibel serta memastikan pekerja tidak mendapatkan sanksi atas hal tersebut.
9. Pemerintah pusat dan daerah menata sistem perlindungan dan kesejahteraan anak yang komprehensif lewat pendekatan tiga pilar: perlindungan sosial, dukungan keluarga, dan perlindungan khusus.
- Perlindungan sosial mencakup layanan lini depan dan komunitas tersedia dan mampu membantu anak-anak mengakses kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan identitas hukum, dan untuk membantu pengasuh mereka mengakses layanan keuangan.
 - Dukungan keluarga menyangkut upaya penyediaan pekerja sosial dan pendamping komunitas yang mumpuni untuk membantu pengasuh merawat anak-anak mereka. Dukungan pada keluarga ini tidak secara normatif mengatur keutuhan struktur keluarga dan mengajari searah bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik, melainkan menyediakan dukungan bagi keluarga rentan melalui pendampingan pengelolaan pengasuhan sebagai bagian dari pendekatan deinstitutionalisasi anak.
- Perlindungan khusus mencakup ketersediaan dan akses terhadap layanan khusus, baik untuk meminimalkan risiko bahaya yang mereka hadapi atau untuk menanggapi insiden yang mereka alami.
10. Dalam melaksanakan langkah jangka pendek, menengah, dan panjang, pemerintah pusat dan daerah agar merangkul dan bekerja sama dengan lembaga masyarakat sipil dan lembaga komunitas atau masyarakat dengan pembekalan yang cukup dan aman karena tangan pemerintah tidak akan sampai ke semua titik.

REFERENSI

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. (2019). Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic.

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. (2019). Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic.

Adger, W. N. (2006). Vulnerability. *Global Environmental Change*, 16(3), 268-281. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006>

Aizawa, T. (2019). The impact of health insurance on out-of-pocket expenditure on delivery in Indonesia. *Health Care Women Int*, 40(12), 1374-1395. doi:10.1080/07399332.2019.1578778

Anak Jalanan Masih Terabaikan. (2019, 20 November). *Kompas*. Edisi Cetak.

Badan Pusat Statistik, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.

Badan Pusat Statistik. (2016). Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN).

Better Care Network, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action and UNICEF. (2020). Protection of children during the COVID-19 Pandemic: Children and Alternative Care.

Bradbury-Jones RN, C. (2020). The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence. *Journal of Clinical Nursing*, 12 April. doi: <https://doi.org/10.1111/jocn.15296>

Campbell, A.M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. *Forensic Science International Reports* 2. doi: <https://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100089>

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2015). Planning for an Emergency: Strategies for Identifying and Engaging At-Risk Groups. A guidance document for Emergency Managers: First edition. Atlanta (GA): CDC.

Chen, Y. J., Chindarkar, N., & Xiao, Y. (2019). Effect of reliable electricity on health facilities, health information, and child and maternal health services utilization: evidence from rural Gujarat, India. *J Health Popul Nutr*, 38(1), 7. doi:10.1186/s41043-019-0164-6

Dalton, L., Rapa, E., & Stein, A. (2020). Protecting the psychological health of children through effective communication about COVID-19. *Lancet Child Adolesc Health*, 4(5), 346-347. doi:10.1016/S2352-4642(20)30097-3

Dharma JS, I.G. and Perdani, Y. (2020, April 27). Protecting overcrowded prisons from virus. [Video]. Youtube. Jakarta: The Jakarta Post. Retrieved from: <https://youtu.be/1XxiDKvhQcQ>

Diperkirakan Ada 77.500 Gepeng di Kota-kota Besar di Indonesia. (2019, 22 Agustus). *Kompas.com*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkirakan-ada-77500-gepeng-di-kota-kota-besar-di-indonesia>.

Duff, P., Kusumaningrum, S., & Stark, L. (2016). Barriers to birth registration in Indonesia. *Lancet Glob Health*, 4(4), e234-235. doi:10.1016/S2214-109X(15)00321-6

ECLT Foundation. (2020). The Impact of COVID-19 on Child Labour in Agriculture. Retrieved from ECLT Foundation website: <https://www.eclt.org/en/news/the-impact-of-covid-19-on-child-labour-in-agriculture>

Erlangga, D., Ali, S., & Bloor, K. (2019). The impact of public health insurance on healthcare utilisation in Indonesia: evidence from panel data. *Int J Public Health*, 64(4), 603-613. doi:10.1007/s00038-019-01215-2

Golberstein, E., Wen, H., & Miller, B. F. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Mental Health for Children and Adolescents. *JAMA Pediatr*. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.1456

Goldman, P. S., van Ijzendoorn, M. H., Sonuga-Barke, E. J. S., & Lancet Institutional Care Reform Commission Group. (2020). The implications of COVID-19 for the care of children living in residential institutions. *Lancet Child Adolesc Health*. doi:10.1016/S2352-4642(20)30130-9

Hanna, R. (2002, April 22). Perluasan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah Bawah. *Harian Kompas*, p.6.

Jackson, M., Duff, P., Kusumanigrum, S., & Stark, L. (2014). Thriving beyond survival: Understanding utilization of perinatal health services as predictors of birth registration: A cross-sectional study. *BMC International Health and Human Rights*, 14(1). doi:10.1186/s12914-014-0038-3

Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E. (2020). Behavioral and Emotional Disorders in Children during the COVID-19 Epidemic. *J Pediatr*. doi:10.1016/j.jpeds.2020.03.013

Kecepatan Internet RI Nyaris Terendah, Menkominfo Sebut 6 Sebab. (2020, 3 Mei). *Tempo.co*. Retrieved from: <https://bisnis.tempo.co/read/1338150/kecepatan-internet-ri-nyaris-terendah-menkominfo-sebut-6-sebab/full&view=ok>

Kelly, G. & Llyod-Sherlock, P. (2020). Social protection responses to COVID-19: Actions that can make a difference for older people. [Powerpoint slides]. Retrieved from https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Webinar%20Presentation%2009%2004%202020.pdf

Kementerian Agama RI. (2019). Statistik Data Pondok Pesantren. Retrieved from <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2020). Data Jumlah Penghuni per 4 Mei 2020. Retrieved from <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/all/date/2020-05-04>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2020). Daftar Nama Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tahun 2016-2020 per 14 Mei 2020 yang diterima dari Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2020). Data SIMFONI Report Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian, dan Bentuk Layanan, Basis Data Tanggal Kejadian Semester 1 s/d Semester 2 (2019-2020) per 14 Mei 2020 yang diterima dari Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi.

Kementerian Sosial RI. (2020). Data Jumlah Anak Dalam dan Luar Lembaga Kesejahteraan Anak Terlantar (Panti Asuhan Anak) Tahun 2020 per 14 Mei 2020 yang diterima dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

Kidd, S. (2017). Social exclusion and access to social protection schemes. *Journal of Development Effectiveness*, 9(2), 212-244. doi:10.1080/19439342.2017.1305982

Kusumaningrum, S., Bennouna, C., Siagian, C., & Agastya, N. L. P. M. (2016). Back to what counts: Birth and death in Indonesia. Jakarta, Indonesia: The Center on Child Protection Universitas Indonesia (PUSKAPA) in collaboration with the Ministry of National Development Planning (BAPPENAS) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Report.

LBH APIK Jakarta Catat KDRT Marak Terjadi saat Pandemi Corona. (2020, April 21). *CNN Indonesia*. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421114027-20-495587/lbh-apik-jakarta-catat-kdrt-marak-terjadi-saat-pandemi-corona>

The Lancet. (2020). Redefining vulnerability in the era of COVID-19. *The Lancet*, 395(10230). doi:10.1016/s0140-6736(20)30757-1

Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 4(6), 421. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30109-7](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30109-7)

Mas, Caroline. (2020, April 14). Pre-requisites to shift service delivery to remote (phone) GBV case management [Video file]. Retrieved from: <https://www.youtube.com/watch?v=v0CWf0KaLaw>

Memahami Anak Jalanan. (2019, 25 November). *Kompas*. Diambil dari: <https://kompas.id/baca/utama/2019/11/25/memahami-anak-jalanan/>

Mensos Dukung Pemulangan 67 Persen Anak Panti Asuhan ke keluarganya. (2018, 8 November). *Jawa Pos*.

Patunru, A. & Kusumaningrum, S. (2013). Child Domestic Workers (CDW) in Indonesia: *Case Studies of Jakarta and Greater Areas*. ILO. Research Report.

Pineda, V.S. & Corburn, J. (2020). *Disability, Urban Health Equity, and the Coronavirus Pandemic: Promoting Cities for All*. J Urban Health. <https://doi.org/10.1007/s11524-020-00437-7>

Plan International. (2020). *Living under Lockdown: Girls and COVID-19*. Woking, Surrey: Plan International Global Hub.

Popay, J. (2010). Understanding and tackling social exclusion. *Journal of Research in Nursing*, 15(4), 295-297. doi:10.1177/1744987110370529

PUSKAPA (2019). *Theory of Change and Program Logic*. Internal Document.

Rosenthal, D. M., Ucci, M., Heys, M., Hayward, A., & Lakhanpaul, M. (2020). Impacts of COVID-19 on vulnerable children in temporary accommodation in the UK. *Lancet Public Health*. doi:10.1016/S2468-2667(20)30080-3

Sample, Ian. Missed vaccinations could lead to other fatal outbreaks, doctors warn. (2020, April 26). The Guardian. Retrieved from: <https://www.theguardian.com/society/2020/apr/26/missed-vaccinations-could-lead-to-other-fatal-outbreaks-doctors-warn>

Schiariti, V. (2020). The human rights of children with disabilities during health emergencies: the challenge of COVID-19. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 62(6), 661. <https://doi.org/10.1111/dmcn.14526>

Sumner, C., & Kusumaningrum, S. (2014). *Indonesia's Missing Millions: A Baseline Study on Legal Identity*. DFAT. Jakarta, Indonesia. Report.

Sistovaris, M., Fallon, B., Miller, S., Birken, C., Denburg, A., Jenkins, J., Levine, J., Mishna, F., Sokolowski, M. and Stewart, S. (2020). *Child Welfare and Pandemics*. Toronto, Ontario: Policy Bench, Fraser Mustard Institute of Human Development, University of Toronto.

SMERU & SEKNAS PEKKA (2014). *Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga*. 2014

Smit, B., & Wandel, J. (2006). Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. *Global Environmental Change*, 16(3), 282-292. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008>

Suryahadi, A., Izzati, R.A., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU Working Paper (draft). Jakarta: The SMERU Research Institute.

Unicef. (2020). COVID-19 response: *Considerations for Children and Adults with Disabilities*. 2(Suppl 2), 1-5. Retrieved from: https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf

UNICEF. (2020). Over 13 million children did not receive any vaccines at all even before COVID-19 disrupted global immunization - UNICEF. Retrieved from UNICEF website: <https://www.unicef.org/press-releases/over-13-million-children-did-not-receive-any-vaccines-all-even-covid-19-disrupted>

United Nations. (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Children. UNICEF. (2020). Over 13 million children did not receive any vaccines at all even before COVID-19 disrupted global immunization - UNICEF. Retrieved from UNICEF website: <https://www.unicef.org/press-releases/over-13-million-children-did-not-receive-any-vaccines-all-even-covid-19-disrupted>

Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID-19: Increased vulnerability and reduced options for support. *International Journal of Mental Health Nursing*, 20 April. doi: <https://doi.org/10.1111/inm.12735>

Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: a social crisis in the making. *Lancet Public Health*. doi:10.1016/S2468-2667(20)30084-0

Wagner, K. D. (2020). Addressing the Experience of Children and Adolescents During the COVID-19 Pandemic. *J Clin Psychiatry*, 81(3). doi:10.4088/JCP.20ed13394

Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. *Lancet*, 395(10228), 945-947. doi:10.1016/S0140-6736(20)30547-X

Wang, W., Tensah, G., & Mallick, L. (2017). The impact of health insurance on maternal health care utilization: evidence from Ghana, Indonesia and Rwanda. *Health Policy Plan*, 32(3), 366-375. doi:10.1093/heapol/czw135

Wong, C. A., Ming, D., Maslow, G., & Gifford, E. J. (2020). Mitigating the Impacts of the COVID-19 Pandemic Response on At-Risk Children. *Pediatrics*. doi:10.1542/peds.2020-0973

Xie, X., Xue, Q., Zhou, Y., Zhu, K., Liu, Q., Zhang, J., & Song, R. (2020). Mental Health Status among Children in Home Confinement during the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in Hubei Province, China. *JAMA Pediatrics*, 7, 2-4. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.1619>

Zafar, Amina. Putting off kids' vaccines during COVID-19 heightens risk of other outbreaks. (2020, April 24), CBC News. Retrieved from: <https://www.cbc.ca/news/health/covid-19-child-immunizations-1.5543286>

Zimmermann, P., & Curtis, N. (2020). Coronavirus Infections in Children Including COVID-19: An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children. *Pediatr Infect Dis J*, 39(5), 355-368. doi:10.1097/INF.0000000000002660

643 Kekerasan ke Perempuan dan Anak Selama Pandemi Covid-19. (2020, April 29), *Media Indonesia*. Retrieved from: <https://mediaindonesia.com/read/detail/308723-643-kekerasan-ke-perempuan-dan-anak-selama-pandemi-covid-19>

LAMPIRAN

Lampiran 1.
Estimasi Rumah Tangga Sangat Miskin dan Miskin (Kuintil 1 dan 2) yang Mengasuh Anak

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah RT dengan anggota anak di bawah-18 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan anggota anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT dengan anggota anak di bawah-1 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	405.896	185.836	481.869	230.154	132.963	142.407	60.468	29.869	31.323
Bali	207.237	3.353.127	207.053	102.717	57.773	60.050	23.961	14.465	9.594
Bangka Belitung	23.244	2.593.859	26.211	13.663	8.153	8.149	3.753	1.988	1.821
Banten	629.925	2.630.823	712.508	345.528	193.714	214.121	91.672	43.222	49.196
Bengkulu	153.983	761.022	150.338	72.928	42.393	40.963	16.699	7.737	9.101
DI Yogyakarta	262.163	656.835	207.839	114.690	66.234	58.278	22.305	10.524	11.781
DKI Jakarta	162.814	741.691	181.782	95.115	58.443	58.223	22.519	12.042	11.316
Gorontalo	113.847	217.044	117.123	58.795	35.009	35.234	12.431	5.319	7.686
Jambi	270.173	329.261	260.769	133.253	74.820	76.433	30.543	13.208	17.401
Jawa Barat	3.655.589	276.663	3.560.123	1.794.053	988.426	986.805	395.544	198.066	205.462
Jawa Tengah	3.130.367	489.368	2.782.774	1.425.650	782.478	789.411	328.712	166.814	164.547
Jawa Timur	3.295.454	196.310	2.702.887	1.361.962	720.167	739.888	301.631	154.029	148.231
Kalbar	366.941	95.969	401.571	204.492	122.250	121.814	52.900	27.714	26.078
Kalsel	225.495	142.180	233.416	112.859	61.507	66.895	29.110	13.909	15.309
Kalteng	146.334	1.275.914	154.033	79.503	41.718	49.765	17.738	8.075	10.031

Kaltim	88.360	461.308	96.281	44.469	28.199	26.736	8.539	3.884	4.656
Kalut	16.457	23.332	24.299	9.690	6.376	6.881	2.667	932	1.735
Kep. Riau	55.812	144.326	67.369	30.591	18.687	20.825	6.835	3.081	3.853
Lampung	815.796	217.822	759.102	395.580	216.463	221.776	88.019	51.358	37.033
Maluku	118.789	113.317	183.267	72.121	51.390	52.887	20.029	10.970	9.557
Maluku Utara	81.245	256.787	117.268	50.210	32.267	34.242	11.830	6.896	5.625
NTB	544.780	388.483	511.629	271.867	146.864	149.649	64.738	28.310	37.473
NTT	603.449	18.920	796.364	346.948	217.947	233.582	89.844	43.967	48.977
Papua	231.729	68.104	290.569	115.281	78.778	78.348	25.578	13.600	12.685
Papua Barat	52.195	724.453	71.951	29.449	19.757	20.626	8.359	4.357	4.177
Riau	342.403	173.652	410.297	199.024	115.551	125.336	52.577	24.549	28.365
Sulbar	143.088	108.066	167.721	80.994	50.323	52.538	20.972	9.845	11.299
Sulsel	691.077	770.408	778.156	365.580	219.741	221.726	90.675	47.011	46.252
Sulteng	258.451	68.899	283.534	136.975	83.491	83.873	36.602	17.794	19.067
Sultra	234.174	396.407	302.961	136.141	85.741	91.554	40.529	19.400	21.906
Sulut	174.648	161.907	179.140	87.068	50.104	53.555	21.760	11.509	10.684
Sumbang	282.009	284.969	365.679	165.469	99.099	107.977	41.719	19.669	22.051
Sumsel	749.797	280.551	765.206	373.110	210.330	208.698	77.808	40.046	38.127
Sumut	990.711	172.123	1.318.157	555.249	355.043	380.022	132.870	63.599	70.775
Indonesia	19.524.432	18.779.737	19.669.247	9.611.178	5.472.201	5.619.267	2.251.938	1.127.758	1.153.171

Lampiran 2.
Estimasi Rumah Tangga Sangat Miskin dan Miskin (Kuintil 1 dan 2) yang Mengasuh Lansia dan Difabel (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT dengan anggota lansia	Jumlah lansia perempuan di kolom 1	Jumlah lansia laki-laki di kolom	Jumlah RT dengan anggota difabel	Jumlah perempuan difabel di kolom 4	Jumlah laki-laki difabel di kolom 4
Aceh	114.997	76.444	65.042	209.581	154.976	114.432
Bali	111.765	90.012	70.869	116.074	78.104	65.649
Bangka Belitung	7.064	5.273	4.572	11.938	7.125	8.986
Banten	177.002	123.502	92.344	290.488	202.788	181.515
Bengkulu	40.229	28.033	24.687	63.552	42.967	39.438
DI Yogyakarta	189.533	146.904	117.607	161.380	102.946	90.137
DKI Jakarta	31.352	17.404	18.358	86.852	61.729	54.279
Gorontalo	34.202	23.971	21.401	68.219	49.275	40.136
Jambi	74.068	49.015	44.152	105.868	67.757	63.329
Jawa Barat	1.463.310	1.040.010	917.085	1.954.747	1.338.070	1.117.949
Jawa Tengah	1.812.128	1.324.221	1.113.515	1.808.241	1.195.079	1.011.467
Jawa Timur	1.997.178	1.434.893	1.189.142	1.866.726	1.268.227	1.003.545
Kalbar	112.170	77.100	71.004	189.976	130.432	119.183
Kalsel	73.589	53.358	37.368	107.524	73.237	56.688
Kalteng	34.064	23.099	19.766	63.852	43.128	40.797
Kaltim	24.679	13.792	17.722	51.301	32.677	34.973

Kalut	5.919	3.537	3.489	13.550	8.464	9.410
Kep. Riau	10.447	6.347	6.675	21.433	14.787	13.546
Lampung	278.756	185.560	178.745	352.635	228.975	212.916
Maluku	33.751	22.871	21.266	64.994	43.525	42.818
Maluku Utara	21.176	13.998	13.999	39.544	28.092	27.698
NTB	186.931	129.779	108.085	266.736	184.162	139.058
NTT	195.996	133.876	122.474	364.581	259.720	243.025
Papua	27.696	15.138	19.133	59.711	42.805	44.160
Papua Barat	9.942	5.463	7.065	24.022	16.671	17.680
Riau	80.267	52.680	49.622	187.823	129.257	130.118
Sulbar	41.192	29.372	23.091	70.112	46.943	43.256
Sulsel	290.961	221.999	165.104	451.944	335.201	253.697
Sulteng	79.871	54.182	50.313	157.423	109.972	96.849
Sultra	63.082	46.543	36.592	103.326	71.535	61.303
Sulut	62.849	45.693	40.145	90.774	62.551	58.285
Sumbar	103.441	75.711	53.070	177.919	133.935	92.537
Sumsel	210.567	145.101	128.881	333.431	228.608	206.222
Sumut	253.257	179.075	142.266	420.052	294.898	244.215
Indonesia	8.253.431	5.893.957	4.994.648	10.356.329	7.088.619	5.979.295

Lampiran 3.
Estimasi Rumah Tangga yang Mengasuh Anak dengan Kepala Keluarga Hanya Ayah/Ibu (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah RT dengan hanya ayah/ibu yang mengasuh anak di bawah-18 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan hanya ayah/ibu yang mengasuh anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT dengan hanya ayah/ibu yang mengasuh anak di bawah-1 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	148.156	121.957	129.213	59.948	35.783	34.288	14.479	8.134	6.349
Bali	54.563	42.719	39.956	14.746	8.856	9.272	2.016	1.120	1.187
Bangka Belitung	22.458	15.637	17.643	6.779	3.449	4.328	1.092	680	412
Banten	266.221	209.925	226.647	106.395	61.591	64.729	25.233	17.156	9.673
Bengkulu	30.864	24.412	23.144	9.704	5.686	5.108	2.824	1.157	1.805
DI Yogyakarta	93.691	67.644	63.933	26.943	16.084	13.765	6.187	2.245	3.942
DKI Jakarta	236.016	197.601	193.395	91.049	59.265	51.768	27.619	12.610	15.847
Gorontalo	26.404	20.352	23.506	8.076	3.256	6.107	1.185	348	838
Jambi	73.020	53.770	58.824	27.527	15.435	15.702	9.211	4.484	4.821
Jawa Barat	1.047.617	762.141	833.093	312.353	170.343	174.126	57.300	30.310	27.465
Jawa Tengah	961.275	687.632	746.941	324.445	165.267	192.208	81.414	41.487	40.639
Jawa Timur	1.135.510	798.300	864.118	361.485	193.620	202.750	88.352	43.681	44.924
Kalbar	107.418	92.942	100.330	46.115	25.257	29.716	12.663	5.395	7.269
Kalsel	103.192	69.769	88.377	29.179	15.978	18.690	6.243	2.772	3.471
Kalteng	43.334	32.763	33.510	12.693	6.786	7.347	3.785	1.785	2.100

Kaltim	67.656	50.233	59.346	20.831	11.221	13.837	3.925	1.178	2.747
Kalut	14.075	13.391	13.221	5.002	3.535	3.105	1.475	419	1.056
Kep. Riau	35.042	28.162	29.587	10.915	6.382	6.409	1.051	733	318
Lampung	177.921	130.266	149.006	57.286	29.609	31.993	11.532	6.386	5.236
Maluku	48.078	49.635	52.300	20.325	13.237	14.398	3.828	1.613	2.216
Maluku Utara	25.293	23.553	24.692	11.753	7.086	7.093	2.335	1.608	727
NTB	245.811	186.138	198.398	83.611	44.912	43.748	14.331	7.909	6.601
NTT	177.746	173.768	185.096	67.100	37.700	42.731	14.274	7.915	6.716
Papua	64.799	60.400	60.139	19.348	14.081	10.839	5.723	2.666	3.138
Papua Barat	21.675	18.832	23.058	7.539	4.548	5.372	2.015	947	1.069
Riau	116.155	99.889	95.777	43.166	26.559	23.469	11.295	6.345	4.949
Sulbar	28.999	24.478	26.696	10.565	6.125	6.453	2.678	1.674	1.003
Sulsel	264.046	241.481	247.066	106.305	63.601	65.818	29.028	15.536	14.466
Sulteng	70.072	59.571	61.743	25.483	15.388	15.007	7.185	4.368	2.817
Sultra	64.554	65.858	64.151	25.121	15.137	17.623	5.374	2.355	3.157
Sulut	59.002	46.068	44.235	19.749	11.305	11.067	4.239	2.009	2.231
Sumbar	116.088	106.658	105.233	41.983	25.184	25.806	9.541	4.620	4.988
Sumsel	169.412	129.886	147.217	62.102	37.299	36.988	16.381	7.281	9.099
Sumut	343.346	318.211	311.303	121.976	75.392	68.990	25.696	12.564	13.517
Indonesia	6.459.509	5.024.041	5.340.893	2.197.597	1.234.956	1.280.652	511.509	261.493	256.793

Lampiran 4.
Estimasi Rumah Tangga yang Mengasuh Anak dengan Kepala Keluarga Perempuan (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah RT dengan kepala keluarga perempuan yang mengasuh anak di bawah-18 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan kepala keluarga perempuan yang mengasuh anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT dengan kepala keluarga perempuan yang mengasuh anak di bawah-1 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	127.332	106.756	109.236	51.495	30.691	29.514	13.207	7.354	5.858
Bali	33.185	26.459	22.318	10.104	5.469	6.670	1.167	317	850
Bangka Belitung	14.612	11.102	10.661	4.636	2.750	2.737	691	520	171
Banten	197.515	161.905	164.396	79.614	48.223	47.169	20.267	13.393	7.168
Bengkulu	22.398	18.417	16.157	7.051	4.532	3.365	1.804	987	817
DI Yogyakarta	67.911	51.992	44.004	19.614	12.879	9.474	4.966	2.013	2.953
DKI Jakarta	179.412	152.340	146.715	67.245	43.863	38.449	21.799	9.249	13.388
Gorontalo	19.661	13.864	17.999	6.803	2.842	5.176	1.066	275	791
Jambi	55.324	41.578	42.949	21.551	13.110	11.747	6.946	3.639	3.401
Jawa Barat	737.928	544.810	597.544	225.729	122.834	124.808	42.842	20.853	21.990
Jawa Tengah	673.918	499.591	520.578	244.201	131.723	139.453	64.079	32.005	32.786
Jawa Timur	830.562	593.746	641.146	274.174	139.619	161.810	74.720	35.832	39.140
Kalbar	78.641	70.262	70.758	34.185	20.491	20.119	9.964	4.706	5.258
Kalsel	73.678	50.035	64.435	20.607	11.177	13.543	4.727	2.095	2.632

Kalteng	28.725	23.569	22.585	9.203	4.696	5.729	3.210	1.718	1.592
Kaltim	43.271	34.072	36.056	14.631	7.621	8.917	3.406	1.056	2.350
Kalut	7.736	7.456	6.831	2.907	2.029	2.031	1.110	417	692
Kep. Riau	25.103	20.682	22.167	7.923	5.149	4.221	565	369	196
Lampung	119.884	90.632	98.465	40.918	21.706	22.189	10.081	5.123	4.958
Maluku	32.711	35.727	35.536	13.904	9.990	9.271	2.732	1.075	1.657
Maluku Utara	16.761	15.501	15.795	7.084	4.539	4.092	1.704	1.146	559
NTB	206.118	153.422	168.045	72.005	38.698	36.789	13.003	7.551	5.452
NTT	130.971	132.146	137.195	49.027	27.809	30.811	10.556	5.836	4.892
Papua	41.278	38.154	37.713	13.102	9.303	7.153	3.572	2.022	1.631
Papua Barat	13.211	11.951	14.088	4.848	3.203	3.391	1.122	589	535
Riau	87.409	78.511	69.497	32.584	19.745	17.110	8.124	4.180	3.944
Sulbar	21.877	18.580	21.042	8.309	4.589	5.663	2.357	1.423	935
Sulsel	205.702	188.601	196.092	82.185	50.124	51.274	22.097	12.419	10.737
Sulteng	45.874	40.267	40.928	18.328	10.496	11.605	5.681	2.996	2.685
Sultra	48.387	52.278	45.873	19.101	11.408	12.300	4.615	1.951	2.802
Sulut	41.599	32.873	32.840	15.156	8.276	8.813	3.694	1.716	1.978
Sumbar	95.411	91.125	86.089	35.243	21.655	21.202	7.423	3.949	3.542
Sumsel	122.285	97.627	107.646	46.881	27.411	28.636	11.595	4.976	6.619
Sumut	275.328	254.927	245.063	96.840	59.268	55.494	21.499	10.229	11.656
Indonesia	4.721.718	3.760.960	3.908.444	1.657.188	937.918	960.727	406.391	203.977	206.616

Lampiran 6.
Estimasi Rumah Tangga yang Mengasuh Anak dengan Kepala Keluarga Lansia (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah RT dengan kepala keluarga lansia yang mengasuh anak di bawah-18 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan kepala keluarga lansia yang mengasuh anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT dengan kepala keluarga lansia yang mengasuh anak di bawah-1 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	103.655	88.608	86.885	47.211	30.414	29.833	14.557	6.401	8.160
Bali	61.454	49.631	58.447	27.887	14.174	19.844	6.774	4.035	2.817
Bangka Belitung	22.192	18.112	15.209	9.234	5.524	4.750	2.696	1.559	1.136
Banten	222.496	167.101	189.497	92.937	58.318	50.597	17.985	11.030	7.249
Bengkulu	27.956	22.714	19.683	12.675	7.213	7.057	3.249	1.573	1.815
DI Yogyakarta	99.178	70.037	75.159	43.038	23.919	23.414	7.485	2.732	4.752
DKI Jakarta	159.648	133.358	140.449	79.458	52.021	43.664	25.538	14.066	12.034
Gorontalo	22.392	18.423	19.771	8.922	5.504	5.357	1.928	876	1.052
Jambi	59.436	38.701	49.567	24.628	11.821	15.678	6.244	2.753	3.491
Jawa Barat	891.234	662.137	693.284	307.583	165.289	166.420	57.289	30.171	28.574
Jawa Tengah	981.654	722.076	765.327	434.457	223.093	262.134	110.550	48.942	62.780
Jawa Timur	1.083.817	767.529	815.321	424.653	231.443	238.132	101.640	55.279	46.388
Kalbar	99.956	91.091	89.287	52.797	30.997	32.382	13.207	6.997	6.774
Kalsel	65.549	44.275	51.979	21.697	10.987	14.784	6.118	2.769	3.348

Kalteng	33.437	23.240	31.233	14.277	7.688	8.631	4.369	1.470	2.899
Kaltim	56.332	48.469	50.304	24.338	14.469	16.136	4.876	2.573	2.303
Kalut	12.393	12.195	12.601	5.743	4.165	3.266	2.047	1.058	990
Kep. Riau	20.193	14.932	18.569	8.708	5.018	4.925	2.158	1.134	1.122
Lampung	173.186	126.584	131.317	72.794	40.324	39.033	18.118	10.372	7.746
Maluku	41.939	45.138	48.732	19.638	12.854	13.318	4.495	1.944	2.664
Maluku Utara	27.331	25.889	29.993	13.568	8.485	9.236	2.691	1.216	1.644
NTB	104.838	78.205	79.805	29.478	16.950	15.445	5.962	2.587	3.375
NTT	139.048	141.368	145.512	67.607	43.489	48.139	20.838	10.387	11.250
Papua	33.234	34.165	37.584	13.298	9.134	10.876	5.180	2.525	2.689
Papua Barat	13.982	13.704	15.582	6.754	4.028	5.131	3.073	1.903	1.310
Riau	100.666	87.231	80.771	43.572	25.609	23.861	13.269	8.604	4.665
Sulbar	26.795	24.407	27.360	12.931	7.589	9.010	4.055	2.117	2.110
Sulsel	233.437	212.054	212.541	107.160	69.082	61.786	30.368	16.033	15.069
Sulteng	68.446	55.079	64.434	30.093	17.720	20.865	9.032	4.155	4.877
Sultra	55.644	52.206	50.363	23.788	16.062	15.439	7.633	3.692	3.941
Sulut	63.032	49.195	55.775	27.714	13.815	16.992	6.410	3.758	2.928
Sumbar	121.193	108.922	119.255	59.755	33.964	42.134	16.893	7.990	8.903
Sumsel	149.971	111.838	123.650	61.771	34.831	39.579	18.763	10.628	8.728
Sumut	266.643	248.993	242.652	120.456	73.748	76.316	28.328	16.008	14.295
Indonesia	5.642.357	4.407.608	4.647.895	2.350.620	1.329.741	1.394.165	583.818	299.336	293.880

Lampiran 7.
Estimasi Rumah Tangga yang Mengasuh Anak dengan Kepala Keluarga Berusia Anak (Susenas 2018)¹

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT dengan kepala keluarga berusia anak yang mengasuh anak di bawah-18 tahun	Jumlah anak di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan kepala keluarga berusia anak yang mengasuh anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak di bawah-5 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan kepala keluarga berusia anak yang mengasuh anak di bawah-1 tahun	Jumlah anak di bawah-1 tahun di kolom 1
Aceh	1.261	1.382				
Bali	2.050	2.685				
Bangka Belitung	86	86				
Banten	632	632				
Bengkulu	677	782				
DI Yogyakarta	5.276	5.462				
DKI Jakarta	800	800				
Gorontalo	164	164				
Jambi	749	1.334				
Jawa Barat	5.485	8.130	350	350		
Jawa Tengah	7.889	9.758				
Jawa Timur	14.146	31.249	804	804	804	804
Kalbar	1.486	2.459				
Kalsel	2.213	3.064				
Kalteng	955	1.466				
Kaltim	677	907				

Kalut	133	133				
Kep. Riau	88	88				
Lampung	2.706	3.839				
Maluku	982	1.107				
Maluku Utara	51	133				
NTB	5.360	8.614	1.032	1.032	281	281
NTT	2.889	4.269				
Papua	1.061	1.464	118	118	17	17
Papua Barat	248	470	108	216	108	108
Riau	1.632	3.432				
Sulbar	729	1.555				
Sulsel	3.166	4.239				
Sulteng	1.643	2.283	44	44	44	44
Sultra	1.456	1.713				
Sulut	771	845				
Sumbar	3.444	5.929	151	151	151	151
Sumsel	2.123	3.314	353	353	353	353
Sumut	4.785	8.989				
Indonesia	77.813	122.776	2.960	3.068	1.758	1.758

¹Tingkat prediksi untuk mengestimasi rumah tangga dengan anak di bawah-5 tahun dan di bawah-1 tahun sangat rendah

Lampiran 8.
Estimasi Rumah Tangga dengan Anak Tanpa Identitas Hukum (Susenas 2018)²

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah anak dengan anak di bawah-18 tahun tanpa akta kelahiran	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan anak di bawah-5 tahun tanpa akta kelahiran	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT dengan anak di bawah-1 tahun tanpa akta kelahiran	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	165.816	107.420	122.404	123.101	64.643	70.374	50.651	24.125	27.272
Bali	87.622	59.409	55.213	67.177	38.730	34.638	33.535	19.404	14.368
Bangka Belitung	18.718	9.656	12.762	14.670	6.914	8.460	6.166	2.377	3.789
Banten	607.913	444.756	516.770	365.528	197.454	206.421	128.287	68.205	63.561
Bengkulu	48.134	27.737	31.329	35.388	17.798	19.426	16.236	7.142	9.233
DI Yogyakarta	20.789	11.076	13.751	16.675	7.558	9.117	9.836	5.073	4.763
DKI Jakarta	92.799	52.840	56.373	78.409	38.233	45.580	45.065	17.426	27.638
Gorontalo	28.470	16.667	21.443	24.189	12.247	14.924	10.922	4.634	6.532
Jambi	78.850	48.345	55.083	57.082	28.822	32.578	26.694	11.648	15.047
Jawa Barat	1.889.573	1.354.365	1.483.960	1.110.412	578.907	620.984	419.444	205.326	221.544
Jawa Tengah	477.486	285.761	308.978	311.837	162.569	164.517	152.969	78.723	75.116
Jawa Timur	1.069.105	704.879	747.990	628.872	327.955	333.020	255.029	126.134	129.052
Kalbar	204.439	143.273	157.354	140.502	74.072	78.511	50.850	28.581	22.499
Kalsel	117.373	71.421	79.976	81.409	44.664	43.884	38.899	20.345	18.854
Kalteng	102.684	70.989	79.354	68.825	35.432	39.846	25.335	11.992	13.343
Kaltim	67.756	43.314	44.429	51.773	29.003	28.199	23.579	10.679	12.901

Kalut	17.610	11.927	12.727	14.012	8.388	7.776	7.109	3.127	3.981
Kep. Riau	39.845	25.109	26.339	31.498	17.262	20.299	12.525	7.402	5.221
Lampung	247.689	149.865	169.679	167.972	84.730	95.433	66.221	34.225	33.109
Maluku	105.014	86.733	92.729	85.034	54.207	55.750	28.945	15.429	14.094
Maluku Utara	65.027	52.426	59.660	48.166	28.146	30.092	16.605	8.571	8.440
NTB	271.397	170.288	174.869	186.536	96.125	102.398	67.150	30.455	37.901
NTT	477.580	449.805	464.770	329.683	203.832	209.603	105.057	53.223	55.118
Papua	368.710	354.895	394.454	179.280	111.786	114.699	40.124	20.587	20.316
Papua Barat	53.783	47.675	48.961	37.992	23.828	23.431	15.223	8.396	6.842
Riau	355.658	264.021	295.276	245.816	136.966	142.219	91.022	46.965	44.057
Sulbar	53.350	37.665	37.876	41.595	23.395	23.691	18.214	8.083	10.303
Sulsel	275.818	189.100	187.309	208.444	118.927	114.011	88.969	45.499	45.402
Sulteng	165.688	127.370	136.786	114.900	64.207	69.281	41.472	19.768	21.846
Sultra	122.914	90.995	94.661	96.952	54.749	57.462	40.334	20.429	20.410
Sulut	77.662	52.558	55.459	59.595	32.355	37.587	24.676	11.687	13.458
Sumbar	181.962	130.468	141.910	130.997	70.237	76.800	56.216	26.949	29.490
Sumsel	233.291	130.686	179.732	162.469	76.820	97.821	69.635	34.265	36.603
Sumut	824.589	725.556	738.857	551.590	344.953	333.133	202.328	98.784	107.517
Indonesia	9.015.114	6.549.050	7.099.225	5.868.380	3.215.913	3.361.964	2.285.322	1.135.657	1.179.622

² Berdasarkan pertanyaan "Apakah (nama) mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)?" atau "Apakah (nama) memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil?" pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018.

Lampiran 9.
Estimasi Rumah Tangga dengan Lansia dan Difabel Tanpa Identitas Hukum (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT dengan lansia tanpa NIK	Jumlah lansia perempuan di kolom 1	Jumlah lansia laki-laki di kolom 1	Jumlah RT dengan difabel tanpa NIK	Jumlah perempuan difabel di kolom 4	Jumlah laki-laki difabel di kolom 4
Aceh	7.698	6.225	1.486	14.344	9.632	4.712
Bali	8.328	6.039	2.985	10.853	6.008	4.845
Bangka Belitung	4.173	2.523	2.184	4.315	1.880	2.435
Banten	63.944	46.805	19.343	99.196	59.785	39.410
Bengkulu	14.808	10.623	4.866	18.324	11.767	6.556
DI Yogyakarta	3.490	3.396	600	4.212	2.944	1.268
DKI Jakarta	13.708	9.335	4.665	29.060	16.170	12.890
Gorontalo	2.299	1.174	1.155	3.880	2.112	1.768
Jambi	24.981	16.028	10.877	30.425	19.003	11.422
Jawa Barat	240.024	186.006	90.977	296.406	179.993	116.413
Jawa Tengah	140.291	107.612	44.111	140.695	94.578	46.118
Jawa Timur	183.750	135.157	55.957	179.323	119.547	59.776
Kalbar	21.321	14.926	9.093	33.715	17.827	15.888
Kalsel	2.870	2.520	524	6.931	4.801	2.129
Kalteng	9.539	5.751	3.651	18.006	8.473	9.533
Kaltim	5.870	1.638	3.870	9.001	3.074	5.927

Kalut	980	496	373	3.584	1.900	1.683
Kep. Riau	4.693	2.515	1.179	13.321	7.618	5.703
Lampung	41.821	32.088	11.772	49.125	31.508	17.618
Maluku	15.436	11.166	5.245	29.451	15.911	13.540
Maluku Utara	9.911	6.356	3.784	19.082	10.417	8.665
NTB	17.858	11.363	7.206	20.134	11.891	8.243
NTT	47.520	33.997	17.925	103.889	57.934	45.956
Papua	28.983	10.954	13.613	92.779	45.406	47.372
Papua Barat	4.427	2.477	1.934	14.226	6.517	7.709
Riau	30.938	22.657	8.015	69.667	39.622	30.045
Sulbar	4.460	2.694	1.608	7.958	4.925	3.032
Sulsel	28.280	22.931	8.246	44.678	27.664	17.014
Sulteng	21.565	13.570	9.338	40.629	21.484	19.146
Sultra	3.009	2.367	915	7.391	4.739	2.653
Sulut	17.768	11.483	8.670	24.559	12.887	11.672
Sumbar	32.358	21.910	13.769	40.495	24.031	16.464
Sumsel	49.171	32.775	21.111	67.331	39.673	27.658
Sumut	90.658	58.586	36.565	127.231	74.724	52.507
Indonesia	1.196.930	856.141	427.613	1.674.216	996.443	677.770

Lampiran 10.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Air Bersih yang di Dalamnya Terdapat Anak (Susenas 2018)³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah RT tanpa air bersih dengan anak di bawah-18 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT tanpa air bersih dengan anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT tanpa air bersih anak di bawah-1 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	670.077	673.935	703.054	353.885	202.757	212.653	85.414	42.522	43.808
Bali	356.055	300.298	309.525	156.738	86.257	91.643	36.730	20.472	16.835
Bangka Belitung	212.981	182.336	185.424	93.224	53.179	50.836	18.432	9.001	9.610
Banten	1.828.287	1.595.078	1.656.618	849.759	475.868	484.098	205.299	105.314	104.373
Bengkulu	241.277	202.835	214.695	104.836	59.008	57.802	23.380	10.737	12.899
DI Yogyakarta	269.816	211.833	216.029	113.856	60.380	65.878	24.265	11.916	13.202
DKI Jakarta	1.423.076	1.207.282	1.259.339	647.979	372.065	376.599	150.202	71.225	80.611
Gorontalo	137.188	124.956	127.040	64.161	35.920	38.931	14.259	6.414	8.324
Jambi	388.868	336.232	341.725	173.119	95.457	97.972	38.995	19.397	19.663
Jawa Barat	6.609.017	5.436.961	5.682.998	2.947.501	1.580.719	1.666.052	647.235	322.118	337.406
Jawa Tengah	2.900.322	2.229.296	2.460.879	1.183.700	614.819	668.180	266.930	131.392	137.386
Jawa Timur	3.970.852	2.979.047	3.152.845	1.508.347	783.606	866.943	331.825	158.211	176.176
Kalbar	400.250	363.152	376.553	182.387	105.410	102.607	43.886	25.538	19.229
Kalsel	479.898	401.995	414.899	214.624	121.338	120.113	48.047	23.354	25.149
Kalteng	354.314	303.076	315.450	161.197	88.526	90.930	35.965	18.160	18.759
Kaltim	502.057	442.819	457.585	230.717	131.488	138.553	50.639	22.756	27.884

Kalut	94.017	95.387	96.344	48.131	29.422	30.150	12.371	6.198	6.366
Kep. Riau	323.407	300.520	308.573	163.283	86.347	104.569	31.452	17.523	14.102
Lampung	1.059.585	890.235	928.887	468.969	257.954	254.859	99.710	55.432	45.126
Maluku	136.489	152.919	166.080	71.346	42.725	51.132	17.590	8.272	9.686
Maluku Utara	111.446	120.853	124.304	58.181	35.453	37.505	13.429	6.867	6.894
NTB	521.743	427.108	443.921	230.709	125.440	125.486	51.838	23.336	29.150
NTT	336.327	396.696	400.860	177.932	118.974	112.820	47.345	23.422	25.317
Papua	366.767	362.620	394.167	156.895	96.485	100.524	34.348	19.215	15.935
Papua Barat	101.834	104.036	108.312	52.358	32.019	33.723	13.657	7.371	6.337
Riau	802.138	750.400	799.181	413.119	229.471	250.402	98.393	49.096	49.761
Sulbar	152.105	153.877	164.264	74.686	44.645	47.142	18.411	8.307	10.277
Sulsel	818.438	803.175	852.213	394.310	229.309	245.427	96.524	48.475	49.720
Sulteng	328.113	306.692	321.416	153.300	89.861	93.381	39.400	20.913	18.789
Sultra	234.736	239.302	255.041	121.681	73.092	77.694	33.822	18.429	15.962
Sulut	287.450	245.691	258.365	124.958	68.752	74.505	31.759	15.626	16.775
Sumbar	624.323	642.191	652.091	312.725	177.236	195.017	73.542	35.670	38.198
Sumsel	789.491	707.477	728.210	364.470	205.094	204.560	76.340	39.672	37.033
Sumut	1.570.439	1.649.597	1.727.360	759.864	462.885	488.349	198.555	90.641	110.708
Indonesia	29.403.183	25.339.910	26.604.248	13.132.947	7.271.958	7.657.036	3.009.989	1.492.992	1.557.449

³ Berdasarkan pertanyaan "Apa sumber air utama yang digunakan RT untuk minum?" & "Berapa jarak sumber air utama ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat?" pada kuesioner VSEN.18K-SUSENAS 2018.

Lampiran 11.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Air Bersih yang di Dalamnya Terdapat Lansia dan Difabel (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT tanpa air bersih dengan anggota lansia	Jumlah lansia perempuan di kolom 1	Jumlah lansia laki-laki di kolom 1	Jumlah RT tanpa air bersih dengan anggota difabel	Jumlah perempuan difabel di kolom 4	Jumlah laki-laki difabel di kolom 4
Aceh	198.876	124.951	113.398	336.759	241.371	186.707
Bali	125.054	91.252	81.206	141.159	88.056	86.196
Bangka Belitung	54.455	36.837	33.494	102.549	71.396	63.196
Banten	453.048	275.415	273.285	780.005	526.848	492.264
Bengkulu	68.682	43.516	44.055	110.755	73.307	66.044
DI Yogyakarta	133.938	94.640	77.879	131.690	83.203	72.974
DKI Jakarta	462.179	306.034	286.422	819.336	584.454	495.629
Gorontalo	43.419	28.899	26.921	88.072	62.230	52.130
Jambi	99.396	63.044	60.587	147.250	99.202	88.267
Jawa Barat	2.163.924	1.413.490	1.351.644	2.954.040	1.982.546	1.689.057
Jawa Tengah	1.443.174	995.818	855.009	1.568.783	1.038.789	854.656
Jawa Timur	1.957.762	1.337.488	1.159.994	1.991.698	1.331.089	1.074.889
Kalbar	104.622	65.412	67.445	169.139	111.419	107.229
Kalsel	130.504	82.839	75.502	196.811	123.914	115.600
Kalteng	75.421	45.279	48.222	164.743	106.795	110.581
Kaltim	117.357	64.257	79.368	222.581	137.194	146.814

Kalut	23.912	13.176	17.490	49.943	31.909	35.590
Kep. Riau	49.638	32.550	28.979	133.385	85.225	86.205
Lampung	327.546	202.742	208.680	449.395	291.014	281.973
Maluku	39.735	26.331	24.788	73.530	49.911	45.415
Maluku Utara	28.114	18.451	17.891	55.520	38.246	36.837
NTB	150.568	103.418	88.443	235.060	155.714	128.060
NTT	107.689	69.164	68.151	208.299	146.234	136.365
Papua	53.635	26.828	38.753	101.545	68.549	73.142
Papua Barat	19.967	11.944	12.817	55.155	37.025	39.888
Riau	155.214	92.794	100.517	391.758	269.197	262.380
Sulbar	41.386	28.516	23.929	76.195	50.171	47.272
Sulsel	312.977	223.080	178.182	497.249	358.607	282.339
Sulteng	100.920	64.825	64.815	198.124	139.418	120.796
Sultra	59.225	37.709	37.986	97.129	65.247	56.034
Sulut	115.633	80.519	75.198	151.087	101.895	97.725
Sumbar	230.125	158.608	136.580	396.833	290.753	229.449
Sumsel	241.432	159.130	153.225	366.245	251.296	223.721
Sumut	472.908	319.176	278.327	733.478	517.026	433.322
Indonesia	10.162.235	6.738.133	6.189.182	14.195.300	10.162.236	8.318.749

Lampiran 12.

Estimasi Rumah Tangga Tanpa Listrik yang di Dalamnya Terdapat Anak (Susenas 2018)⁴

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah RT tanpa listrik dengan anak di bawah-18 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT tanpa listrik dengan anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT tanpa listrik dengan anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	2.874	2.436	3.008	1.283	772	797	659	451	208
Bali	296		296						
Bangka Belitung	538	438	101	382	347	35	89	89	
Banten	4.918	6.056	7.802	1.444	524	920			
Bengkulu	7.190	5.986	6.008	3.437	1.930	1.544	748	535	213
DI Yogyakarta	348	348	348						
DKI Jakarta									
Gorontalo	5.600	3.285	5.495	3.002	1.039	2.422	508	121	387
Jambi	14.287	11.206	13.612	7.919	4.262	4.228	1.285	829	457
Jawa Barat	2.694	470	2.694	735		735			
Jawa Tengah	1.280	1.349	2.315	448		448			
Jawa Timur	5.325	2.263	4.423	710		710			
Kalbar	59.570	52.362	58.106	25.707	14.599	13.882	5.851	2.767	3.084
Kalsel	2.799	2.262	3.577	1.425	1.160	751	299	299	
Kalteng	14.297	12.715	14.414	7.343	3.307	5.037	1.476	552	924
Kaltim	2.499	1.553	2.095	972	534	623	255		255

Kalut	1.629	1.397	1.019	614	539	149	304	304	
Kep. Riau	1.633	1.783	1.195	503	569	309	119	119	
Lampung	6.208	4.769	5.368	2.114	1.054	1.094	836	443	393
Maluku	22.737	29.688	28.662	13.513	9.866	10.081	3.709	2.110	1.685
Maluku Utara	10.116	12.514	13.752	6.123	3.368	4.111	1.472	892	581
NTB	2.700	2.474	2.514	905	358	547	512		512
NTT	163.928	199.443	204.817	91.483	60.779	57.162	25.057	13.378	12.326
Papua	200.649	191.558	230.650	75.425	43.304	51.725	10.281	5.608	4.909
Papua Barat	12.604	15.057	15.367	6.011	4.254	4.478	1.842	973	874
Riau	27.138	24.591	29.043	12.889	6.984	8.193	2.598	1.308	1.291
Sulbar	7.957	10.019	7.369	4.032	3.671	1.815	1.025	788	237
Sulsel	12.576	12.622	15.038	6.050	3.616	3.358	1.755	962	793
Sulteng	23.804	23.659	26.267	12.866	7.986	8.369	2.878	1.328	1.550
Sultra	6.378	6.267	6.580	3.260	2.466	1.605	1.207	1.047	160
Sulut	1.381	728	1.266	484	154	340	230	81	149
Sumbang	11.681	12.086	12.898	5.523	3.005	4.231	1.243	695	548
Sumsel	15.718	14.797	15.604	7.548	5.370	3.351	2.297	1.356	941
Sumut	60.691	84.503	83.012	34.478	23.080	26.172	8.084	3.741	4.491
Indonesia	714.043	750.686	824.717	338.628	208.897	219.223	76.619	40.774	36.966

⁴ Berdasarkan pertanyaan "Apa sumber utama penerangan rumah tangga ini?" pada kuesioner VSEN 18K SUSENAS 2018. Tingkat prediksi untuk mengestimasi rumah tangga dengan anak di bawah-5 tahun dan di bawah-1 tahun sangat rendah.

Lampiran 13.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Listrik yang di Dalamnya Terdapat Lansia dan Difabel (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT tanpa air bersih dengan anggota lansia	Jumlah lansia perempuan di kolom 1	Jumlah lansia laki-laki di kolom 1	Jumlah RT tanpa air bersih dengan anggota difabel	Jumlah perempuan difabel di kolom 4	Jumlah laki-laki difabel di kolom 4
Aceh	1.986	900	1.086	2.436	1.563	874
Bali	1.227	860	367	554	202	352
Bangka Belitung	854	264	590	746	278	468
Banten	1.213	1.213		7.895	4.347	3.548
Bengkulu	2.456	1.516	940	4.695	2.160	2.172
DI Yogyakarta	285	285		585	348	236
DKI Jakarta						
Gorontalo	3.295	1.739	1.556	4.480	1.675	1.979
Jambi	5.042	2.075	2.967	9.703	4.741	4.578
Jawa Barat	3.435	2.224	1.211	6.746	3.651	3.095
Jawa Tengah	5.631	4.002	1.629	4.496	3.054	1.443
Jawa Timur	12.599	6.258	6.341	13.156	6.698	6.163
Kalbar	23.021	11.140	11.881	41.560	21.152	18.783
Kalsel	1.881	947	933	3.354	1.606	1.473
Kalteng	4.835	1.643	3.191	12.893	7.153	5.395
Kaltim	238		238	989	622	367

Kalut	899	124	775	2.425	590	1.834
Kep. Riau	839	368	472	935	437	498
Lampung	1.923	289	1.635	5.358	1.189	3.329
Maluku	7.088	3.585	3.504	18.430	9.568	7.211
Maluku Utara	2.689	1.446	1.242	5.199	2.493	2.135
NTB	1.716	1.070	645	2.332	1.755	542
NTT	70.701	36.453	34.248	140.878	72.614	54.966
Papua	22.727	7.755	14.972	61.268	27.243	28.698
Papua Barat	3.150	1.470	1.681	6.957	3.363	2.991
Riau	11.532	5.335	6.197	25.949	13.109	11.634
Sulbar	3.083	1.510	1.574	5.904	3.306	2.390
Sulsel	12.449	6.703	5.746	18.045	8.982	8.409
Sulteng	8.315	3.472	4.842	19.801	10.426	8.271
Sultra	2.909	1.790	1.119	3.932	2.288	1.531
Sulut	2.731	1.303	1.428	2.497	1.254	1.162
Sumbar	9.558	3.774	5.785	13.250	6.945	5.991
Sumsel	8.937	4.297	4.640	14.524	7.637	6.565
Sumut	22.563	11.789	10.774	35.606	19.410	15.049
Indonesia	261.807	127.597	134.210	497.578	251.862	214.133

Lampiran 14.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak yang di Dalamnya Terdapat Anak (Susenas 2018)⁵

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah RT tanpa sanitasi dengan anak di bawah-18 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT tanpa sanitasi dengan anak di bawah-5 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT tanpa sanitasi anak di bawah-1 tahun	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	312.722	313.395	336.909	164.445	86.789	103.229	38.943	19.773	19.525
Bali	57.306	45.361	57.093	20.083	11.062	12.250	4.810	2.791	2.023
Bangka Belitung	40.893	32.506	33.727	18.904	11.281	9.800	4.102	2.443	1.715
Banten	681.488	609.900	667.624	326.913	177.351	182.841	72.942	38.051	35.767
Bengkulu	209.441	175.454	182.117	92.881	51.402	49.036	20.817	9.868	10.948
DI Yogyakarta	70.370	48.649	55.134	27.173	13.720	15.640	6.981	2.785	4.196
DKI Jakarta	156.289	147.673	126.253	66.602	41.537	35.295	20.048	9.765	10.283
Gorontalo	81.494	72.077	79.544	40.388	22.323	24.870	8.206	3.423	4.940
Jambi	241.460	200.988	207.434	105.198	55.427	59.819	24.619	11.563	13.217
Jawa Barat	3.171.101	2.644.361	2.794.586	1.355.045	715.855	750.329	292.219	147.972	146.082
Jawa Tengah	1.627.598	1.273.418	1.350.281	659.222	360.349	359.447	152.131	80.371	73.177
Jawa Timur	2.106.698	1.549.509	1.624.980	808.552	418.067	434.742	185.656	89.590	96.829
Kalbar	428.900	392.377	407.067	199.822	111.395	112.954	44.437	24.078	21.159
Kalsel	304.044	262.074	271.664	131.784	71.270	72.625	30.458	16.089	14.634
Kalteng	236.825	196.673	212.403	104.810	54.992	61.896	21.256	9.437	12.663
Kaltim	132.851	117.257	123.240	60.086	35.671	33.855	11.837	4.646	7.193

Kalut	35.026	35.327	35.643	18.420	11.916	10.708	4.655	2.136	2.550
Kep. Riau	56.333	46.807	49.758	24.666	14.085	13.365	4.696	2.950	1.821
Lampung	775.343	611.907	664.985	339.777	184.300	188.633	78.886	43.446	35.829
Maluku	93.532	118.062	121.856	49.921	35.050	35.503	13.227	7.091	6.439
Maluku Utara	74.265	85.888	89.911	38.904	24.373	25.725	8.859	5.134	4.345
NTB	269.990	222.600	225.607	120.286	68.570	61.022	28.560	14.180	14.606
NTT	457.742	550.222	573.048	251.648	161.056	161.450	63.932	33.244	32.328
Papua	378.692	375.941	427.585	170.572	103.441	112.333	31.236	15.591	16.238
Papua Barat	42.530	47.035	50.647	20.826	13.039	13.911	4.955	2.478	2.476
Riau	361.747	342.054	366.649	175.668	94.997	103.003	41.238	23.446	17.792
Sulbar	91.845	95.663	103.749	50.016	31.609	30.754	10.038	4.499	5.539
Sulse	300.047	289.156	308.441	143.428	81.303	85.174	34.332	15.962	19.387
Sulteng	203.421	195.106	206.475	94.737	57.106	56.532	22.407	10.786	11.806
Sultra	145.476	154.507	163.318	78.839	47.523	49.996	22.046	10.421	11.820
Sulut	116.221	103.548	106.537	53.367	29.684	32.414	14.351	6.943	7.565
Sumbang	408.014	408.075	443.353	197.636	111.825	121.409	43.480	21.672	21.808
Sumsel	491.813	430.192	450.666	219.370	121.955	118.166	49.373	24.308	25.442
Sumut	644.798	755.986	796.617	330.310	210.364	223.721	78.349	39.846	39.926
Indonesia	14.806.315	12.949.748	13.714.901	6.560.299	3.640.689	3.762.448	1.494.082	756.777	752.069

⁵ Berdasarkan pertanyaan "Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan siapa saja yang menggunakan?". ⁶ "Apakah jenis kloset yang digunakan?". & ⁷ "Dimanakah tempat pembuangan akhir tinja?". pada kuesioner VSEN-18K SUSENAS 2018.

Lampiran 15.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak yang di Dalamnya Terdapat Lansia dan Difabel (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT tanpa sanitasi dengan anggota lansia	Jumlah lansia perempuan di kolom 1	Jumlah lansia laki-laki di kolom 1	Jumlah RT tanpa sanitasi dengan anggota difabel	Jumlah perempuan difabel di kolom 4	Jumlah laki-laki difabel di kolom 4
Aceh	93.434	60.782	48.899	172.200	126.877	89.108
Bali	31.468	23.224	20.947	32.873	21.643	20.222
Bangka Belitung	9.567	6.073	5.901	15.044	8.532	9.792
Banten	234.572	147.702	134.439	361.421	245.839	217.441
Bengkulu	62.309	39.851	40.308	96.178	64.686	57.241
DI Yogyakarta	57.463	42.472	38.106	48.256	32.352	25.305
DKI Jakarta	35.581	23.581	15.752	105.881	74.411	63.356
Gorontalo	22.371	13.960	13.974	49.642	34.498	30.114
Jambi	76.806	45.986	48.235	110.064	69.144	70.820
Jawa Barat	1.288.183	871.888	788.940	1.727.216	1.184.865	967.346
Jawa Tengah	924.565	631.191	563.475	941.939	619.369	527.047
Jawa Timur	1.239.121	854.365	717.904	1.197.682	783.400	647.907
Kalbar	122.985	77.106	79.423	210.132	139.826	132.312
Kalsel	94.085	58.220	53.303	146.830	96.436	83.280
Kalteng	61.840	38.461	38.486	120.029	78.055	80.323
Kaltim	39.623	22.620	27.573	77.616	50.559	51.689

Kalut	10.422	5.492	7.969	23.463	15.172	16.748
Kep. Riau	16.449	10.569	11.247	29.220	19.510	17.786
Lampung	273.468	170.066	173.217	349.605	218.296	217.909
Maluku	24.698	17.450	14.953	47.556	32.141	30.545
Maluku Utara	17.254	11.269	10.969	39.992	29.104	27.323
NTB	93.270	67.092	47.465	138.074	97.113	67.637
NTT	150.747	99.560	91.777	284.474	200.650	187.987
Papua	40.892	20.788	29.429	92.699	61.587	65.784
Papua Barat	8.234	4.531	5.254	22.393	14.550	16.512
Riau	92.884	55.692	59.159	220.066	147.264	152.505
Sulbar	22.015	15.203	12.489	44.554	29.151	27.195
Sulsel	116.890	82.320	64.576	196.827	139.269	111.548
Sulteng	56.180	34.076	33.305	128.724	88.823	78.226
Sultra	39.431	26.669	21.506	65.119	43.320	37.345
Sulut	39.622	25.180	26.343	58.107	38.123	37.484
Sumbar	169.636	114.970	99.272	284.295	204.366	164.820
Sumsel	151.885	98.854	95.935	241.953	158.806	154.063
Sumut	208.996	141.020	119.054	332.709	230.361	201.035
Indonesia	5.927.146	3.958.282	3.559.585	8.012.833	5.398.099	4.685.754

Lampiran 16.
Estimasi Rumah Tangga yang di Dalamnya Terdapat Anak Tanpa Asuransi Kesehatan (Susenas 2018)⁶

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah anak dengan anak di bawah-18 tahun tanpa asuransi kesehatan	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan anak di bawah-5 tahun tanpa asuransi kesehatan	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT dengan anak di bawah-18 tahun tanpa asuransi kesehatan	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	170.366	113.082	115.567	133.022	73.917	73.406	49.680	24.374	25.534
Bali	335.220	254.753	259.712	165.581	93.259	86.734	45.665	25.325	20.626
Bangka Belitung	112.766	85.749	88.089	55.475	31.369	30.459	12.477	6.599	5.934
Banten	1.199.208	941.481	997.151	654.709	361.893	360.980	179.377	95.608	86.839
Bengkulu	214.166	160.405	163.321	107.874	59.220	56.568	25.845	13.218	12.766
Di Yogyakarta	187.813	137.542	117.744	101.166	55.109	51.514	22.794	11.207	11.588
DKI Jakarta	349.299	239.566	271.544	192.433	102.279	109.413	66.525	34.013	32.512
Gorontalo	98.173	67.463	72.782	62.330	35.674	35.632	15.649	7.205	8.845
Jambi	408.496	324.315	336.707	195.753	106.271	108.744	45.086	21.119	24.034
Jawa Barat	4.670.040	3.441.571	3.584.949	2.387.264	1.269.801	1.312.939	546.953	268.017	290.555
Jawa Tengah	2.882.274	2.003.283	2.135.289	1.448.806	748.779	803.706	369.080	189.811	182.335
Jawa Timur	3.456.889	2.456.500	2.495.396	1.546.444	811.062	837.679	362.596	174.440	190.140
Kalbar	594.669	512.283	520.896	311.739	175.225	175.751	73.012	40.295	32.722
Kalsel	336.579	257.753	264.134	156.741	84.698	86.377	42.419	21.379	21.040
Kalteng	258.092	199.239	213.961	127.554	65.286	74.771	30.843	13.875	17.339
Kaltim	236.754	193.009	193.130	123.703	69.355	67.540	27.695	12.985	14.712

Kalut	41.121	34.122	34.051	24.811	14.653	13.900	7.318	3.339	4.042
Kep. Riau	164.042	134.800	146.976	90.874	45.735	59.584	16.581	8.982	7.698
Lampung	971.096	690.878	736.504	486.064	254.673	267.180	111.590	59.528	52.243
Maluku	189.822	187.964	197.561	114.710	72.704	75.780	32.554	16.717	16.350
Maluku Utara	104.064	93.666	102.265	60.178	33.139	39.252	14.385	7.747	7.131
NTB	651.399	458.207	458.226	356.283	187.972	190.785	78.479	35.427	43.838
NTT	558.040	498.541	507.486	368.255	225.259	233.572	98.640	50.981	50.938
Papua	141.538	125.615	118.993	83.825	52.258	49.364	23.489	13.494	10.657
Papua Barat	77.471	67.458	68.011	48.840	30.877	30.090	15.825	8.584	7.394
Riau	679.419	584.401	609.044	382.212	210.629	224.573	94.635	48.037	46.599
Sulbar	72.959	55.482	58.188	47.922	26.274	29.142	14.481	6.351	8.130
Sulsel	678.537	539.489	529.240	402.295	235.213	231.140	110.489	57.181	55.640
Sulteng	304.739	239.147	243.862	173.402	100.283	100.665	46.921	22.806	24.274
Sultra	263.549	224.927	222.874	165.678	97.676	100.283	48.431	25.310	23.431
Sulut	203.745	150.545	157.940	111.819	62.652	65.164	31.232	16.684	15.052
Sumbar	418.796	353.996	371.396	248.803	137.507	151.009	61.785	31.342	30.473
Sumsel	287.534	220.025	253.864	158.080	83.033	90.570	39.240	20.683	19.095
Sumut	1.492.060	1.430.556	1.434.108	852.121	523.157	529.732	233.283	118.390	118.946
Indonesia	22.810.735	17.477.811	18.080.957	11.946.766	6.536.892	6.753.998	2.995.054	1.511.051	1.519.454

⁶ Berdasarkan pertanyaan "Jaminan kesehatan apa saja yang dimiliki (nama)?" pada kuesioner VSEN.18K.SUSENAS.2018. Status kepemilikan Jaminan kesehatan berdasarkan kepemilikan BPJS/OKN/Jamkesda.

Lampiran 17.
Estimasi Rumah Tangga yang di Dalamnya Terdapat Lansia dan Difabel Tanpa Asuransi Kesehatan (Susenas 2018)

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah RT dengan anggota lansia tanpa asuransi kesehatan	Jumlah lansia perempuan di kolom 1	Jumlah lansia laki-laki di kolom 1	Jumlah RT dengan anggota difabel tanpa asuransi kesehatan	Jumlah perempuan difabel di kolom 4	Jumlah laki-laki difabel di kolom 4
Aceh	12.262	7.673	5.668	26.514	18.493	11.963
Bali	121.390	90.939	73.843	127.101	78.400	77.738
Bangka Belitung	21.159	12.493	12.921	44.615	27.581	30.238
Banten	247.012	156.812	128.592	415.001	267.286	239.908
Bengkulu	46.595	30.304	27.162	70.825	46.606	40.733
DI Yogyakarta	60.391	40.734	32.998	58.370	37.519	28.621
DKI Jakarta	65.497	45.245	38.700	134.584	91.350	79.281
Gorontalo	12.973	9.071	6.876	33.099	19.503	19.868
Jambi	95.487	57.694	60.855	128.279	80.318	78.151
Jawa Barat	1.183.533	761.371	701.931	1.626.826	1.073.837	877.701
Jawa Tengah	1.027.106	688.903	624.603	1.057.283	663.083	570.951
Jawa Timur	1.382.569	927.367	788.511	1.312.312	864.184	686.675
Kalbar	154.752	100.094	94.279	254.855	164.411	155.250
Kalsel	73.624	48.091	40.092	123.309	80.563	68.870
Kalteng	44.617	25.927	27.056	92.566	58.156	60.100
Kaltim	45.701	26.743	29.001	84.130	50.163	52.949

Kalut	5.943	3.371	3.329	14.705	8.295	10.108
Kep. Riau	25.939	16.595	15.418	56.417	31.578	35.554
Lampung	255.143	158.375	163.430	327.315	200.387	198.090
Maluku	37.454	24.616	21.225	70.303	46.391	40.419
Maluku Utara	20.599	12.541	13.257	43.221	28.434	27.658
NTB	130.243	89.572	73.059	212.903	139.267	114.688
NTT	110.565	77.000	55.969	203.495	140.377	114.874
Papua	10.589	6.056	6.572	31.415	21.559	22.180
Papua Barat	4.523	2.413	2.845	22.711	13.714	14.621
Riau	125.686	79.812	77.224	297.269	191.512	193.922
Sulbar	9.620	6.511	4.876	20.039	12.382	12.404
Sulsel	167.384	117.783	88.625	266.897	181.574	139.439
Sulteng	61.813	37.324	39.140	122.208	76.851	73.239
Sultra	45.330	30.262	25.562	69.569	45.939	38.717
Sulut	51.668	35.052	31.813	71.166	45.684	43.605
Sumbar	113.644	78.136	65.176	180.646	124.830	104.025
Sumsel	72.060	47.692	40.211	102.867	70.551	54.159
Sumut	358.797	248.052	198.050	521.847	365.554	286.969
Indonesia	6.201.668	4.100.626	3.618.868	8.224.662	5.366.331	4.603.665

Lampiran 18.
Estimasi Rumah Tangga Tanpa Internet yang di Dalamnya Terdapat Anak Usia Sekolah (Susenas 2018)⁷

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	Jumlah RT dengan anak usia SD tanpa internet	Jumlah anak perempuan di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah anak laki-laki di bawah-18 tahun di kolom 1	Jumlah RT dengan anak usia SLTP tanpa internet	Jumlah anak perempuan di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah anak laki-laki di bawah-5 tahun di kolom 4	Jumlah RT dengan anak usia SLTA tanpa internet	Jumlah anak perempuan di bawah-1 tahun di kolom 7	Jumlah anak laki-laki di bawah-1 tahun di kolom 7
Aceh	483.075	291.216	305.269	173.235	87.360	98.230	77.363	35.884	43.277
Bali	266.299	147.980	162.669	58.953	29.151	31.516	16.465	9.018	7.772
Bangka Belitung	114.329	62.821	64.376	28.435	13.486	15.889	8.587	4.052	5.014
Banten	977.873	533.554	584.464	213.425	98.431	119.713	73.206	25.997	47.243
Bengkulu	171.099	92.017	101.627	51.234	21.883	30.702	19.853	9.456	10.685
DI Yogyakarta	188.880	98.121	106.969	21.592	9.366	12.227	6.430	1.953	4.477
DKI Jakarta	627.820	348.242	366.074	84.056	30.487	56.036	29.989	14.828	15.796
Gorontalo	90.839	50.491	57.478	28.306	13.287	16.499	7.679	3.080	4.887
Jambi	294.406	158.740	171.342	79.060	39.778	42.825	26.103	12.280	14.508
Jawa Barat	3.706.856	2.020.367	2.135.248	750.767	309.361	476.066	275.661	117.464	168.562
Jawa Tengah	2.431.378	1.294.116	1.392.287	467.120	208.513	277.712	160.762	71.891	91.443
Jawa Timur	2.584.997	1.374.312	1.453.026	521.840	228.303	317.526	215.188	102.139	116.299
Kalbar	424.114	236.518	262.715	150.218	78.539	84.430	56.112	23.796	34.328
Kalsel	318.980	174.430	182.324	74.752	34.041	44.790	28.003	11.503	16.964
Kalteng	215.219	112.217	126.328	63.815	32.557	35.075	21.446	9.713	12.091
Kaltim	271.936	152.646	157.484	61.245	27.012	36.791	19.815	9.142	11.190

Kalut	53.636	31.296	34.567	16.479	8.136	10.067	5.633	3.636	2.142
Kep. Riau	167.848	108.708	97.197	35.265	16.987	21.324	10.978	5.093	6.175
Lampung	731.249	393.197	421.047	176.323	78.369	104.038	65.458	28.050	39.171
Maluku	156.196	105.336	108.439	67.639	34.761	41.500	33.016	15.723	19.586
Maluku Utara	114.565	71.157	79.531	51.568	27.713	31.030	24.035	11.066	13.729
NTB	482.134	256.874	285.885	153.503	71.348	90.933	59.574	26.325	35.133
NTT	517.031	356.753	361.178	268.091	144.494	158.693	121.493	62.713	65.800
Papua	302.608	198.704	215.127	141.269	71.823	80.120	74.506	34.089	42.650
Papua Barat	76.393	49.878	52.439	29.888	16.556	18.259	12.152	5.998	7.055
Riau	586.494	336.827	366.248	159.052	81.008	90.018	55.814	21.516	35.544
Sulbar	117.088	74.352	79.544	49.628	25.960	28.985	22.457	10.223	13.426
Sulsel	678.255	405.195	438.553	197.775	96.799	113.344	68.285	27.404	43.530
Sulteng	251.133	146.970	159.070	95.615	47.675	55.763	36.172	16.142	20.902
Sultra	242.389	145.341	161.945	86.583	42.100	51.316	28.794	13.323	17.154
Sulut	149.228	96.729	104.699	52.262	21.500	35.805	21.168	7.013	14.535
Sumbar	439.259	268.154	288.397	131.288	66.068	76.302	44.559	16.566	29.287
Sumsel	690.031	391.660	419.388	205.905	92.711	122.356	71.674	29.379	44.923
Sumut	1.187.023	788.678	819.728	386.943	195.494	233.055	156.914	75.010	88.320
Indonesia	20.130.660	11.373.598	12.122.664	5.133.129	2.401.058	3.058.936	1.955.344	871.466	1.143.598

⁷ Berdasarkan pertanyaan "Dalam 3 bulan terakhir apakah (nama) memiliki dan menggunakan telepon seluler (HP) nirkabel?" & "Dalam 3 bulan terakhir apakah (nama) memiliki dan menggunakan internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp?) pada kuesioner VSEN.18K SUSENAS 2018."

Tabel 19.
Jumlah Santri Mukim dan Non-Mukim

Provinsi	Jumlah Pesantren	Jumlah Santri Mukim	Jumlah Santri Non-mukim	Jumlah Santri Mukim
Aceh	1.177	123.872	51.380	175.252
Bali	90	5.222	2.859	8.081
Bangka Belitung	53	7.398	3.398	10.796
Banten	4.574	60.897	96.223	157.120
Bengkulu	52	7.060	2.227	9.287
Di Yogyakarta	319	30.858	14.271	45.129
DKI Jakarta	102	17.355	6.568	23.923
Gorontalo	28	3.333	3.989	7.322
Jambi	229	38.058	8.466	46.524
Jawa Barat	8.343	147.467	306.769	454.236
Jawa Tengah	3.787	166.513	132.228	298.741
Jawa Timur	4.450	323.293	241.047	564.340
Kalbar	245	26.150	12.839	38.989
Kalsel	214	46.259	27.480	73.739
Kalteng	76	8.406	6.316	14.722
Kaltim	163	21.854	9.871	31.725
Kalut	21	2.390	278	2.668
Kep. Riau	63	7.691	5.423	13.114
Lampung	676	32.237	31.797	64.034
Maluku	16	1.056	264	1.320
Maluku Utara	20	2.073	2.897	4.970
NTB	684	126.881	122.961	249.842
NTT	27	1.933	822	2.755
Papua	37	2.109	2.268	4.377
Papua Barat	18	1.294	1.099	2.393
Riau	233	37.372	13.269	50.641

Provinsi	Jumlah Pesantren	Jumlah Santri Mukim	Jumlah Santri Non-mukim	Jumlah Santri Mukim
Sulbar	74	8.064	3.237	11.301
Sulsel	289	43.091	30.613	73.704
Sulteng	88	7.147	3.255	10.402
Sultra	86	8.995	6.150	15.145
Sulut	22	2.079	1.865	3.944
Sumbar	211	24.695	10.602	35.297
Sumsel	317	39.123	29.230	68.353
Sumut	183	58.426	11.554	69.980

Tabel 20.
Jumlah dan Sebaran Anak yang Didampingi Peksos di Luar Panti (Kemos 2020)

Provinsi	Jumlah anak perempuan di luar panti yang didampingi Peksos	Jumlah anak laki-laki di luar panti yang didampingi Peksos	Jumlah anak di luar panti yang didampingi Peksos
Aceh	373	321	694
Bali	242	270	512
Bangka Belitung	216	144	360
Banten	867	904	1.771
Bengkulu	381	313	694
Di Yogyakarta	537	551	1.088
DKI Jakarta	1.126	1.198	2.324
Gorontalo	207	206	413
Jambi	413	427	840
Jawa Barat	4.614	4.629	9.243
Jawa Tengah	2.334	2.080	4.414
Jawa Timur	5.061	5.257	10.318
Kalbar	498	521	1.019
Kalsel	461	379	840
Kalteng	150	149	299
Kaltim	145	136	281
Kalut	114	90	204
Kep. Riau	204	201	405
Lampung	1.146	1.148	2.294
Maluku	515	546	1.061
Maluku Utara	537	505	1.042
NTB	2.381	2.587	4.968
NTT	1.380	1.269	2.649
Papua	149	163	312
Papua Barat	38	34	72
Riau	84	93	177

Provinsi	Jumlah anak perempuan di luar panti yang didampingi Peksos	Jumlah anak laki-laki di luar panti yang didampingi Peksos	Jumlah anak di luar panti yang didampingi Peksos
Sulbar	302	263	565
Sulsel	880	850	1.730
Sulteng	102	95	197
Sultra	390	416	806
Sulut	282	272	554
Sumbar	276	157	433
Sumsel	158	166	324
Sumut	770	720	1.490
Indonesia	27.333	27.060	54.393

Lampiran 21.
Jumlah Laporan Kasus Kekerasan dari KPPPA (2019-2020)

Provinsi	1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah kasus tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus fisik tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus psikis tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus seksual tercatat Jan-Des 2019	Jumlah kasus fisik tercatat per April 2020	Jumlah kasus psikis tercatat per April 2020	Jumlah kasus seksual tercatat per April 2020
Aceh	679	273	341	222	7	8	0
Bali	322	179	146	58	8	4	0
Bangka Belitung	176	76	87	74	14	5	0
Banten	399	188	171	175	6	1	2
Bengkulu	171	108	26	67	0	0	1
DI Yogyakarta	1.061	394	367	358	10	6	6
DKI Jakarta	911	493	490	264	8	5	2
Gorontalo	217	127	12	76	3	0	0
Jambi	368	128	97	160	4	3	1
Jawa Barat	676	243	198	292	7	5	3
Jawa Tengah	2.042	925	677	802	48	28	15
Jawa Timur	1.944	780	574	724	20	14	11
Kalbar	260	96	9	137	5	2	3
Kalsel	212	58	73	100	5	4	2
Kalteng	152	62	47	65	0	0	0
Kaltim	617	275	124	194	13	5	10

Kalut	325	215	38	85	25	0	0
Kep. Riau	312	112	112	81	13	2	2
Lampung	373	129	82	255	4	4	1
Maluku	149	76	38	50	5	1	1
Maluku Utara	95	28	31	43	0	0	0
NTB	504	286	54	134	2	1	0
NTT	334	135	65	129	14	0	2
Papua	224	118	101	72	4	1	0
Papua Barat	148	79	119	51	1	21	1
Riau	409	115	78	211	4	1	1
Sulbar	139	100	7	40	3	0	0
Sulsel	1.811	1.116	363	474	52	12	3
Sulteng	461	250	105	156	9	11	1
Sultra	118	44	17	58	5	0	0
Sulut	258	97	25	93	4	2	0
Sumbar	546	265	134	261	3	0	3
Sumsel	344	188	81	130	5	4	3
Sumut	849	337	172	410	25	11	4
Indonesia	17.606	8.095	5.061	6.501	336	161	78

Tabel 22.
Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (KPPPA 2020)

Provinsi	Jumlah kasus tercatat Jan-Des 2019
Aceh	7
Bali	3
Bangka Belitung	5
Banten	7
Bengkulu	0
Di Yogyakarta	2
DKI Jakarta	2
Gorontalo	4
Jambi	4
Jawa Barat	9
Jawa Tengah	12
Jawa Timur	11
Kalbar	1
Kalsel	9
Kalteng	1
Kaltim	6
Kalut	1
Kep. Riau	2
Lampung	0
Maluku	2
Maluku Utara	0
NTB	2
NTT	0
Papua	0
Papua Barat	0
Riau	4

Provinsi	Jumlah kasus tercatat Jan-Des 2019
Sulbar	0
Sulsel	18
Sulteng	0
Sultra	0
Sulut	6
Sumbar	5
Sumsel	2
Sumut	10
Indonesia	135

Lampiran 23.
Estimasi Rasio Ketersediaan Layanan Dasar Perlindungan Warga (per 1 Juta penduduk)

Provinsi	1	2	3	4	5	6
	Jumlah Penduduk (Sumber: Dukcapil, per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan tempat tidur di rumah sakit per 1000.000 penduduk (Sumber: PERSI per April 2018)	Rasio ketersediaan dokter per 1000.000 penduduk (Sumber: Kemenkes per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan perawat per 1000.000 penduduk (Sumber: Kemenkes per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan ventilator per 1000.000 penduduk (Sumber: ASPAK per Maret 2020)	Rasio ketersediaan pekerja sosial per 1000.000 penduduk (Sumber: PPK Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kemensos per Januari 2020)
Aceh	5.269.997	2490	527	2073	26,4	5,7
Bali	4.247.341	2070	824	2063	55,6	2,8
Bangka Belitung	1.400.497	1930	610	2532	80,7	7,9
Banten	10.906.472	1200	395	941	30,1	1,2
Bengkulu	2.007.797	1780	400	2115	32,9	10,5
DI Yogyakarta	3.656.108	2360	972	2455	65,4	5,5
DKI Jakarta	11.058.944	2750	1494	2609	96,8	2,2
Gorontalo	1.185.685	2030	413	1953	34,6	8,4
Jambi	3.482.008	1920	441	1899	25,0	4,0
Jawa Barat	45.776.834	1120	247	827	26,5	1,3
Jawa Tengah	36.700.065	1510	354	1293	31,4	1,7
Jawa Timur	40.821.008	1440	352	1270	23,0	1,4
Kalbar	5.436.512	1540	210	1336	21,0	3,3

	1	2	3	4	5	6
Provinsi	Jumlah Penduduk (Sumber: Dukcapil, per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan tempat tidur di rumah sakit per 1000.000 penduduk (Sumber: PERSI per April 2018)	Rasio ketersediaan dokter per 1000.000 penduduk (Sumber: Kemenkes per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan perawat per 1000.000 penduduk (Sumber: Kemenkes per 31 Desember 2019)	Rasio ketersediaan ventilator per 1000.000 penduduk (Sumber: ASPAK per Maret 2020)	Rasio ketersediaan pekerja sosial per 1000.000 penduduk (Sumber: PPK Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kemensos per Januari 2020)
Kalsel	4.055.072	1700	390	1827	28,1	3,7
Kalteng	2.589.088	1350	342	2278	20,5	3,9
Kaltim	3.630.765	2120	461	1787	31,4	1,9
Kalut	658.535	2350	624	2909	85,0	7,6
Kep. Riau	1.970.391	2190	596	1946	54,8	4,1
Lampung	9.031.306	1180	250	1100	10,1	2,8
Maluku	1.859.436	1980	253	2363	11,8	5,9
Maluku Utara	1.310.730	1950	298	1666	29,8	9,2
NTB	5.296.774	1220	275	1438	22,8	3,2
NTT	5.407.446	1410	163	1387	14,8	6,8
Papua	4.293.310	1910	188	1289	10,5	5,6
Papua Barat	1.146.327	2680	314	2529	27,0	3,5
Riau	5.975.597	1440	425	1389	36,1	2,5
Sulbar	1.555.470	1360	266	1043	40,5	6,4
Sulsel	8.950.474	2240	382	1563	32,3	2,5
Sulteng	2.977.347	2280	304	2303	26,9	5,4

Sultra	2.631.568	1700	368	2287	25,8	8,4
Sulut	2.654.277	3050	615	2225	31,3	5,3
Sumbar	5.460.768	1810	476	1574	37,9	5,3
Sumsel	8.278.363	1450	307	1644	33,9	4,7
Sumut	14.902.161	2010	389	1160	32,1	2,8
Indonesia	266.584.473	1830	403	1413	31,4	2,8